

# INDONESIA ECONOMIC QUARTERLY

Desember 2018

## Memperkuat daya saing



**PERKEMBANGAN TRIWULANAN  
PEREKONOMIAN INDONESIA**  
*Memperkuat daya saing*

Desember 2018



## Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly, IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo A. Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomics, Trade and Investment (MTI) Global Practice*, dibawah bimbingan Ndiame Diop (*Practice Manager*) dan Frederico Gil Sander (*Lead Economist*). Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, *Senior Economist* dan *lead author*, tim inti terdiri dari Abigail, Arsianti, Dwi Endah Abriningrum, Yus Medina, Alief Aulia Rezza, Ratih Dwi Rahmadanti dan Dhruv Sharma. Dukungan administrasi diberikan oleh Deviana Djalil. Diseminasi dilakukan oleh Nugroho Sunjoyo, Jerry Kurniawan, dan GB Surya Ningnagara atas bimbingan Lestari Boediono Qureshi.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Dhruv Sharma (Bagian A.1 dan Kotak A.1), Alief Aulia Rezza (Bagian A.2, A.3 dan Kotak A.2), Dwi Endah Abriningrum (Bagian A.4), Dhruv Sharma and Ratih Dwi Rahmadanti (Bagian A.5), Yus Medina (Bagian A.6), Derek H.C. Chen (Bagian A.7), dan Massimiliano Cali dengan bantuan dan masukan dari Aufa Doarest, Taufik Hidayat, Bertine Kamphuis, Giorgio Presidente, Muhammad Hazmi Ash Shidqi, Daniel van Tuijll dan Ibnu Edy Wiyono, (Bagian B, Kotak B.1 dan Kotak B.2), and Abigail (Lampiran). Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Ekaterina T. Vashakmadze (*Senior Economist*, DECPG, Bank Dunia), Ergys Islamaj (*Senior Economist*, EAPCE, Bank Dunia) dan Janani Kandhadai (*editorial assistant*).

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic dan Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA)*.

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Data terakhir tertanggal 3 Desember 2018. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Photo merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Laporan tersedia untuk diunduh dalam bahasa Inggris dan Indonesia melalui: [worldbank.org/ieq](http://worldbank.org/ieq).

Laporan edisi sebelumnya:

- September 2018: [Urbanisasi untuk Semua](#)
- Juni 2018: [Pendidikan untuk pertumbuhan](#)
- Maret 2018: [Menuju pertumbuhan inklusif](#)

Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan hubungi [ddjalil@worldbank.org](mailto:ddjalil@worldbank.org). Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi [dchen@worldbank.org](mailto:dchen@worldbank.org).

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke:



[www.worldbank.org/id](http://www.worldbank.org/id)



[@BankDunia](#) [#IEQBankDunia](#)



[BankDunia](#)



[instagram.com/worldbank](https://www.instagram.com/worldbank)



[www.linkedin.com/company/the-world-bank](https://www.linkedin.com/company/the-world-bank)

## Singkatan

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	NRP	Nominal Rate of Protection
BI	Bank Indonesia	N-O&G	Non-Oil & Gas
BITs	Bilateral Investment Treaties	NPL	Non-Performing Loans
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	NTI	Net Trade Index
BLU	Badan Layanan Umum	NTM	Non-Tariff Measures
BOP	Balance of Payments	O&G	Oil and Gas
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai	OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
BPS	Badan Pusat Statistik	OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
CAD	Current Account Deficit	PBI-JKN	Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional
CAR	Capital Adequacy Ratio	PHT	Penjualan Hasil Tambang
CG	Central Government	PKH	Program Keluarga Harapan
COMTRADE	Commodity Trade Statistics Database	PMI	Purchasing Managers' Index
CPB	Central Planning Bureau	PNBP	Other Non-Tax Revenues
CPI	Consumer Price Index	PPP	Public-Private Partnership
CPO	Crude Palm Oil	qoq	quarter-on-quarter
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership
DAK	Dana Alokasi Khusus	RHS	Sebelah Kanan
DAU	Dana Alokasi Umum	RON	Research Octane Number
DECPG	Development Economics Prospects Group	sa	Seasonally adjusted
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade	SBI	Sertifikat Bank Indonesia
DKI	Daerah Khusus Ibukota	SBN	Surat Berharga Negara
DNDF	Domestic Non-Deliverable Forward	SEMEFPA	Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis
DNI	Daftar Negatif Investasi	SKKMIGAS	Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
EAP(CE)	EAP Chief Economist	SNI	Standar Nasional Indonesia
EFTA	European Free Trade Association	SOEs	State owned Enterprises (BUMN)
EMBI (G)	Emerging Market Bond Index Global	STRI	Service Trade Restrictiveness Index
EMCI	Emerging Market Currency Index	SUN	Surat Utang Negara
EU	European Union	TA	Tax Amnesty
FAOSTATS	Database of Food and Agriculture Statistics	ToT	Terms-of-Trade
FDI	Foreign Direct Investment (PMA-Penanaman Modal Asing)	TPP	Trans-Pacific Partnership
FSAP	Financial Sector Assessment Program	UNIDO	United Nations Industrial Development Organization
FTA	Free Trade Agreement	UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
GDP	Gross Domestic Product (PDB)	USTR	United States Trade Representative
GoI	Government of Indonesia	VAT	Value Added Tax
ICTs	Information and Communication Technologies	VIX	Volatility Index
IDR	Indonesia Rupiah	WDI	World Development Indicators
IEQ	Indonesia Economic Quarterly	yoy	year-on-year
IHS	Institute Human Studies		
IMF	International Monetary Fund		
KAPET	Integrated Economic Development Zones		
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia		
kbpd	Kilo Barrels per Day		
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha		
LGST	Luxury Goods Sales Tax (Pajak Penjualan Barang Mewah)		
LHS	Left Hand Side		
LNG	Liquefied Natural Gas		
LPG	Liquid Petroleum Gas		
MoF	Ministry of Finance		
MSMEs	Micro, Small, Medium Enterprises (UMKM)		
MTI	Macroeconomics, Trade and Investment		

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>SINGKATAN .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF: MEMPERKUAT DAYA SAING.....</b>	<b>1</b>
<b>A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI .....</b>	<b>5</b>
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit menurun pada Triwulan ke-3 tahun 2018 .....	5
2. Harga komoditas yang terkait dengan energi terus mempertahankan peningkatannya .....	10
3. Harga minyak mentah yang lebih tinggi menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan semakin melebar .....	13
4. Inflasi IHK terus menurun .....	17
5. Kondisi keuangan makro tetap lemah di Triwulan ke-3 .....	19
6. Realisasi penerimaan yang solid mendukung pertumbuhan belanja yang tinggi, tetapi tantangan dalam hal kualitas belanja tetap ada .....	22
7. Perkiraan dan risiko pertumbuhan ekonomi .....	26
<b>B. MENINGKATKAN EKSPOR DAN INVESTASI DI INDONESIA: SALAH SATU AGENDA REFORMASI .....</b>	<b>31</b>
1. Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya di tingkat global guna memperkuat ketahanan dari berbagai guncangan yang terjadi dan menuai kesempatan-kesempatan yang ada dari lingkungan global saat ini .....	32
2. Distorsi di pasar faktor produksi utama melemahkan daya saing ekspor dan arus investasi .....	37
3. Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan investasi? .....	50
<b>REFERENSI.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA .....</b>	<b>58</b>

## GAMBAR

Gambar ES.1: Pertumbuhan PDB sedikit menurun di Triwulan ke-3 .....	3
Gambar ES.2: Pertumbuhan sektor manufaktur mengimbangi dampak penurunan pertumbuhan di sektor pertanian.....	3
Gambar ES.3: Defisit neraca perdagangan barang menyebabkan memburuknya neraca transaksi berjalan.....	3
Gambar ES.4: Rupiah terus terdepresiasi terhadap dolar AS di Triwulan ke-3, sebelum pulih kembali di Triwulan ke-4.....	3
Gambar ES.5: Inflasi IHK menurun di Triwulan ke-3 meskipun harga minyak lebih tinggi .....	4
Gambar ES.6: Penerimaan dan pengeluaran yang lebih baik dengan hasil bersih dari defisit anggaran Pemerintah yang lebih rendah yang diproyeksikan untuk tahun 2018 .....	4
Gambar A.1: Pertumbuhan PDB menurun sedikit di Triwulan ke-3 .....	5
Gambar A.2: Pertumbuhan investasi meningkat karena meningkatnya pertumbuhan investasi di sektor bangunan gedung dan struktur .....	6
Gambar A.3: Pertumbuhan konsumsi swasta menurun karena menurunnya konsumsi di sektor peralatan serta kesehatan dan pendidikan .....	6
Gambar A.4: Sebagian besar indikator yang paling sering terkait dengan konsumsi swasta menurun di Triwulan ke-3 .....	6
Gambar A.5: Pertumbuhan perdagangan global menurun .....	7
Gambar A.6: ... sebagaimana halnya dengan produksi industri.....	7
Gambar A.7: Pencapaian PMI di seluruh dunia menurun .....	8
Gambar A.8: Gejolak pasar keuangan global tidak sepenuhnya menghilang di Triwulan ke-3 .....	8
Gambar A.9: Pertumbuhan sektor manufaktur mengimbangi penurunan di sektor pertanian .....	10
Gambar A.10: Rata-rata pergerakan selama tiga bulan dari ekspor komoditas utama Indonesia.....	11
Gambar A.11: Harga komoditas non-pertanian terus meningkat, sementara komoditas pertanian tetap mendapat tekanan.....	12
Gambar A.12: Harga logam dasar di akhir tahun 2018 diperkirakan akan lebih tinggi dari rata-rata YTD .....	12
Gambar A.13: Defisit neraca perdagangan barang menyebabkan melemahnya neraca transaksi berjalan .....	13
Gambar A.14: Pertumbuhan ekspor barang yang lebih rendah terjadi di setiap kategori .....	14
Gambar A.15: Pertumbuhan impor barang terus melebihi ekspor, didorong oleh impor bahan bakar dan barang konsumsi .....	14
Gambar A.16: Neraca keuangan dan modal mengalami surplus yang stabil.....	15
Gambar A.17: FDI meningkat, sebagian besar di sektor manufaktur... ..	16
Gambar A.18: ... tetapi investasi langsung bersih belum cukup untuk menutup defisit neraca transaksi berjalan .....	16
Gambar A.19: Inflasi IHK menurun di Triwulan ke-3, tetapi perlahan meningkat di Triwulan ke-4 .....	17
Gambar A.20: Kenaikan seluruh kategori dalam harga produsen berkontribusi pada meningkatnya indeks harga produsen .....	18
Gambar A.21: Produsen menghadapi tekanan biaya yang lebih besar karena harga masukan meningkat paling tinggi selama tiga tahun ini .....	18
Gambar A.22: Rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS di Triwulan ke-3 sebelum pulih di sekitar awal Triwulan ke-4.....	19
Gambar A.23: Secara efektif riil, Rupiah terdepresiasi lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara setara di kawasan ..	19
Gambar A.24: Kepercayaan investor kembali pulih di Triwulan ke-3 dengan peningkatan imbal hasil obligasi yang jauh lebih rendah daripada di Triwulan ke-2.....	20
Gambar A.25: Selisih ( <i>spread</i> ) antara obligasi berdenominasi Rupiah dan obligasi berdenominasi USD mencapai puncaknya di Triwulan ke-3 tetapi mulai menyempit di awal Triwulan ke-4 .....	20
Gambar A.26: Kenaikan tingkat suku bunga kebijakan acuan belum sepenuhnya ditransmisikan ke tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi... ..	21
Gambar A.27: ... dan pertumbuhan kredit terus meningkat.....	21
Gambar A.28: Sektor perbankan menunjukkan ketahanan yang berkelanjutan dalam menghadapi pengetatan kebijakan moneter .....	21
Gambar A.29: Pajak penghasilan non-Migas, penerimaan terkait Migas dan PPN adalah kontributor utama untuk peningkatan total penerimaan yang tinggi.....	23
Gambar A.30: Subsidi energi, pembayaran bunga, belanja pegawai, dan belanja barang adalah kontributor utama peningkatan total pengeluaran.....	24
Gambar A.31: Tingginya pembelanjaan berlaku secara umum, dengan subsidi bahan bakar dan gas yang lebih tinggi dari yang direncanakan.....	24
Gambar A.32: Indeks harga tertimbang perdagangan bersih - historis dan perkiraan hingga tahun 2019 .....	27
Gambar A.33: Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar pada tahun 2018 dan 2019 karena investasi yang sarat barang impor tetap tinggi dan nilai tukar perdagangan yang melemah .....	27
Gambar A.34: Tingkat inflasi IHK diproyeksikan akan tetap berada dalam kisaran target .....	28
Gambar A.35: Penerimaan dan pengeluaran yang lebih tinggi dengan hasil bersih berupa defisit APBN yang lebih rendah diproyeksikan untuk tahun 2018 .....	28
Gambar B.1: Defisit transaksi berjalan melebar bersamaan dengan keseimbangan dasar.....	32
Gambar B.2: Rupiah lebih terdepresiasi dibandingkan dengan mata uang regional lainnya.....	32
Gambar B.3: Kisah dua negara: Keterbukaan perdagangan di Indonesia vs Thailand.....	33
Gambar B.4: Total ekspor Indonesia kehilangan pangsa pasar selama beberapa dekade terakhir.....	33
Gambar B.5: Naik turun daya saing manufaktur Indonesia .....	34
Gambar B.6: Apakah deindustrialisasi prematur terjadi di Indonesia?.....	35
Gambar B.7: Arus masuk FDI ke Indonesia masih belum maksimal.....	35
Gambar B.8: FDI berorientasi ekspor mengungguli FDI berorientasi pasar domestik di sektor manufaktur namun memiliki kemungkinan lebih besar untuk meninggalkan Indonesia.....	36
Gambar B.9: Penurunan pangsa investasi asing berorientasi ekspor yang baru di sektor manufaktur dan elektronik .....	36
Gambar B.10: Indonesia berpotensi menggantikan ekspor China ke AS dengan berbagai produknya.....	37
Gambar B.11: Produktivitas Indonesia harus menyusul negara-negara komparator .....	38
Gambar B.12: Indonesia telah meningkatkan hambatan perdagangannya jauh melebihi negara-negara setara lain sejak tahun 2009 .....	39
Gambar B.13: Karena hambatan perdagangan meningkat, demikian pula dengan tingkat proteksi perdagangan (NRP) .....	39
Gambar B.14: Indonesia telah menaikkan tingkat tarif impor terapan rata-rata lebih tinggi daripada negara-negara setara lain .....	40
Gambar B.15: Indonesia telah memperluas penerapan Tindakan Non Tarif atas berbagai kategori impor .....	41
Gambar B.16: Sebagian Tindakan Non Tarif menaikkan biaya impor secara signifikan di Indonesia .....	41

Gambar B.17: Indonesia membatasi impor jasa lebih besar daripada negara-negara lain .....	42
Gambar B.18: Restriksi regulasi terhadap FDI masih tinggi di Indonesia .....	43
Gambar B.19: Restriksi DNI mengurangi masuknya industri asing – khususnya eksportir – dan keluarnya industri domestik ... ..	44
Gambar B.20: ... dan persaingan yang lebih rendah mengurangi kinerja dan upah, serta menaikkan harga-harga.....	44
Gambar B.21: Kesulitan perubahan (transisi) sektor hortikultura Indonesia .....	45
Gambar B.22: Sektor elektronik Indonesia yang berorientasi pada pasar domestik.....	46
Gambar B.23: Indonesia masih tertinggal dalam hal kekuatan dan ruang lingkup sistem persaingannya (2013).....	47
Gambar B.24: Kurangnya keterampilan yang tepat dan memadai, khususnya untuk manajer .....	48
Gambar B.25: Keandalan pasokan listrik perlu ditingkatkan demi kepentingan perusahaan-perusahaan Indonesia.....	49
Gambar B.26: FTA mungkin bisa menjadi keuntungan bagi perekonomian Indonesia .....	51
Gambar B.27: Penghapusan batas ekuitas asing dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor .....	52
Gambar B.28: Indonesia belum memanfaatkan tenaga terampil asing untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja domestik .....	52
Gambar B.29: Menurunkan subsidi BMM dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan.....	53

## LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil .....	58
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB konsumsi.....	58
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi .....	58
Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor .....	58
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen .....	58
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI.....	58
Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran.....	59
Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran: neraca berjalan.....	59
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang .....	59
Lampiran Gambar 10: Impor barang.....	59
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus modal.....	59
Lampiran Gambar 12: Inflasi IHK .....	59
Lampiran Gambar 13: Rincian inflasi IHK bulanan .....	60
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi IHK beberapa negara.....	60
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional.....	60
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran .....	60
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional .....	60
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS.....	60
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal .....	61
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global.....	61
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito .....	61
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan.....	61
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah .....	61
Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri .....	61

## TABEL

Tabel ES.1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2018 oleh karena adanya permintaan dalam negeri yang lebih tinggi.....	2
Tabel A.1: Neraca Pembayaran Indonesia .....	13
Tabel A.2: Komponen utama dari indeks harga konsumen .....	18
Tabel A.3: Indikator ekonomi utama .....	26
Tabel A.4: Proyeksi anggaran Kementerian Keuangan dan Bank Dunia .....	29

## LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel 1: Realisasi anggaran belanja Pemerintah.....	62
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran.....	62
Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia.....	63
Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia.....	64

## KOTAK

Kotak A.1: Kondisi perekonomian global menurun di Triwulan ke-3.....	7
Kotak A.2: Kisah dua kelompok komoditas .....	12
Kotak B.1: Agenda reformasi kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan investasi .....	31
Kotak B.2: Mengapa restriksi perdagangan dan investasi tidak membantu pengembangan industri hortikultura dan elektronik di Indonesia.....	45

## Ringkasan Eksekutif: Memperkuat daya saing

Setelah mengalami arus keluar modal, depresiasi mata uang, naiknya imbal hasil obligasi pemerintah dan meningkatnya tekanan dari harga BBM selama 10 bulan pertama 2018, kondisi ekonomi Indonesia di bulan November berubah: harga minyak global turun dan arus modal yang masuk kembali, menyebabkan apresiasi mata uang dan imbal hasil obligasi yang lebih rendah. Namun demikian, dinamika global dan dalam negeri yang terjadi selama 10 bulan pertama tahun 2018 sebagian besar masih tetap ada, dan edisi Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia kali ini menyoroti pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan ekspor dan FDI (*Foreign Direct Investment*, Penanaman Modal Asing), yang akan memperkuat posisi eksternal Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima triwulan terakhir ini didorong oleh investasi, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur. Pada triwulan ketiga tahun 2018, pertumbuhan PDB secara umum tetap stabil sebesar 5,2 persen tahun-ke-tahun (*year-on-year, yoy*)<sup>1</sup>, didorong oleh permintaan dalam negeri. Meningkatnya pembentukan modal tetap bruto didukung oleh pulihnya investasi di sektor konstruksi. Sementara konsumsi swasta sedikit menurun, lonjakan konsumsi pemerintah menjaga pertumbuhan konsumsi secara total tetap terjaga (Gambar ES.1). Oleh karena investasi peralatan tetap tinggi, pertumbuhan nilai impor hampir dua kali lipat dari besarnya pertumbuhan ekspor. Dengan demikian, ekspor neto terus membebani pertumbuhan, meskipun ekspor meningkat selama delapan triwulan secara berturut-turut. Di sisi produksi, pertumbuhan meningkat di sebagian besar sektor, kecuali untuk sektor pertanian dan utilitas. Akibatnya, pertumbuhan nilai tambah bruto sedikit meningkat menjadi 5,1 persen *yoy* dari 5 persen di Triwulan ke-2 (Gambar ES.2).

Harga minyak mentah yang tinggi sampai dengan bulan Oktober dan pertumbuhan investasi peralatan yang terus meningkat menghilangkan dampak positif dari adanya sedikit peningkatan dalam neraca penerimaan karena adanya depresiasi nilai mata uang dan menyebabkan melebarnya defisit neraca transaksi berjalan menjadi 2,7 persen dari PDB di Triwulan ke-3 dari 2,3 persen di Triwulan ke-2<sup>2</sup> (Gambar ES.3). Investasi asing langsung bersih mencapai 3,3 miliar dolar AS pada triwulan ketiga, tetapi ini masih lebih kecil dari setengah defisit transaksi berjalan. Secara keseluruhan, dengan surplus neraca keuangan dan modal yang lebih kecil, defisit neraca pembayaran meningkat menjadi 4,4 miliar dolar AS<sup>3</sup>, yang mengakibatkan cadangan devisa turun menjadi

114,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan ketiga. Cadangan cukup untuk membiayai pembayaran utang luar negeri pemerintah dan impor selama 6,3 bulan<sup>4</sup>.

Arus modal masuk yang terbatas karena kebijakan moneter yang lebih ketat di negara-negara maju serta ketidakpastian yang lebih besar terkait kebijakan perdagangan global (arus masuk obligasi berada pada tingkat yang terendah dalam tujuh tahun), ditambah dengan defisit neraca transaksi berjalan yang melebar, menyebabkan Rupiah terdepresiasi hingga bulan Oktober, dengan nilai mata uang yang mencapai titik terendah sebesar Rp 15.237 per USD pada tanggal 30 Oktober. Sepanjang tahun ini sampai dengan bulan September, mata uang terdepresiasi sebesar 8,2 persen secara nominal dan secara efektif riil sebesar 7,6 persen (Gambar ES.4).

Meskipun harga minyak tinggi di Triwulan ke-3, inflasi IHK turun dari rata-rata 3,3 persen *yoy* di Triwulan ke-2 menjadi rata-rata 3,1 persen di Triwulan ke-3 (Gambar ES.5). Inflasi IHK yang lebih rendah ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya inflasi harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*), karena adanya efek dasar (*base effect*) yang tinggi dari kenaikan tarif listrik tahun lalu.

Meskipun inflasi berada pada tingkat yang terendah dalam dua tahun ini, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali di Triwulan ke-3 dan sekali di bulan November, masing-masing sebesar 25 basis poin. Pengetatan kebijakan merupakan respon terhadap kondisi eksternal dan mencerminkan fokus Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun pasar keuangan global bergejolak, ketahanan ekonomi makro secara keseluruhan telah dipertahankan, sebagian besar karena fundamental ekonomi makro yang sehat dan kerangka respon kebijakan yang terkoordinasi.

Posisi fiskal Pemerintah juga mencerminkan prioritas stabilitas. Baik total penerimaan maupun belanja Pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang tinggi hingga bulan Oktober, tetapi hasil bersihnya adalah defisit anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 (Gambar ES.6), yang menurunkan kebutuhan pembiayaan dan tekanan pada pasar obligasi. Pemungutan penerimaan yang lebih tinggi terutama didorong oleh pajak penghasilan non-migas, penerimaan terkait migas dan pajak pertambahan nilai (PPN) / pajak penjualan barang mewah (LGST), sementara pertumbuhan pengeluaran terutama

<sup>1</sup> Perkiraan konsensus untuk pertumbuhan PDB riil pada Triwulan ke-3 tahun 2018 adalah 5,1 persen.

<sup>2</sup> Dinyatakan sebagai jumlah bergulir selama empat triwulan. Sebagai pangsa dari PDB, defisit neraca transaksi berjalan adalah sebesar 3,4 persen dari PDB di Triwulan ke-3.

<sup>3</sup> Sebagai pangsa dari PDB, defisit neraca pembayaran adalah sebesar 1,7 persen dari PDB pada Triwulan ke-3.

<sup>4</sup> Bank Indonesia (15 Agustus 2018).

disebabkan oleh belanja pegawai, belanja barang dan subsidi energi yang lebih tinggi. Sinyal APBN 2019 memproyeksikan defisit anggaran yang lebih rendah sebesar 1,8 persen dari PDB pada tahun 2019, yang didukung oleh peningkatan penerimaan yang cukup besar. Konsolidasi fiskal yang diproyeksikan pada tahun 2019 akan semakin mengurangi kebutuhan pembiayaan.

Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan sebesar 5,2 persen *yoY* tahun ini dan pada tahun 2019, lebih tinggi dari tahun 2017 (Tabel ES.1). Ini disebabkan oleh karena permintaan dalam negeri yang lebih tinggi diperkirakan mampu mengimbangi hambatan dari sektor eksternal. Meskipun inflasi IHK diproyeksikan perlahan naik tahun depan, konsumsi swasta diperkirakan menguat karena peningkatan belanja sosial dan pasar tenaga kerja yang kuat. Pembentukan modal tetap bruto juga diperkirakan akan tetap kuat, karena perusahaan-perusahaan yang saat ini menahan diri untuk investasi, karena adanya pemilihan umum, akan membuat komitmen-komitmen baru. Demikian juga, konsumsi Pemerintah diperkirakan akan tetap tinggi seiring dengan berlanjutnya reformasi dan pertumbuhan penerimaan yang menciptakan ruang untuk konsolidasi fiskal dan belanja tambahan.

**Tabel ES.1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2018 oleh karena adanya permintaan dalam negeri yang lebih tinggi**

		2017	2018f	2019f
<b>PDB Riil</b>	(Perubahan persentase tahunan)	5,1	5,2	5,2
<b>Indeks harga konsumen</b>	(Perubahan persentase tahunan)	3,8	3,2	3,5
<b>Neraca transaksi berjalan</b>	(Persen PDB)	-1,7	-2,9	-2,5
<b>Saldo anggaran pemerintah</b>	(Persen PDB)	-2,5	-2,1	-1,8

Sumber: BI; Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: 2017 adalah hasil aktual; p adalah perkiraan Bank Dunia

Dengan adanya ketidakpastian saat ini dalam kebijakan perdagangan global, pertumbuhan dari negara-negara mitra dagang utama yang diproyeksikan akan melambat, nilai tukar perdagangan (ToT, *terms-of-trade*) yang lebih lemah, dan tingginya investasi dalam negeri yang terus mendorong kebutuhan impor yang tinggi, defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan melebar menjadi 2,9 persen dari PDB pada tahun 2018, meskipun dampak pelemahan mata uang terhadap impor dan terutama terhadap neraca penerimaan menurun. Dampak tersebut diperkirakan akan dirasakan lebih kuat pada tahun 2019, ketika defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan menurun menjadi 2,5 persen PDB<sup>5</sup>.

Risiko negatif terhadap prospek pertumbuhan Indonesia tetap besar. Ketegangan perdagangan global, khususnya antara Amerika Serikat dan Cina, walaupun tampak telah mereda, tetapi dapat muncul kembali jika negosiasi yang sedang berlangsung tidak berhasil. Kemungkinan eskalasi lebih lanjut dari sengketa semacam itu tetap menimbulkan risiko yang signifikan bagi Indonesia melalui sektor eksternal yang lebih lemah dan harga-harga komoditas yang rendah. Pada saat yang sama, siklus pengetatan saat ini dari Bank Sentral AS terus meningkatkan risiko arus keluar modal dan gejala keuangan di antara negara-negara pasar berkembang, termasuk Indonesia.

Sampai saat ini, Indonesia masih dapat lolos dari dampak gejala global yang terjadi baru-baru ini yang mengganggu negara-negara pasar berkembang, terutama karena fundamental ekonomi makro yang sehat dan penyangga/*buffer* yang memadai, yang memungkinkan koordinasi kerangka kebijakan moneter, fiskal dan nilai tukar yang baik. Penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ada saat ini untuk membangun kembali cadangan devisa guna mempertahankan penyangga yang cukup besar.

*Edisi Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia kali ini juga menyoroti pentingnya meningkatkan ekspor dan investasi langsung luar negeri untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia, dan lebih meningkatkan ketahanan eksternal, selain meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.*

Posisi neraca transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2018 memiliki keunggulan dari defisit neraca transaksi berjalan yang 'sehat': yang besarnya tidak sebesar periode sebelumnya dan tidak sebesar dengan negara-negara lain, selain itu, defisit ini juga didorong oleh investasi daripada konsumsi. Namun demikian, ketergantungan Indonesia pada aliran modal portofolio yang bergejolak untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalannya telah memperkuat dampak dari gejala global baru-baru ini di pasar keuangan Indonesia. Ketika arus portofolio surut yang tidak disebabkan oleh adanya kesalahan Indonesia, nilai Rupiah terdepresiasi, dan imbal hasil obligasi naik. Ketergantungan pada arus portofolio sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang lambat dan investasi asing langsung yang terbatas, yang telah mengalami kontraksi selama beberapa triwulan terakhir. Perkembangan ini juga ditambah oleh penurunan pangsa dalam manufaktur global dan ekspor jasa komersial, tingkat FDI yang rendah dalam PDB dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Indonesia dapat bertumbuh lebih cepat, menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik serta meningkatkan posisi neraca transaksi berjalan dan pembiayaannya, dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor

<sup>5</sup> Meskipun baru-baru ini terapresiasi, nilai Rupiah masih 3,9 persen lebih lemah untuk tahun ini per 30 November (lihat Bagian A.5).

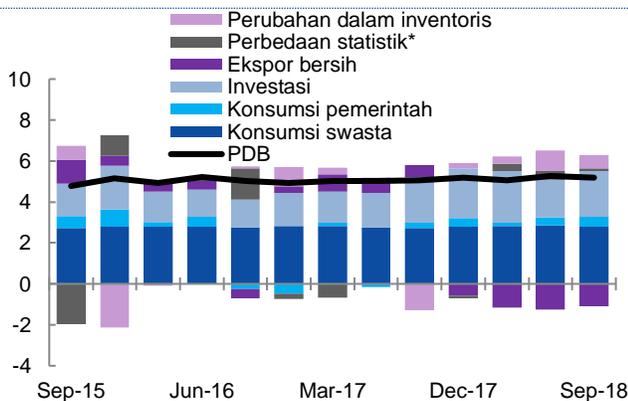
dan menarik lebih banyak dana *savings pool* global. *Savings pool* adalah sistem di mana individu-individu menggabungkan simpanan mereka ke dalam kumpulan dana yang lebih besar, yang dapat memberi manfaat yang sama bagi masing-masing individu. Anggota menyimpan dana ke dalam kumpulan dana tersebut, dan kemudian secara bergantian mengakses kumpulan dana tersebut. Negara-negara seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia telah berhasil mengintegrasikan diri ke dalam rantai nilai global dan menarik investasi produksi yang melakukan relokasi keluar dari Cina.

Agenda kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan investasi – dan yang akan menjadikan Indonesia lebih kompetitif secara global – memerlukan kondisi investasi yang lebih bisa membuka diri terhadap perdagangan, investasi dan tenaga kerja dari pasar global. Ini termasuk: (i) penurunan hambatan impor, termasuk hambatan tarif dan hambatan non-tarif

(tertentu), yang menaikkan harga kepada konsumen dan perusahaan, sehingga mereka kurang kompetitif; (ii) pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas yang ambisius, yang dapat menjadi katalis bagi reformasi kebijakan dan meningkatkan akses pasar untuk produk-produk Indonesia di luar negeri; (iii) pengurangan pembatasan yang signifikan bagi investor asing, yang membatasi investasi dan persaingan yang merugikan daya saing sektor yang dilindungi; (iv) penurunan persyaratan bagi masuknya mereka yang memiliki keterampilan yang langka dari luar negeri untuk secara sementara mengisi kesenjangan keterampilan di dalam negeri, sejalan dengan pengalaman negara-negara lain di kawasan. Langkah-langkah ini, bersama dengan penurunan kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia, tidak hanya akan memperkuat posisi eksternal, tetapi akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendukung percepatan pertumbuhan dalam dekade mendatang.

**Gambar ES.1: Pertumbuhan PDB sedikit menurun di Triwulan ke-3**

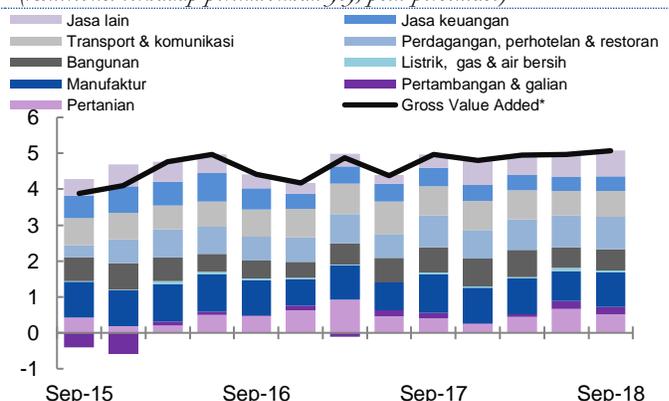
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar ES.2: Pertumbuhan sektor manufaktur mengimbangi dampak penurunan pertumbuhan di sektor pertanian**

(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

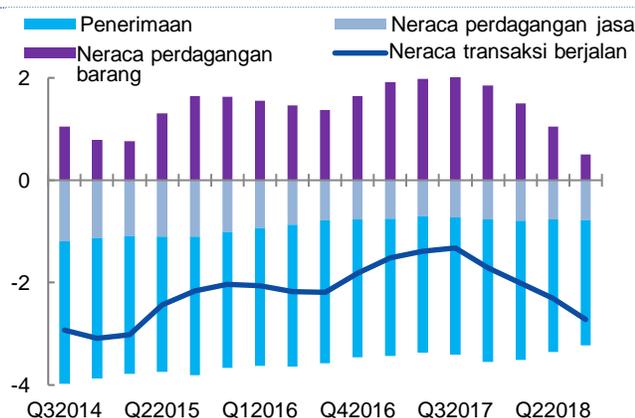


Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Lihat Gambar A.9

**Gambar ES.3: Defisit neraca perdagangan barang menyebabkan memburuknya neraca transaksi berjalan**

(jumlah bergulir sepanjang empat triwulan, persen dari PDB)



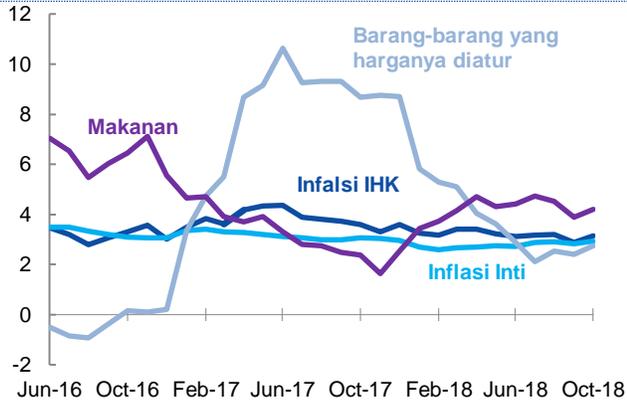
**Gambar ES.4: Rupiah terus terdepresiasi terhadap dolar AS di Triwulan ke-3, sebelum pulih kembali di Triwulan ke-4**

(indeks, Jan 1 2018 = 100)



Sumber: CIEC, Perhitungan staf Bank Dunia

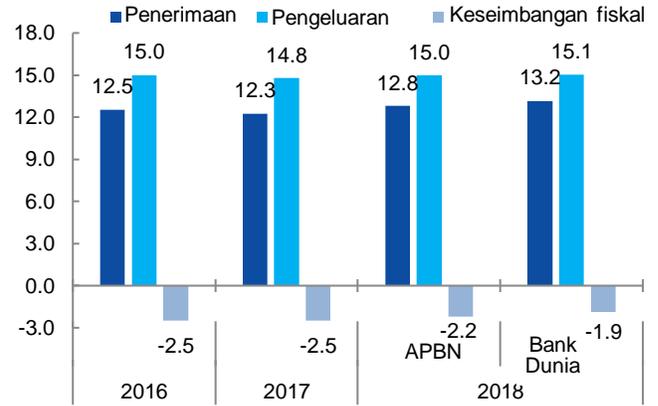
**Gambar ES.5: Inflasi IHK menurun di Triwulan ke-3 meskipun harga minyak lebih tinggi**  
(perubahan yoy, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Lihat Gambar A.19

Sumber: JP Morgan, BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar ES.6: Penerimaan dan pengeluaran yang lebih baik dengan hasil bersih dari defisit anggaran Pemerintah yang lebih rendah yang diproyeksikan untuk tahun 2018**  
(persen dari PDB)



Sumber: Ministry of Finance; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Lihat Gambar A.35

## A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



### 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit menurun pada Triwulan ke-3 tahun 2018

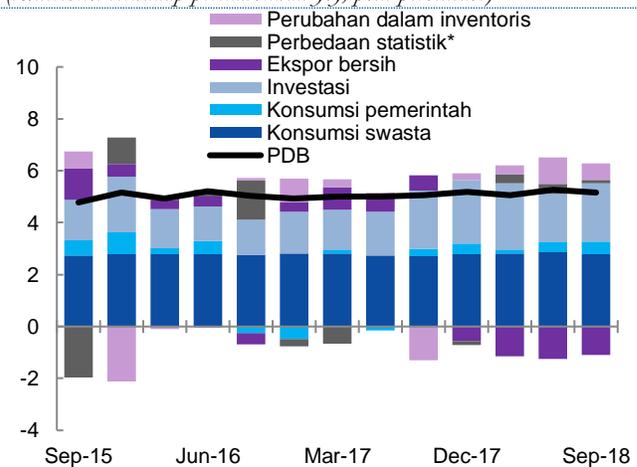
Pertumbuhan PDB riil adalah sebesar 5,2 persen pada Triwulan ke-3 tahun 2018, sedikit lebih rendah dari 5,3 persen yang tercatat di Triwulan ke-2

Perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 5,2 persen tahun ke tahun (yoy, year-on-year) pada Triwulan ke-3 tahun 2018, sedikit lebih rendah dari 5,3 persen pada Triwulan ke-2 tahun 2018, tetapi sedikit di atas perkiraan konsensus sebesar 5,1 persen. Pertumbuhan PDB yang sedikit menurun ini sebagian disebabkan oleh akumulasi persediaan yang lebih lambat serta menurunnya pertumbuhan konsumsi swasta (Gambar A.1). Konsumsi pemerintah terus menjaga pertumbuhannya yang pesat, yang terlihat pada Triwulan ke-2 dan terus meningkat di Triwulan ke-3. Seperti pada

Triwulan ke-2, pertumbuhan impor hampir dua kali lipat dari pertumbuhan ekspor, yang sebagian mencerminkan pulihnya pertumbuhan investasi setelah mengalami perlambatan yang hanya sekali saja terjadi di Triwulan ke-2. Seperti halnya dalam tiga triwulan sebelumnya, ekspor bersih terus membebani laju pertumbuhan, meskipun permintaan dalam negeri tinggi. Di sisi produksi, pertumbuhan di Triwulan ke-3 melampaui pertumbuhan di Triwulan ke-2 untuk sebagian besar sektor, kecuali untuk sektor pertanian dan utilitas.

Gambar A.1: Pertumbuhan PDB menurun sedikit di Triwulan ke-3

(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



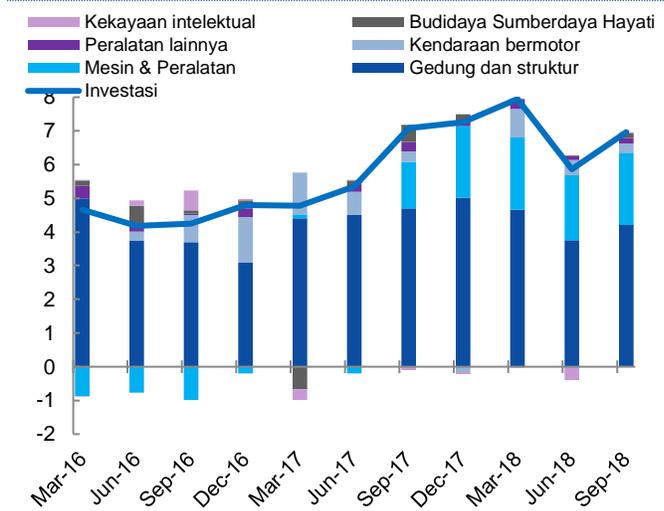
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Pertumbuhan investasi tetap pulih kembali di Triwulan ke-3**

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto pulih kembali hingga sebesar 7,0 persen di Triwulan ke-3, dari pelambatan yang satu kali terjadi di Triwulan ke-2 sebesar 5,9 persen (Gambar A.2). Pelambatan sementara yang terjadi di triwulan sebelumnya adalah karena jumlah hari kerja yang lebih sedikit tahun ini, oleh karena periode perayaan hari besar Umat Islam jatuh seluruhnya di Triwulan ke-2, dibandingkan dengan tahun 2017, ketika periode perayaan hari besar tersebut tersebar di antara Triwulan ke-2 dan Triwulan ke-3. Pemulihan tersebut juga bertepatan dengan meningkatnya impor barang modal secara nominal di Triwulan ke-3 sebesar 22,5 persen yoy, serta peningkatan tajam dalam pertumbuhan kredit investasi (lihat Bagian 5). Peningkatan aktivitas di sektor bangunan gedung dan struktur berkontribusi pada percepatan pertumbuhan investasi. Dalam hal kontribusi terhadap pertumbuhan, kontribusi investasi di sektor bangunan gedung dan struktur meningkat dari 3,8 poin persentase (pp) di Triwulan ke-2 menjadi 4,2 pp di Triwulan ke-3. Kontribusi dari investasi kendaraan bermotor berkurang untuk dua triwulan berturut-turut dari 0,5 pp menjadi 0,3 pp.

**Gambar A.2: Pertumbuhan investasi meningkat karena meningkatnya pertumbuhan investasi di sektor bangunan gedung dan struktur**

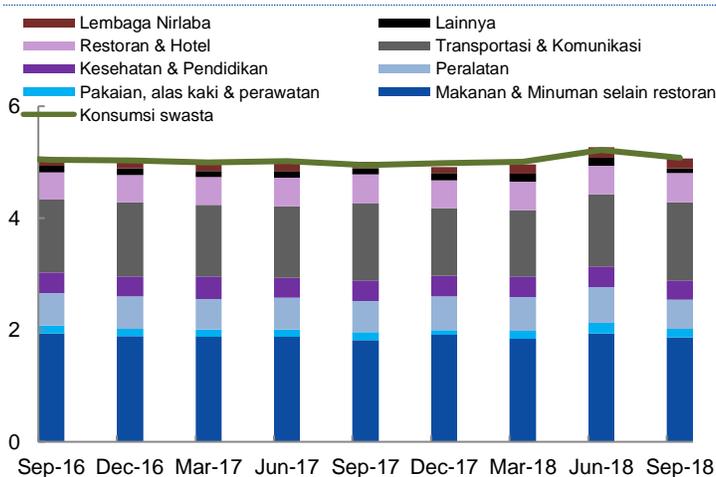
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar A.3: Pertumbuhan konsumsi swasta menurun karena menurunnya konsumsi di sektor peralatan serta kesehatan dan pendidikan**

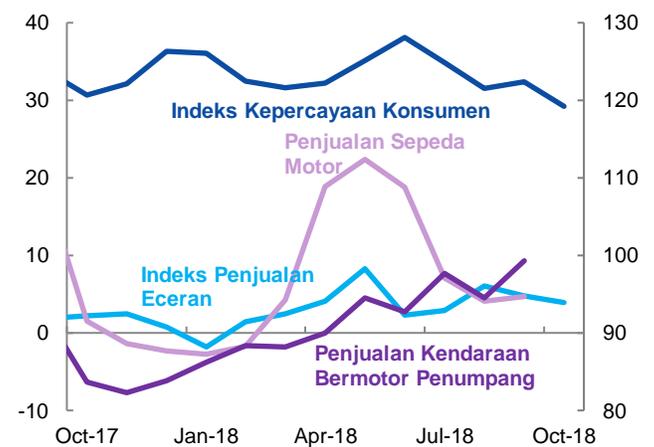
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar A.4: Sebagian besar indikator yang paling sering terkait dengan konsumsi swasta menurun di Triwulan ke-3**

(yoy, persen/3mma yoy, persen, Seb. Kiri; indeks kepuasan konsumen; Seb. Kanan)



Sumber: Bank Indonesia, CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Indeks penjualan ritel dalam persentase yoy persen; penjualan kendaraan bermotor dalam rata-rata pergerakan selama 3 bulan (mma, month moving average) persen yoy.

**Pertumbuhan konsumsi swasta menurun menjadi 5,1 persen karena hilangnya stimulus yang ada di masa hari raya di Triwulan ke-2**

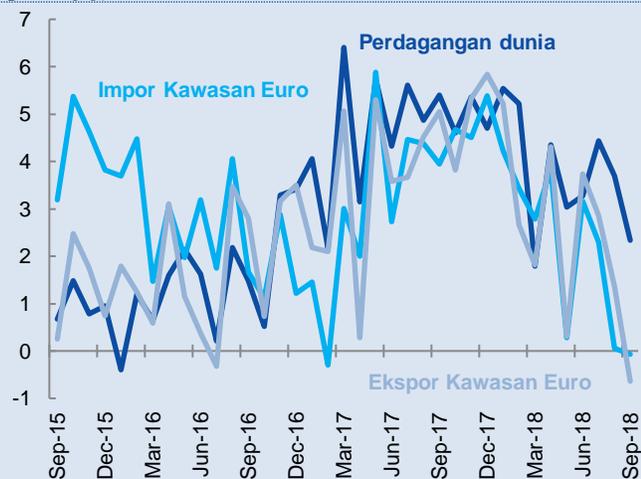
Meskipun terjadi sedikit penurunan dalam inflasi IHK (lihat Bagian A.4), pertumbuhan konsumsi swasta menurun menjadi 5,1 persen di Triwulan ke-3 dari 5,2 persen oleh karena adanya sedikit penurunan dalam konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan konsumsi lembaga-lembaga nirlaba. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menurun menjadi 4,9 persen (dari 5,0 persen pada Triwulan ke-2) yang disebabkan oleh hilangnya belanja di musim hari raya di Triwulan ke-2. Dalam kategori rumah tangga (Gambar A.3), kontribusi terhadap pertumbuhan dari konsumsi peralatan serta kesehatan dan pendidikan, menurun. Sementara itu, konsumsi makanan dan minuman, serta transportasi dan komunikasi memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan. Konsumsi restoran dan perhotelan serta transportasi dan komunikasi meningkat paling cepat. Sejalan dengan sedikit penurunan dalam pertumbuhan konsumsi, indikator yang paling sering dikaitkan dengan konsumsi, seperti indeks kepercayaan konsumen, penjualan sepeda motor dan penjualan ritel menurun di Triwulan ke-3 (Gambar A.4). Mengingat kekhawatiran mengenai konsumsi selama beberapa tahun terakhir ini, perlu dicatat bahwa meskipun terjadi penurunan dalam pertumbuhan konsumsi swasta, pertumbuhan tetap berada di atas tingkat pertumbuhan rata-rata selama empat tahun terakhir ini.

**Kotak A.1: Kondisi perekonomian global menurun di Triwulan ke-3**

Kondisi perekonomian global menurun di Triwulan ke-3. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang lebih lambat di kawasan euro dan Cina. Pertumbuhan PDB di kawasan euro menurun menjadi 1,7 persen *yoy* dari 2,2 persen di Triwulan ke-2, sebagian disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lemah di Italia, sementara kenaikan inflasi berkontribusi pada menurunnya pertumbuhan konsumsi. Sesuai dengan perkiraan, menurunnya pertumbuhan perekonomian Cina berlanjut pada kecepatan yang terukur, dengan pertumbuhan PDB sebesar 6,5 persen pada Triwulan ke-3, turun dari 6,7 persen di Triwulan ke-2. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya investasi dan produksi industri, serta terjadinya *deleveraging* keuangan (*upaya untuk menurunkan rasio hutang terhadap ekuitas – pent.*) yang sedang berlangsung sebagai upaya Pemerintah Cina untuk meningkatkan kualitas utang dalam negeri.<sup>1</sup> Sebaliknya, perekonomian AS, yang didukung oleh stimulus fiskal, meningkat pesat dan meningkat sebesar 3 persen di Triwulan ke-3.

**Gambar A.5: Pertumbuhan perdagangan global menurun**

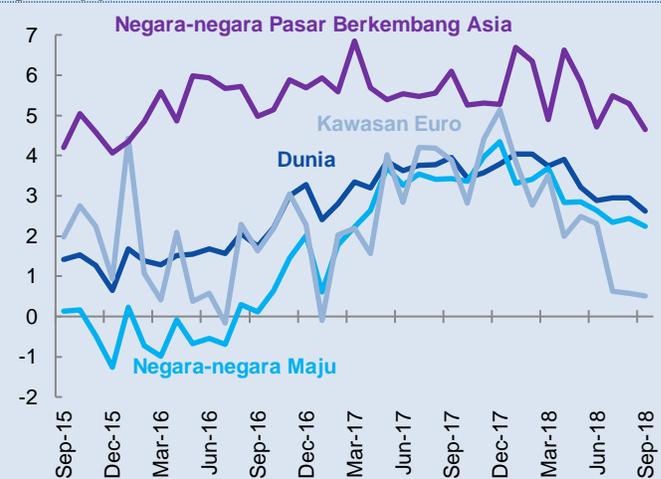
...  
(persen, *yoy*)



Sumber: CBP World Trade Monitor, perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar A.6: ... sebagaimana halnya dengan produksi industri**

(persen, *yoy*)



Sumber: CBP World Trade Monitor, perhitungan staf Bank Dunia

Indikator dengan frekuensi yang lebih tinggi dari kegiatan ekonomi global memberi gambaran beragam di awal Triwulan ke-3, dengan pertumbuhan perdagangan global yang tetap tinggi sebesar 3,5 persen, meskipun adanya pembatasan perdagangan terkait dengan meningkatnya proteksionisme yang mulai berlaku (Gambar A.5). Namun demikian, pertumbuhan perdagangan di antara negara-negara pasar berkembang secara substansial lebih tinggi daripada di antara negara-negara maju di Triwulan ke-3<sup>2</sup>. Perekonomian kawasan euro adalah penyebab utama hambatan pada pertumbuhan perdagangan negara-negara maju karena tarif yang dikenakan AS pada baja dan aluminium mulai berlaku. Pertumbuhan ekspor dan impor kawasan euro menurun ke tingkat yang terendah dalam lima dan enam triwulan, masing-masing.

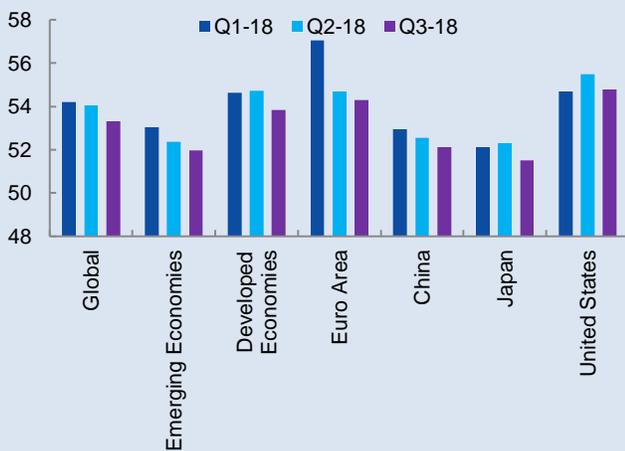
Sementara itu, pertumbuhan produksi industri global menurun menjadi 2,8 persen di Triwulan ke-3, paling rendah sejak Triwulan ke-1 tahun 2017, dibandingkan dengan rata-rata 3,3 persen di Triwulan ke-2 (Gambar A.6). Meskipun pertumbuhan produksi industri di Amerika Serikat mencatat hasil yang tertinggi sejak tahun 2011, produksi industri di negara-negara maju juga menurun. Pertumbuhan produksi industri di negara-negara pasar berkembang menurun menjadi 3,3 persen di Triwulan ke-3, dibandingkan dengan 3,8 persen di Triwulan ke-2, sebagian besar disebabkan karena adanya kontraksi di kawasan Amerika Latin oleh karena adanya masalah ekonomi di Argentina.

Indikator lain dari kegiatan ekonomi, Indeks Manajer Pembelian Gabungan dari Markit (*Markit's Composite PMI*), mencatat adanya penurunan yang meluas di Triwulan ke-3 yang mencerminkan menurunnya kegiatan ekonomi sejalan dengan menurunnya pertumbuhan perdagangan global dan menurunnya produksi industri (Gambar A.7). Walaupun Indeks Manajer Pembelian Gabungan global (*composite global PMI*) masih berada di wilayah ekspansif (rata-rata sebesar 53,3 di Triwulan ke-3), namun turun ke titik yang terendah sejak akhir tahun 2016.

Bertolak-belakang dengan hasil perdagangan, di mana negara-negara pasar berkembang mengungguli negara-negara maju, Indeks Manajer Pembelian Gabungan negara-negara maju, meskipun menurun hingga mencapai rata-rata 53,8 di Triwulan ke-3 dari rata-rata 54,7 di Triwulan ke-2, lebih tinggi dari Indeks Manajer Pembelian Gabungan untuk negara-negara pasar berkembang yang menurun ke tingkat rata-rata 52 dibandingkan dengan 52,4 di Triwulan ke-2 dan 53 di Triwulan ke-1.

Dengan latar belakang menurunnya hasil pertumbuhan perekonomian global dan sinyal bauran yang berkaitan dengan indikator yang memiliki frekuensi lebih tinggi, pembuat kebijakan di seluruh dunia telah bereaksi dengan berbagai tingkat urgensi. Sebagaimana telah tercatat, peningkatan pesat dalam pertumbuhan PDB di Amerika Serikat telah didorong oleh kebijakan fiskal yang ekspansif. Untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekspor di tengah terjadinya ketegangan perdagangan, pemerintah Cina telah memberlakukan serangkaian langkah yang ditujukan untuk merangsang kegiatan ekonomi, mulai dari memotong rasio kebutuhan cadangan (mirip dengan melonggarkan persyaratan kredit), mengurangi pembatasan emisi (sebagai sarana untuk meningkatkan produksi dan investasi) dan memberlakukan pemotongan pajak. Sejauh ini, kebijakan-kebijakan tersebut tampaknya telah berhasil mencapai tujuannya (Lihat Bank Dunia, 2019).

**Gambar A.7: Pencapaian PMI di seluruh dunia menurun** (*pertumbuhan yoy, persen*)



Sumber: *Markit Economics, Haver*, perhitungan staf Bank Dunia  
 Catatan: Data yang terbaca di atas 50 mewakili ekspansi dan data di bawah 50 mewakili kontraksi

**Gambar A.8: Gejolak pasar keuangan global tidak sepenuhnya menghilang di Triwulan ke-3**

(*indeks, 1 Januari 2018 = 100*)



Sumber: *Bloomberg*; perhitungan staf Bank Dunia

Di tataran kebijakan moneter, Bank Sentral AS terus mengulangi komitmennya untuk menormalkan suku bunga sementara bank sentral di banyak negara pasar berkembang juga memperketat posisi kebijakan moneter mereka dalam upaya untuk mengelola gejolak aliran modal serta gejolak mata uang. Di kawasan euro, Bank Sentral Eropa telah menegaskan kembali komitmennya untuk mengakhiri pelonggaran secara kuantitatif, meskipun hasil kegiatan ekonomi yang masih suam-suam kuku dalam beberapa bulan terakhir. Bersamaan dengan Indonesia, banyak bank sentral di negara-negara pasar berkembang di Asia juga telah menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan signifikan dari gejolak nilai tukar ditambah dengan depresiasi dan yang diperparah oleh arus keluar modal<sup>3</sup>. Mengelola kondisi keuangan makro tetap menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan karena gejolak pasar ekuitas (sebagaimana diwakili oleh indeks VIX) dan gejolak pasar obligasi (sebagaimana diwakili oleh indeks MOVE - *Merrill Lynch Option Volatility Estimate*) tidak sepenuhnya hilang di Triwulan ke-3 setelah terjadinya masa yang penuh kegelisahan

di Triwulan ke-2. Awal Triwulan ke-4 terjadi gejolak yang signifikan dalam indeks VIX karena laba perusahaan yang lebih kecil dari yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google dan Amazon (Gambar A.8).

Tren kenaikan harga minyak berlanjut di Triwulan ke-3 meskipun permintaan global menurun karena kegiatan ekonomi yang menurun. Indeks harga minyak mentah Bank Dunia naik ke tingkat yang tertinggi sejak Desember 2014. Secara lebih luas, indeks harga energi Bank Dunia juga naik sebesar 41,4 yoy, mencapai tingkat yang tertinggi sejak Triwulan ke-4 2014. Sanksi AS<sup>4</sup> terhadap Iran yang diperbaharui, yang berlaku mulai tanggal 4 November, dapat memberi tekanan lebih lanjut pada harga energi<sup>5</sup>. Sebaliknya, harga non-energi (yang diukur dengan indeks harga non-energi Bank Dunia) turun 0,8 persen di Triwulan ke-3 terhadap peningkatan sebesar 8,7 persen di Triwulan ke-2.

<sup>1</sup> Bank Dunia (2019).

<sup>2</sup> Suatu dikotomi tampaknya muncul dengan adanya pertumbuhan perdagangan negara-negara maju yang di Triwulan ke-3 secara signifikan lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan perdagangan di negara-negara pasar berkembang. Pertumbuhan impor di negara-negara maju rata-rata sebesar 1,1 persen yoy dan pertumbuhan ekspor rata-rata sebesar 2,4 persen yoy. Sebaliknya, hasil perdagangan negara-negara pasar berkembang lebih positif dengan pertumbuhan impor melonjak ke rata-rata 7,6 persen di Triwulan ke-3, dan pertumbuhan ekspor melaju ke rata-rata 4,4 persen di Triwulan ke-3.

<sup>3</sup> Bank sentral India telah menaikkan tingkat suku bunga sebanyak dua kali sejak bulan Juni 2018 (dengan peningkatan total sebesar 50 basis poin), bank sentral Filipina dengan total 100 basis poin, dan Bank Indonesia dengan total 75 basis poin (lihat Bagian A.5).

<sup>4</sup> <https://www.businesstimes.com.sg/energy-commodities/oil-prices-fall-on-signs-of-rising-global-supply>

<sup>5</sup> Harga minyak global jatuh di bulan November, dengan harga minyak jenis Brent yang turun dari puncaknya sebesar USD 86 per barel pada tanggal 4 Oktober menjadi USD 58 pada tanggal 23 November (Lihat Bagian A.2).

### **Pertumbuhan konsumsi pemerintah melonjak di Triwulan ke-3 seiring dengan meningkatnya nominal belanja barang**

Pertumbuhan konsumsi Pemerintah riil meningkat menjadi 6,3 persen yoy dari 5,2 persen di Triwulan ke-2. Hasil di Triwulan ke-3 ini sebagian karena adanya peningkatan belanja barang secara nominal yang melonjak sebesar 26,3 persen yoy dibandingkan dengan 8,8 persen di Triwulan ke-2. Ini adalah laju pertumbuhan belanja barang yang tertinggi sejak Triwulan ke-1 tahun 2017 dan sebagian besar didorong oleh pengeluaran yang terkait dengan *Asian Games*. Belanja pegawai secara nominal juga meningkat menjadi 16,7 persen yoy dari 12,6 persen di Triwulan ke-2. Pertumbuhan belanja sosial secara signifikan melambat menjadi 4,3 persen yoy dibandingkan dengan 67,6 persen di Triwulan ke-2. Hal ini sudah diperkirakan sebelumnya mengingat bahwa capaian hasil di Triwulan ke-1 dan Triwulan ke-2 didorong terutama oleh peluncuran lebih awal dari Program Bantuan Sosial bersubsidi dari Pemerintah, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta peningkatan cakupan program Keluarga Harapan (PKH).

### **Ekspor bersih sekali lagi menjadi faktor pengurang bagi pertumbuhan**

Sejalan dengan perdagangan global yang lebih lambat, baik pertumbuhan ekspor maupun impor secara marjinal menurun di Triwulan ke-3, namun, impor masih bertumbuh hampir dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan ekspor, yang secara keseluruhan menyebabkan hambatan terhadap pertumbuhan PDB dari pertumbuhan ekspor neto. Pertumbuhan ekspor sedikit menurun menjadi 7,5 persen di Triwulan ke-3 dari 7,6 persen di Triwulan ke-2, sementara impor bertumbuh sebesar 14,1 persen, turun dari 15,3 persen di Triwulan ke-2. Pencapaian hasil pertumbuhan ekspor ini didorong oleh penurunan ekspor minyak dan gas (Migas) yang sebagian diimbangi oleh ekspor produk non-Migas yang lebih tinggi. Karena pengeluaran yang terkait dengan *Asian Games*, pertumbuhan ekspor jasa yang meningkat hampir dua kali lipat juga mencatat laju pertumbuhan yang tertinggi sejak Triwulan ke-4 tahun 2017. Pertumbuhan impor terus didorong oleh impor non-Migas, sementara impor produk-produk Migas menurun ke pertumbuhan yang paling rendah sejak Triwulan ke-3 2017, sebagian karena adanya keharusan untuk penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) yang dimulai pada 1 September<sup>6</sup>.

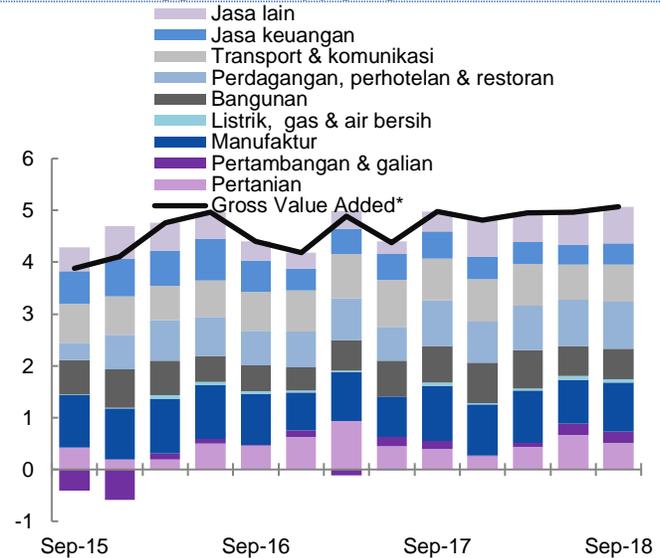
<sup>6</sup> <https://www.reuters.com/article/us-singapore-siew-indonesia/indonesia-imposes-mandatory-use-of-b20-biodiesel-in-drive-to-cut-fuel-bill-deputy-minister-idUSKCN1N5160>

Di sisi produksi, pertumbuhan di sebagian besar sektor meningkat dibandingkan dengan di Triwulan ke-2, kecuali untuk sektor pertanian dan utilitas

Dalam hal nilai tambah bruto, pertumbuhan sedikit meningkat dari 5,0 persen di Triwulan ke-2 menjadi 5,1 persen di Triwulan ke-3 (Gambar A.9). Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan ke-2, kecuali untuk sektor pertanian dan utilitas (Gambar A.9). Pertumbuhan sektor pertanian menurun menjadi 3,6 persen, sebagian karena adanya efek dasar (*base effect*, pengaruh perubahan harga konsumen dari bulan yang sama tahun sebelumnya pada perubahan dalam inflasi tahunan pada bulan yang sama tahun ini – pent.) dari panen yang melimpah ruah di tahun lalu dan penurunan produksi tanaman pangan dan komoditas, seperti minyak kelapa sawit dan karet tahun ini. Sektor manufaktur mencatat peningkatan aktivitas (4,3 persen *yoY* dibandingkan dengan 3,8 persen di Triwulan ke-2). Sektor pertambangan dan galian juga terus meningkat dengan pertumbuhan yang meningkat dari 2,6 persen di Triwulan ke-2 menjadi 2,7 persen di Triwulan ke-3, yang didukung oleh tingginya harga komoditas global. Meskipun mengalami peningkatan dalam kegiatan investasi, terutama di sektor bangunan gedung dan struktur, sektor konstruksi hanya sedikit meningkat menjadi 5,8 persen di Triwulan ke-3 dari 5,7 persen di Triwulan ke-2.

Gambar A.9: Pertumbuhan sektor manufaktur mengimbangi penurunan di sektor pertanian

(kontribusi terhadap pertumbuhan *yoY*, poin persentase)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Nilai Tambah bruto (*Gross Value Added*) berasal dari penjumlahan nilai tambah di sektor pertanian, industri dan jasa. Jika nilai tambah dari sektor-sektor ini dihitung pada nilai pembeli, nilai tambah bruto diperoleh dengan mengurangkan pajak tidak langsung neto dari PDB.

## 2. Harga komoditas yang terkait dengan energi terus mempertahankan peningkatannya

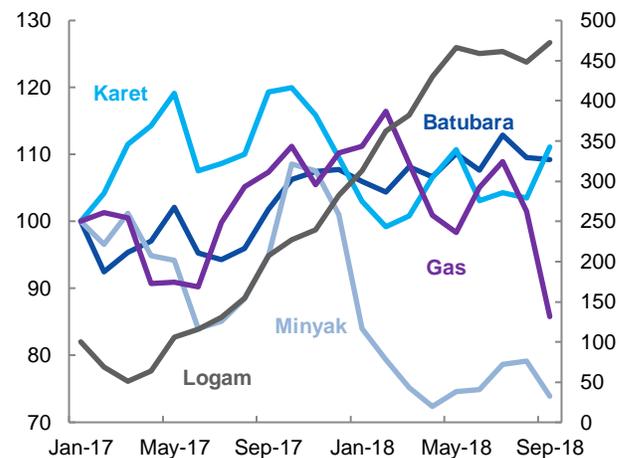
Harga komoditas utama mengikuti tren yang terjadi di triwulan-triwulan terakhir

Harga komoditas ekspor utama Indonesia di Triwulan ke-3 mengikuti tren yang teramati pada triwulan-triwulan sebelumnya. Harga batubara, minyak mentah, dan gas alam cair (LNG) naik, mencatatkan rata-rata pertumbuhan *yoY* sebesar 31,0 persen, hampir sama dengan di Triwulan ke-2. Di sisi lain, harga karet dan minyak kelapa sawit mentah (CPO) terus menurun sebesar 17,0 persen, melanjutkan tren penurunan yang terjadi sejak awal tahun. Harga logam dasar relatif stabil, mencatatkan penurunan sebesar hanya 2 persen (Lihat Kotak A.2).

Sebagian karena adanya peningkatan sebesar 100 juta ton dalam kuota ekspor batubara yang dimulai di bulan September tahun ini, ekspor batubara naik menjadi 7,3 persen *yy* di Triwulan ke-3, lebih lambat dari 12,9 persen di Triwulan ke-27. Ekspor logam dasar juga mencatat peningkatan sebesar 128,3 persen di Triwulan ke-3, lebih rendah dari pertumbuhan sebesar hampir 300 persen yang tercatat di triwulan kedua. Lonjakan ekspor mineral ini sebagian besar karena Pemerintah menghapus sebagian larangan ekspor terhadap mineral yang belum diolah pada tahun 2017, yang diberlakukan sejak tahun 2014<sup>8</sup>.

Di sisi lain, ekspor komoditas utama lainnya lebih lemah. Volume ekspor migas mencatatkan kontraksi *yy* sebesar 22,2 persen karena adanya pertukaran kepemilikan beberapa blok minyak yang menyebabkan perubahan tajam dalam jumlah yang dialokasikan untuk ekspor<sup>9</sup>. Secara volume, ekspor minyak (termasuk produk olahan) dan gas menurun dari 35,4 juta barel (mbbls) dan sekitar 300 juta British thermal unit (mmbtu) masing-masing di Triwulan ke-3 tahun 2017, menjadi 28,7 mbbls dan sekitar 267 mmbtu di Triwulan ke-3 2018. Volume karet yang diekspor mengalami kontraksi *yy* sebesar hampir 7 persen, sebagian disebabkan oleh permintaan komoditas yang melemah setelah terjadinya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (Gambar A.10).

**Gambar A.10: Rata-rata pergerakan selama tiga bulan dari ekspor komoditas utama Indonesia**  
(indeks volume ekspor, Januari 2016 = 100; indeks untuk logam di Seb. Kanan)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Data untuk CPO tidak tersedia. Volume ekspor logam dasar tidak disajikan karena adanya lonjakan yang signifikan teramati di tahun 2018.

<sup>7</sup> Dalam upaya untuk mempersempit defisit neraca transaksi berjalan, Pemerintah telah meningkatkan kuota ekspor batubara sebesar 100 juta ton yang mulai berlaku sejak bulan September 2018. Sementara industri hanya mampu memenuhi sekitar 25 persen dari kuota tambahan tersebut, total peningkatan volume ekspor masih kurang dari 25 juta ton karena sebagian dari produksi batubara tambahan dipergunakan untuk memenuhi Kewajiban Pasar Dalam Negeri (lihat <http://pubdocs.worldbank.org/en/823461540394173663/CMO-October-2018-Forecasts.pdf>). Selain itu, kemungkinan industri menanggapi kuota yang lebih tinggi ini dengan hati-hati dalam upaya untuk menghindari kelebihan pasokan pasar dan mempengaruhi harga secara negatif (lihat <https://www.montelnews.com/de/story/indonesia-cuts-november-coal-price-by-3/950238>)

<sup>8</sup> Indonesia mencabut larangan ekspor mineral non-olahan secara parsial di awal tahun 2017. Dengan demikian, negara terus meningkatkan volume ekspor mineralnya. Sebelumnya, sejak bulan Januari 2014, para penambang diharuskan untuk setidaknya memproses bijih besi dan konsentrat mereka sebelum izin untuk ekspor diberikan.

<sup>9</sup> Pemerintah baru-baru ini memberi izin kepada Pertamina untuk mengoperasikan 12 blok minyak yang sebelumnya dioperasikan sebagian oleh perusahaan minyak asing. Akibatnya, keluaran dari ladang-ladang tersebut sekarang diproses (dan kemudian dikonsumsi) di dalam negeri, sehingga mengurangi total ekspor minyak.

**Kotak A.2: Kisah dua kelompok komoditas**

Sejalan dengan tren yang dimulai di akhir Triwulan ke-1 2018, harga komoditas ekspor utama Indonesia terus bergerak dalam lintasan yang berbeda. Harga komoditas non-pertanian seperti batubara, minyak mentah, dan LNG mempertahankan tren kenaikan mereka. (Gambar A.11). Sebaliknya, ketersediaan yang cukup dan permintaan yang lemah terus membebani harga karet dan CPO.

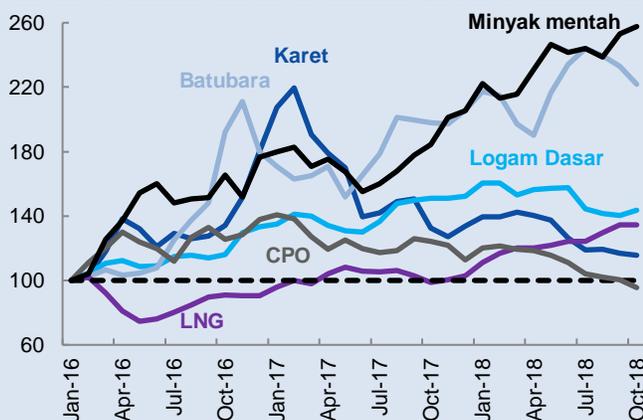
Harga batubara naik rata-rata sebesar 23,7 persen yoy di Triwulan ke-3, setelah terjadinya lonjakan sebesar 31,3 persen di Triwulan ke-2, yang didorong oleh lonjakan permintaan dari Cina dan India dalam persiapan untuk memenuhi permintaan listrik yang tinggi selama berlangsungnya musim dingin. Dengan demikian, pada bulan September 2018, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Cina mengurangi target penurunan polusi menjadi 3 persen dari 5 persen untuk periode Oktober 2018 hingga Maret 2019, membuka pintu bagi peningkatan yang cukup tinggi dalam penggunaan batubara untuk produksi listrik di provinsi bagian utara negara tersebut. Sementara itu, suasana yang menggairahkan untuk minyak mentah terus berlanjut karena harga mencapai tingkat yang tertinggi dalam empat tahun ini di akhir Triwulan ke-3, yang menyebabkan pertumbuhan sebesar 45,5 persen yoy, yang sebagian mencerminkan kekhawatiran pasokan oleh karena adanya sanksi yang dikenakan terhadap Iran. Namun demikian, peningkatan harga minyak mentah tersebut berbalik di pertengahan Triwulan ke-4 dengan jatuhnya harga minyak. Harga minyak Brent turun dari puncaknya sebesar USD 86 per barel pada tanggal 4 Oktober menjadi USD 58 pada tanggal 23 November. Salah satu alasan utama untuk pembalikan tersebut adalah karena AS memberi pengecualian untuk importir utama minyak (seperti India) untuk terus membeli minyak dari Iran. Selanjutnya, kegiatan ekonomi global menurun di Triwulan ke-3 dan meredakan tekanan permintaan yang menyebabkan tekanan tambahan pada harga. Sementara itu, LNG juga menikmati harga yang tinggi selama beberapa bulan di Triwulan ke-3, melonjak 23,5 persen, karena adanya peningkatan permintaan secara besar-besaran di Cina dan pulihnya permintaan di Korea Selatan.

Pada komoditas pertanian, harga karet terus melemah karena ketidakpastian kebijakan perdagangan global mengurangi sentimen pasar. Harga di Triwulan ke-3 menurun lebih lanjut sebesar 19,5 persen yoy setelah terjadi penurunan sebesar 17,2 persen di Triwulan ke-2, dan kemungkinan akan turun lebih lanjut karena pasokan yang mencukupi, oleh karena penyadapan di daerah-daerah penghasil utama telah dimulai. Di sisi lain, harga CPO turun lebih lanjut sebesar 15,2 persen, mengikuti jatuhnya harga minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai, minyak rapeseed (tumbuhan keluarga Brassica yang dibudidayakan untuk diambil minyak dari bijinya – pent.), dan minyak bunga matahari.

Ke depan, Bank Dunia (2018) memperkirakan harga karet dan CPO tetap berada di bawah tekanan. Harga batubara diproyeksikan stabil, sementara harga logam dasar diperkirakan akan sedikit naik. Harga rata-rata minyak pada tahun 2018 diperkirakan masih akan lebih tinggi dari tahun lalu, meskipun terjadi penurunan yang signifikan di bulan November 2018. (Gambar A.12).

**Gambar A.11: Harga komoditas non-pertanian terus meningkat, sementara komoditas pertanian tetap mendapat tekanan**

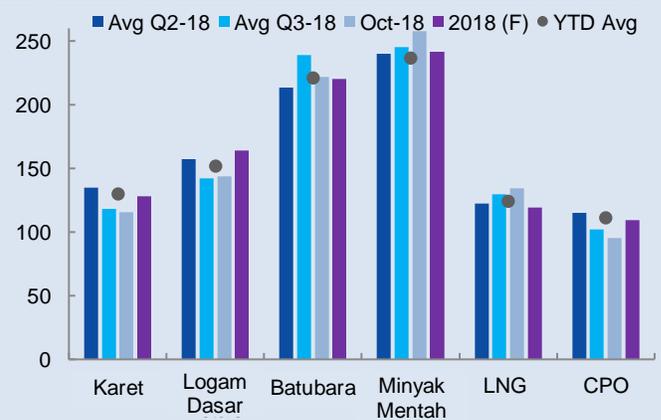
(indeks Januari 2016 = 100)



Sumber: Pink Sheet Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: LNG adalah singkatan dari Liquefied Natural Gas; CPO adalah singkatan dari Crude Palm Oil (Minyak Sawit mentah)

**Gambar A.12: Harga logam dasar di akhir tahun 2018 diperkirakan akan lebih tinggi dari rata-rata YTD**

(indeks Januari 2016 = 100)



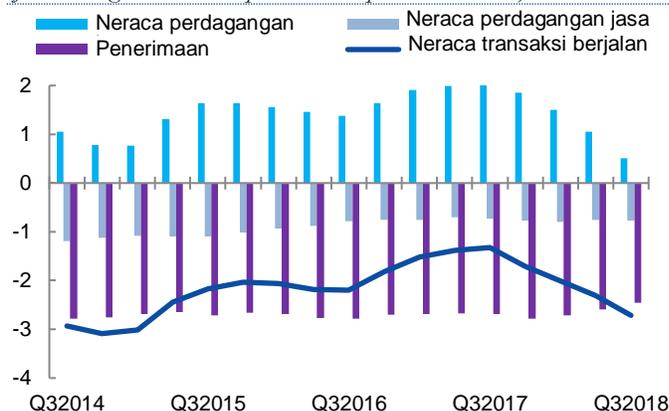
Sumber: CEIC, BPS; perhitungan staf Bank Dunia

### 3. Harga minyak mentah yang lebih tinggi menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan semakin melebar

**Defisit neraca transaksi berjalan melebar karena neraca perdagangan barang mengalami defisit, sementara perdagangan jasa meningkat**

Di tengah tingginya harga minyak mentah di Triwulan ke-3 dan berlanjutnya penguatan pertumbuhan investasi peralatan<sup>10</sup>, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia melebar menjadi 2,7 persen di Triwulan ke-3, lebih lebar daripada Triwulan ke-2 yakni 2,3 persen<sup>11</sup> (Gambar A.13). Secara triwulanan, defisit transaksi berjalan di Triwulan ke-3 mencapai 3,4 persen dari PDB, lebih besar daripada defisit sebesar 1,8 persen yang terjadi di Triwulan ke-3 tahun 2017 (Tabel A.1).

**Gambar A.13: Defisit neraca perdagangan barang menyebabkan melemahnya neraca transaksi berjalan**  
(jumlah bergulir selama empat triwulan, persen dari PDB)



Sumber: CEIC, Perhitungan staf Bank Dunia

Defisit neraca transaksi berjalan melebar pada neraca perdagangan barang yang berubah menjadi defisit dan defisit perdagangan jasa yang lebih besar. Secara keseluruhan, karena surplus pada neraca keuangan dan neraca modal tidak cukup untuk mengimbangi defisit pada neraca transaksi berjalan, neraca pembayaran mencatatkan defisit sebesar USD 4,4 miliar. Setelah tiga triwulan berturut-turut neraca pembayaran mengalami defisit, cadangan internasional BI turun menjadi 114,8 miliar dolar AS di akhir Triwulan ke-3, tetapi masih cukup untuk membiayai pembayaran utang luar negeri pemerintah dan impor selama 6,3 bulan<sup>12</sup>.

**Tabel A.1: Neraca Pembayaran Indonesia**

(miliar dolar AS kecuali dinyatakan lain)

	Q3-2017	Q4-2017	Q1-2018	Q2-2018	Q3-2018
Nominal PDB	262,9	257,9	258,2	263,9	262,5
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	5,4	1,0	(3,9)	(4,3)	(4,4)
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	2,0	0,4	(1,5)	(1,6)	(1,7)
<i>Sebagai persen dari PDB, jumlah bergulir selama empat triwulan</i>	1,5	1,1	0,3	(0,2)	(1,1)
Neraca Transaksi Berjalan	(4,6)	(6,0)	(5,5)	(8,0)	(8,9)
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	(1,8)	(2,3)	(2,1)	(3,0)	(3,4)
<i>Sebagai persen dari PDB, jumlah bergulir selama empat triwulan</i>	(1,3)	(1,7)	(2,0)	(2,3)	(2,7)
Neraca perdagangan barang	5,3	3,1	2,3	0,3	(0,4)
Neraca perdagangan jasa	(2,1)	(2,3)	(1,7)	(1,9)	(2,2)
Penerimaan	(7,8)	(6,6)	(6,3)	(6,4)	(6,2)
Neraca Modal dan Neraca Keuangan	10,2	(6,8)	2,3	4,5	4,2
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	3,9	2,7	0,7	1,7	1,6
<i>Sebagai persen dari PDB, jumlah bergulir selama empat triwulan</i>	3,0	2,9	2,4	2,3	1,7
Investasi Langsung	7,6	4,3	3,1	2,7	3,9
Investasi Portofolio	4,0	2,0	(1,2)	0,1	(0,1)
Investasi Lainnya	(1,4)	0,7	(0,2)	1,7	0,2

Sumber: Bank Indonesia; Perhitungan staf Bank Dunia

<sup>10</sup> Investasi peralatan memiliki kandungan impor yang tinggi, yang mendorong impor barang modal dan barang antara.

<sup>11</sup> Dinyatakan sebagai jumlah bergulir empat kuartal.

<sup>12</sup> Bank Indonesia (15 Agustus 2018).

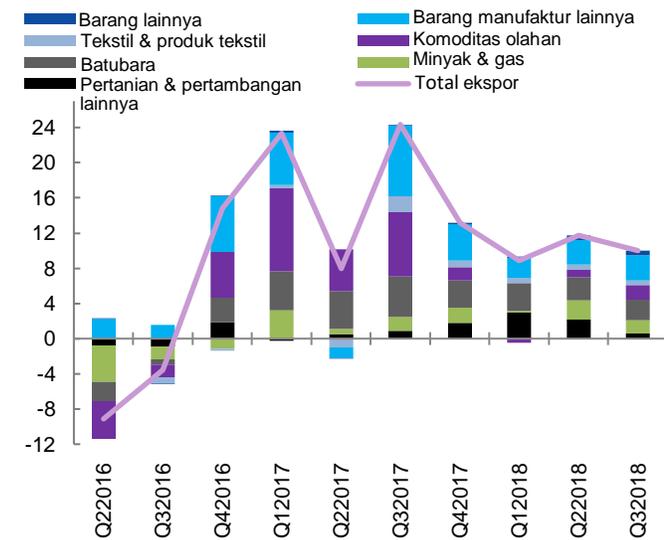
**Total impor tetap melebihi total ekspor...**

Peningkatan total impor barang dan jasa secara nominal tetap melebihi total ekspor selama empat triwulan berturut-turut. Total ekspor meningkat 10,7 persen *yoy* di Triwulan ke-3, lebih rendah dari peningkatan sebesar 22,6 persen yang tercatat pada triwulan yang sama tahun lalu, didorong oleh ekspor jasa. Di sisi lain, total impor naik menjadi 23,8 persen di Triwulan ke-3 dari 21,3 persen di Triwulan ke-3 tahun lalu.

**...didorong oleh peningkatan impor barang yang tinggi.**

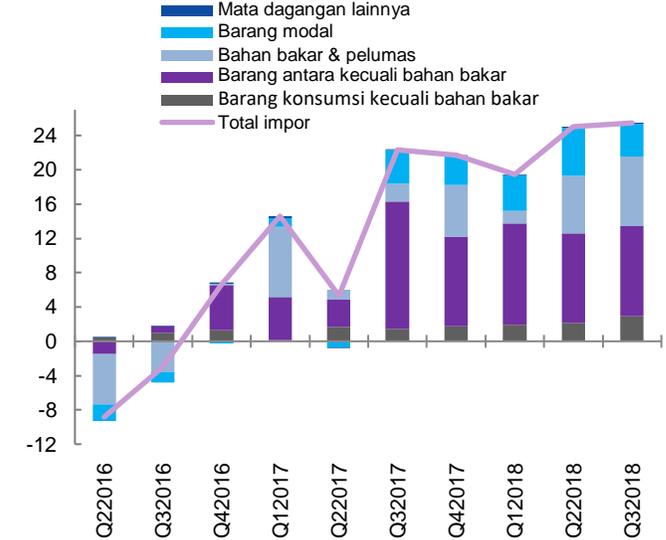
Pertumbuhan impor barang lebih dari dua kali lipat dibanding pertumbuhan ekspor di Triwulan ke-3. Impor barang meningkat sebesar 25,5 persen di Triwulan ke-3, dari 22,4 persen di Triwulan ke-3 tahun 2017, didorong oleh konsumsi dan investasi yang tinggi<sup>13</sup>. Sementara itu, peningkatan ekspor barang menurun secara substansial menjadi 10,0 persen di Triwulan ke-3 dari 24,3 persen di Triwulan ke-3 tahun 2017. Penurunan ekspor barang ini sebagian disebabkan oleh adanya efek dasar yang tinggi yang teramati di Triwulan ke-3 tahun 2017, serta menurunnya pertumbuhan global dan perdagangan global. Ini menyebabkan neraca perdagangan barang mengalami defisit untuk pertama kalinya sejak Triwulan ke-2 tahun 2014<sup>14</sup>.

**Gambar A.14: Pertumbuhan ekspor barang yang lebih rendah terjadi di setiap kategori**  
(kontribusi thd pertumbuhan *yoy*, persen)



Sumber: CEIC dan Bank Indonesia; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Kategori “barang manufaktur lainnya” termasuk kertas, bahan kertas, furnitur, plastik, makanan olahan, bahan kimia, dan barang “lainnya”

**Gambar A.15: Pertumbuhan impor barang terus melebihi ekspor, didorong oleh impor bahan bakar dan barang konsumsi.**  
(kontribusi thd pertumbuhan *yoy*, persen)



Sumber: CEIC dan Bank Indonesia; Perhitungan staf Bank Dunia

**Menurunnya pertumbuhan ekspor barang di Triwulan**

Dibandingkan dengan Triwulan ke-2 tahun 2018 dan Triwulan ke-3 tahun 2017, pertumbuhan ekspor barang *yoy* di Triwulan ke-3 tahun 2018 menurun di hampir semua kategori. Ekspor batubara<sup>15</sup>, produk manufaktur lainnya (termasuk kertas dan produk kertas dan makanan olahan), tekstil dan kendaraan bermotor, khususnya, mengalami pertumbuhan yang lebih rendah

<sup>13</sup> Impor barang meningkat 25,0 persen di Triwulan ke-2 tahun 2018, sedangkan ekspor meningkat 11,7 persen.

<sup>14</sup> Di Triwulan ke-2 tahun 2014, peningkatan impor barang relatif tinggi, didorong oleh permintaan yang lebih tinggi untuk barang konsumsi, baik untuk bulan puasa maupun hari raya Lebaran. Di sisi lain, peningkatan ekspor barang terhambat oleh permintaan yang lesu terhadap komoditas utama Indonesia, terutama batubara dan minyak kelapa sawit, serta keputusan pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor mineral yang belum diolah.

<sup>15</sup> Pengiriman batubara dilaporkan menurun khususnya untuk tujuan Cina karena negara tersebut mulai membatasi impor batubara dan preferensi untuk batubara berkalori tinggi (yang bukan sifat dari batubara Indonesia). Nilai ekspor batu bara juga disebabkan oleh harga batubara yang relatif lebih rendah pada akhir Triwulan ke-3, karena Pemerintah Indonesia meningkatkan kuota ekspornya sebesar 100 juta ton.

**ke-3 terjadi pada seluruh kategori...**

(Gambar A.14). Kontraksi berkelanjutan dari ekspor minyak kelapa sawit dan karet olahan berkontribusi terhadap turunnya kontribusi dari kategori komoditas olahan. Di sektor migas, meskipun produksi sedikit lebih rendah<sup>16</sup>, pertumbuhan ekspor relatif stabil sebesar 18 persen, serupa dengan di Triwulan ke-3 tahun 2017. Terlepas dari ekspor ke Amerika Serikat<sup>17</sup>, India<sup>18</sup>, Korea Selatan<sup>19</sup>, dan Vietnam<sup>20</sup>, ekspor ke sepuluh negara tujuan teratas lainnya mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan di Triwulan ke-2 tahun 2018.

**...sementara harga minyak yang lebih tinggi menopang pertumbuhan impor barang**

Impor barang terus meningkat lebih dari 20 persen *yoY* selama lima kuartal terakhir (Gambar A.15). Pendorong utamanya, impor bahan bakar dan barang konsumsi, tumbuh masing-masing sebesar 56,7 persen dan 36,0 persen *yoY*. Lonjakan harga bahan bakar dunia menjadi salah satu penyebab eskalasi<sup>21</sup> impor bahan bakar. Demikian pula, impor barang konsumsi meningkat lebih cepat dan mencapai pertumbuhan *yoY* tertinggi dalam enam tahun terakhir. Hal ini terlepas dari depresiasi Rupiah yang stabil, baik secara nominal maupun riil dan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pajak impor barang konsumsi<sup>22</sup>. Sementara itu, pertumbuhan impor barang modal menurun menjadi 22,7 persen, sedikit lebih rendah dari 24,1 persen di Triwulan ke-3 tahun 2017.

**Defisit neraca perdagangan jasa sedikit meningkat**

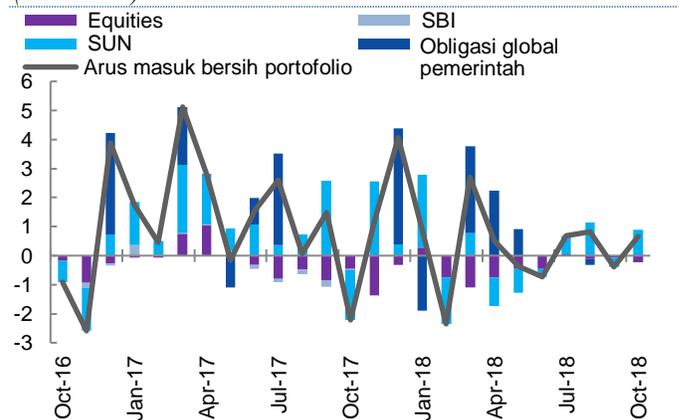
Defisit neraca perdagangan jasa meningkat menjadi 2,2 miliar dolar AS di Triwulan ke-3 tahun 2018, sedikit lebih tinggi dari defisit sebesar 1,9 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan impor jasa meningkat 13,3 persen di Triwulan ke-3, sejalan dengan impor barang yang lebih tinggi dan peningkatan permintaan jasa karena kegiatan ibadah haji. Defisit neraca perdagangan jasa yang lebih besar tertahan oleh ekspor jasa yang lebih tinggi karena jumlah wisatawan asing ke Indonesia meningkat selama berlangsungnya acara Asian Games yang diadakan di Jakarta dan Palembang.

**Surplus neraca keuangan relatif stabil**

Meskipun dilatarbelakangi oleh kondisi eksternal yang bergejolak, neraca keuangan dan modal mencatat surplus yang relatif stabil sebesar 4,2 miliar dolar AS (1,6 persen dari PDB) di Triwulan ke-3 dibanding 4,5 miliar dolar AS (1,7 persen dari PDB) di Triwulan ke-2, namun jauh di bawah 10,3 miliar dolar AS (3,9 persen dari PDB) yang tercatat di Triwulan ke-3 tahun lalu. Angka tersebut mencerminkan kenaikan pada arus masuk penanaman modal asing/PMA (FDI) menjadi 3,9 miliar dolar AS dari 2,7 miliar

**Gambar A.16: Neraca keuangan dan modal mengalami surplus yang stabil**

(USD miliar)



Sumber: CEIC; Bank Dunia; Perhitungan staf Bank Dunia

<sup>16</sup> Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengumumkan bahwa jumlah produksi (lifting) minyak dan gas di Triwulan ke-3 menurun sebesar 1,5 persen *qoq* (kuartal ke kuartal) dari 791 kbpd (kilo barel per hari) menjadi 780 kbpd sebagian karena penghentian operasi (*shutdown*) yang tidak direncanakan di dua lapangan utama di Plaju dan Dumai. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengungkapkan bahwa pertukaran/*swap* ladang minyak Mahakam yang sebelumnya dimiliki oleh Total ke Pertamina telah mempengaruhi sebagian angka ekspor. Di sisi lain, produksi gas meningkat, baik secara *qoq* (6,8 persen) maupun *yoY* (21,2 persen).

<sup>17</sup> Terutama didorong oleh ekspor tekstil dan alas kaki.

<sup>18</sup> Didorong oleh ekspor batubara, karet dan minyak kelapa sawit.

<sup>19</sup> Pendorong utamanya adalah ekspor logam non-mulia dan tembaga.

<sup>20</sup> Ekspor suku cadang kendaraan bermotor dan suku cadang peralatan listrik mendorong peningkatan.

<sup>21</sup> Harga minyak dan produk minyak olahan meningkat masing-masing sebesar 56,0 persen dan 45,2 persen *yoY*. Sementara itu, volume impor minyak dan produk minyak olahan masing-masing meningkat sebesar 3,2 persen dan 9,6 persen.

<sup>22</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4199347/pajak-impor-barang-konsumsi-naik-hingga-10-kapan-berlaku>

dolar AS di triwulan sebelumnya, sehingga keseimbangan dasar (jumlah neraca transaksi berjalan dan total FDI bersih) relatif tidak berubah, meskipun masih negatif.

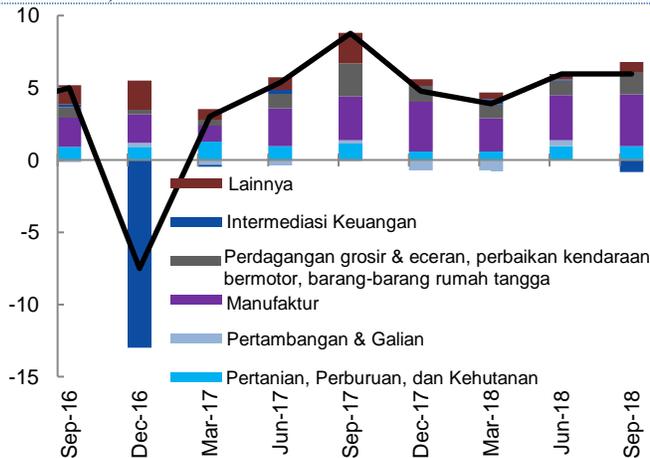
Aliran masuk portofolio bersih di Triwulan ke-3 mencapai 1,1 miliar dolar AS, lebih dari cukup untuk membalikkan 0,6 miliar dolar AS arus keluar modal di Triwulan ke-2, walaupun secara signifikan lebih rendah dari 4,2 miliar dolar AS yang masuk ke Indonesia di Triwulan ke-3 tahun lalu (Gambar A.16). Pemulihan ini didorong oleh berbaliknya arus modal dari pembelian obligasi berdenominasi Rupiah (SUN), bukti bahwa kepercayaan investor di Indonesia mulai pulih kembali di Triwulan ke-3. Tekanan di sisi ekuitas juga berkurang dengan arus keluar dari pasar ekuitas turun ke 0,1 miliar dolar AS di Triwulan ke-3 tahun 2018 dari 1,7 miliar dolar di triwulan sebelumnya. Arus keluar sektor swasta dari surat utang (*debt securities*) mencapai sekitar 1 miliar dolar AS versus arus masuk bersih sebesar 0,8 miliar dolar AS di Triwulan ke-2, konsisten dengan penurunan kepemilikan obligasi Pemerintah oleh pihak asing terutama pada bulan September, ketika situasi di Turki memburuk. Kondisi pasar obligasi ini telah stabil dan mulai mengalami peningkatan yang lebih berarti dalam beberapa minggu terakhir ini, yang sebagian mencerminkan valuasi yang menarik di tengah stabilitas yang mulai terjadi di pasar internasional (Lihat Bagian A.5).

**Investasi asing langsung bersih meningkat dari capaiannya di Triwulan ke-2**

Penanaman modal asing (FDI) bersih mencapai 3,9 miliar dolar AS di Triwulan ke-3, naik dari 2,7 miliar dolar AS di Triwulan ke-2 (Gambar A.17). Namun masih lebih rendah dari 7,4 miliar dolar AS yang tercatat di Triwulan ke-3 tahun 2017<sup>23</sup>. Sektor manufaktur, perdagangan grosir, pertanian, perikanan, serta sektor intermediasi keuangan adalah penerima utama arus investasi asing langsung di Triwulan ke-3<sup>24</sup>. Walaupun terjadi peningkatan nilai, meskipun sangat rendah<sup>25</sup>, investasi langsung bersih (investasi langsung di Indonesia dikurangi investasi langsung Indonesia di luar negeri) di Triwulan ke-3 belum cukup untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalan sejak Triwulan ke-1 tahun 2018 (Gambar A.18).

**Gambar A.17: FDI meningkat, sebagian besar di sektor manufaktur...**

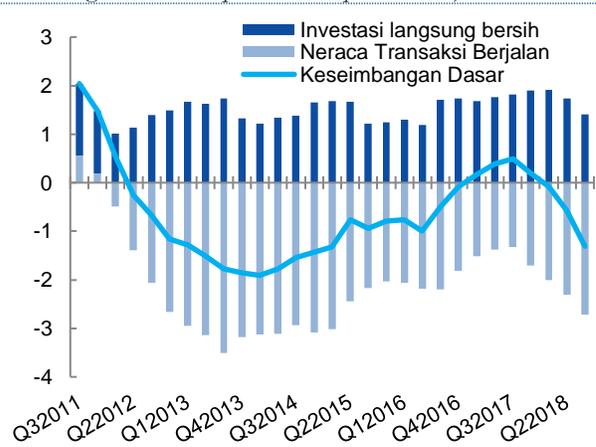
(USD miliar)



Sumber: CEIC dan Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar A.18: ... tetapi investasi langsung bersih belum cukup untuk menutup defisit neraca transaksi berjalan**

(jumlah bergulir selama empat triwulan, persen PDB)



Sumber: CEIC dan Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia

<sup>23</sup> Investasi langsung yang signifikan di Triwulan ke-3 tahun lalu terlihat masuk ke beberapa bisnis rintisan (*start-up*) ‘unicorn’ (bisnis rintisan *unicorn* adalah bisnis rintisan yang memiliki valuasi senilai USD 1 miliar atau lebih – pent.) Indonesia yang diyakini bernilai lebih dari USD 1 miliar.

<sup>24</sup> Aliran keluar investasi langsung di Triwulan ke-3 tahun 2018 senilai USD 1,9 miliar, lebih tinggi dari Triwulan ke-2 tahun 2018 (USD 1,2 miliar) dan Triwulan ke-3 tahun 2017 (USD 1 miliar) karena perusahaan Indonesia dilaporkan telah mengakuisisi perusahaan pertambangan batubara di Australia.

<sup>25</sup> Indonesia menarik FDI relatif sedikit dibandingkan dengan negara-negara setara. Selama 2013-2017, FDI ke Indonesia rata-rata sebesar 2,1 persen dari PDB. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan, misalnya, Malaysia (3,5 persen), Brasil (3,7 persen) dan Vietnam (5,7 persen). Lihat Bagian B untuk pembahasan yang lebih rinci.

#### 4. Inflasi IHK terus menurun

**Tekanan inflasi menurun di Triwulan ke-3 terutama didukung oleh inflasi yang lebih rendah dari barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered goods*)**

Inflasi IHK menurun menjadi rata-rata 3,1 persen *yoY* di Triwulan ke-3, dari rata-rata 3,3 persen di Triwulan ke-2 (Gambar A.19). Inflasi IHK yang lebih rendah ini sebagian besar didorong oleh inflasi barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered goods*) yang rendah oleh karena adanya efek dasar yang tinggi karena kenaikan tarif listrik tahun lalu.

Inflasi harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah turun dari rata-rata 3,5 persen di Triwulan ke-2 menjadi 2,4 persen *yoY* di Triwulan ke-3, karena tekanan dari kenaikan tarif listrik tahun lalu semakin menurun, mengimbangi kenaikan harga bahan bakar non-subsidi<sup>26</sup>. Selain itu, harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah yang terkait dengan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatat kenaikan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan ke-2, sehingga membatasi tekanan ke atas di Triwulan ke-3.

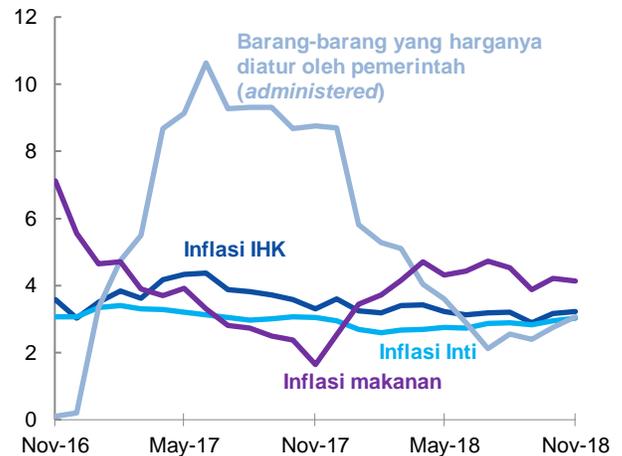
**Inflasi inti meningkat, karena biaya pendidikan di tahun 2018 meningkat lebih tinggi dari sebelumnya**

Inflasi inti, di luar inflasi dari barang harganya bergejolak (*volatile goods*) dan barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered goods*), naik tipis di Triwulan ke-3 menjadi 2,9 persen *yoY* dari 2,7 persen di Triwulan ke-2, sebagian karena adanya kenaikan yang lebih besar dalam biaya sekolah dan harga jasa tahun ini. Bank Indonesia melaporkan kenaikan biaya sekolah yang lebih tinggi di semua tingkat pendidikan, termasuk di universitas, untuk tahun ajaran baru yang dimulai di Triwulan ke-3 tahun 2018<sup>27</sup>. Biaya pendidikan, rekreasi, dan olahraga naik 3,5 persen *yoY* di Triwulan ke-3 dari 3,4 persen di Triwulan ke-2. Ini sebagian berkontribusi pada menurunnya konsumsi sektor yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan (lihat Bagian A.1).

**Inflasi IHK bergerak naik di bulan November, tetapi tetap terjaga dalam kisaran target**

Pada basis bulanan, inflasi IHK bergerak cukup tinggi, menjadi 3,2 persen *yoY* di bulan November dari 2,9 persen di bulan September, yang disebabkan oleh inflasi inti yang lebih tinggi, inflasi dari harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered goods*), dan inflasi dari barang yang harganya bergejolak (*volatile goods*). Inflasi inti naik menjadi 3,0 persen *yoY* di bulan November dibandingkan dengan 2,8 persen di bulan September. Penyesuaian harga dari berbagai bahan bakar non-subsidi menyebabkan inflasi dari barang yang harganya diatur oleh pemerintah lebih tinggi di bulan November. Inflasi dari barang yang harganya bergejolak meningkat karena kenaikan harga bahan bakar yang tidak disubsidi dan harga pangan yang lebih tinggi. Yang terakhir ini didorong oleh kenaikan kecil harga bahan makanan seperti cabai merah,

**Gambar A.19: Inflasi IHK menurun di Triwulan ke-3, tetapi perlahan meningkat di Triwulan ke-4 (perubahan *yoY*, persen)**



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Harga makanan adalah rata-rata tertimbang dari komponen harga bahan makanan dan makanan olahan dari IHK.

<sup>26</sup> Harga Pertamina (RON 92) dinaikkan sebanyak dua kali di Triwulan ke-3 tahun 2018, dari Rp 8.900 per liter menjadi Rp 9.500 per liter di bulan Juli dan selanjutnya menjadi Rp 10.400 per liter di bulan Oktober. Pemerintah juga menaikkan harga RON 94 (menjadi Rp 12.250 dari Rp 10.700), Pertadex (menjadi Rp 11.850 dari Rp 10.500); Dexlite (menjadi Rp 10.500 dari Rp 9.000), solar non-subsidi (menjadi Rp 9.800 dari Rp 7.700), dan minyak tanah non-subsidi (menjadi Rp 12.870 dari Rp 11.550) <https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-10-oktober-2018>.

<sup>27</sup> <https://www.bi.go.id/id/moneter/koordinasi-pengendalian-inflasi/highlight-news/Pages/Analisis-Inflasi-TPIP-Juli-2018.aspx>

bawang merah, dan beras, serta harga makanan olahan. Inflasi IHK tetap berada dalam kisaran target BI sebesar 2,5 persen hingga 4,5 persen meskipun ada penyesuaian ke atas.

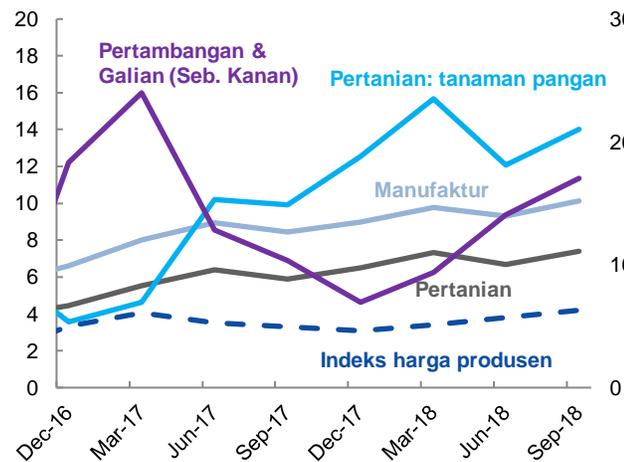
**Tabel A.2: Komponen utama dari indeks harga konsumen**  
(perubahan rata-rata yoy, persen)

Kategori	Q1-17	Q2-17	Q3-17	Q4-17	Q1-18	Q2-18	Q3-18	Okt-18	Nov-18
<b>Inflasi IHK</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>Inflasi Inti</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>
Pakaian	2,9	2,8	2,4	3,5	4,0	3,8	3,5	3,5	3,6
Kesehatan	4,0	3,8	3,4	3,1	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1
Pendidikan, rekreasi dan olah raga	2,7	2,8	2,9	3,3	3,4	3,4	3,5	3,2	3,1
<b>Barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah</b>	<b>4,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,3</b>	<b>8,7</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>
Perumahan, utilitas, bahan bakar	3,4	5,7	5,7	5,2	3,8	2,4	2,1	2,4	2,5
Transportasi, komunikasi dan keuangan	3,0	5,4	4,7	4,5	1,6	1,8	1,6	2,1	2,6
<b>Barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>
Bahan makanan	3,9	2,9	1,4	1,0	3,5	4,8	4,7	4,4	4,3
Makanan olahan, minuman, tembakau	5,1	4,6	4,3	4,2	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0

Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar A.20: Kenaikan seluruh kategori dalam harga produsen berkontribusi pada meningkatnya indeks harga produsen**

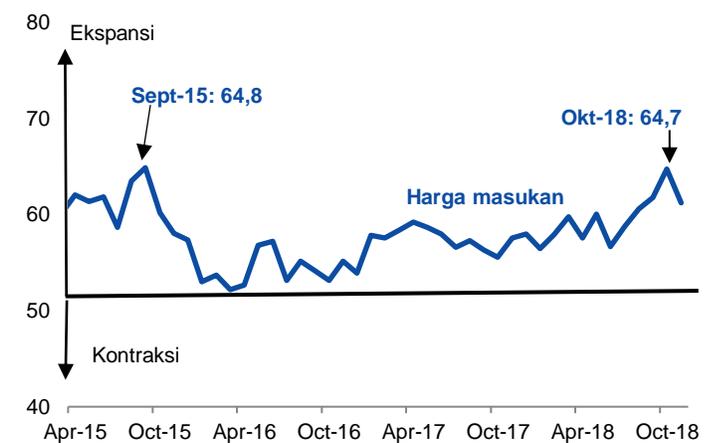
(perubahan yoy, persen)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar A.21: Produsen menghadapi tekanan biaya yang lebih besar karena harga masukan meningkat paling tinggi selama tiga tahun ini**

(50 = tidak ada perubahan dari bulan sebelumnya, bulanan)



Sumber: IHS Markit, Nikkei

**Harga produsen terus mengalami tren peningkatan di Triwulan ke-3**

Indeks harga produsen naik 4,2 persen di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan peningkatan 3,8 persen yoy di Triwulan ke-2, melanjutkan tren yang muncul sejak awal tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga yang pada seluruh sektor makanan, barang manufaktur, pertanian tanaman pangan, dan sektor pertambangan dan galian (Gambar A.20). Ini adalah peningkatan indeks yang tertinggi sejak Triwulan ke-3 tahun 2014. Depresiasi Rupiah dan kenaikan harga bahan baku berkontribusi terhadap kenaikan harga barang-barang masukan yang tertinggi selama tiga tahun ini di bulan Oktober (Gambar A.21).

### 5. Kondisi keuangan makro tetap lemah di Triwulan ke-3

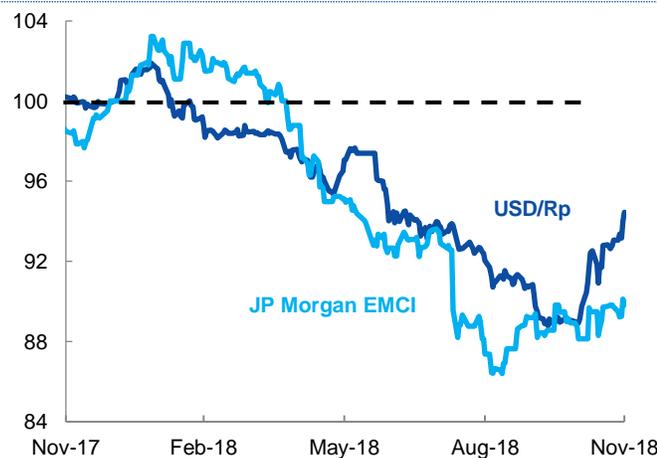
**Kondisi keuangan makro memburuk di Triwulan ke-3 sebelum menunjukkan tanda-tanda pemulihan di awal Triwulan ke-4**

Kondisi keuangan makro Indonesia terus memburuk di Triwulan ke-3 dengan berlanjutnya pelemahan Rupiah dan imbal hasil obligasi yang meningkat, secara luas sejalan dengan gejolak yang berkelanjutan di pasar keuangan global, meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan Triwulan ke-2 (lihat Kotak A.1). Akibatnya, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya sebanyak dua kali di Triwulan ke-3, sebesar 25 basis poin setiap kalinya. Sebagian karena fundamental ekonomi yang sehat dan ketahanan sektor keuangan, dua ukuran secara umum dari kesehatan sistem keuangan - rasio kredit macet (NPL) dan rasio kecukupan modal (CAR) - tetap stabil.

**Rupiah terdepresiasi baik secara riil maupun nominal di Triwulan ke-3**

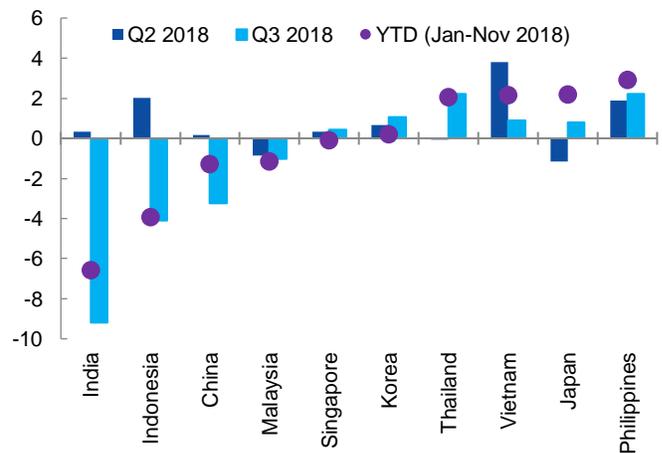
Sebagian mencerminkan gejolak pasar keuangan global yang sedang berlangsung (lihat Kotak A.1), melemahnya nilai Rupiah yang berlanjut dari Triwulan ke-2 ke Triwulan ke-3 (Gambar A.22), terdepresiasi 4,2 persen terhadap dolar AS – kurang dari penurunan sebesar 4,2 persen di Triwulan ke-2. Jika dibandingkan dengan negara-negara pasar berkembang lainnya, yang diwakili oleh *JP Morgan Emerging Market Currency Index* (EMCI), depresiasi nilai Rupiah secara umum hampir sama, sampai di akhir Triwulan ke-3 ketika EMCI pulih lebih dari tingkat pulihnya nilai Rupiah yang secara keseluruhan mencatatkan kerugian di Triwulan ke-3 sebesar 3,7 persen (dibandingkan dengan 8,6 persen di Triwulan ke-2). Secara *year-to-date*<sup>28</sup>, Rupiah telah terdepresiasi sebesar 5,6 persen secara nominal, sementara mata uang negara-negara pasar berkembang telah terdepresiasi sebesar 10,2 persen.

**Gambar A.22: Rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS di Triwulan ke-3 sebelum pulih di sekitar awal Triwulan ke-4**  
(indeks, 1 Jan 2018 = 100)



Sumber: JP Morgan, BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar A.23: Secara efektif riil, Rupiah terdepresiasi lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara setara di kawasan**  
(persen perubahan)



Sumber: *JP Morgan Real Effective Exchange Rate, CPI based* (2010 = 100), dan perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili penyusutan

Rupiah terus terdepresiasi di Triwulan ke-4 dengan nilai mata uang yang menembus batas Rp 15.000 pada tanggal 3 Oktober, yang pertama kalinya sejak puncak krisis keuangan Asia di bulan Juni 1998. Namun demikian, tren menurun ini tampaknya telah berbalik sejak saat itu, dengan mata uang yang kembali menguat untuk memperkecil kerugian sampai dengan pemilu sela (*mid-term elections*) di AS pada tanggal 6 November. Kenaikan ini lebih disebabkan oleh melemahnya nilai dolar AS, terkait dengan partai Demokrat yang berhasil menguasai mayoritas di majelis

<sup>28</sup> Sampai dengan 30 November 2018

rendah Kongres AS dan tantangan potensial yang mungkin muncul dari kondisi tersebut terhadap sikap kebijakan stimulan fiskal pemerintah saat ini<sup>29</sup>. Pengumuman BI bahwa BI akan memberlakukan kebijakan transaksi *domestic non-deliverable forward* (DNDF) sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas Rupiah (berlaku mulai 1 November)<sup>30</sup> juga berpotensi memperkuat pemulihan mata uang. Secara efektif riil<sup>31</sup>, hanya Rupee India yang jatuh melebihi tingkat depresiasi Rupiah sebesar 4,1 persen di Triwulan ke-3 (Gambar A.23). Secara *year-to-date* dan efektif riil, mata uang ini telah terdepresiasi sebesar 3,9 persen.

**Di Triwulan ke-3, imbal hasil obligasi meningkat tetapi lajunya lebih rendah dibandingkan dengan di Triwulan ke-2**

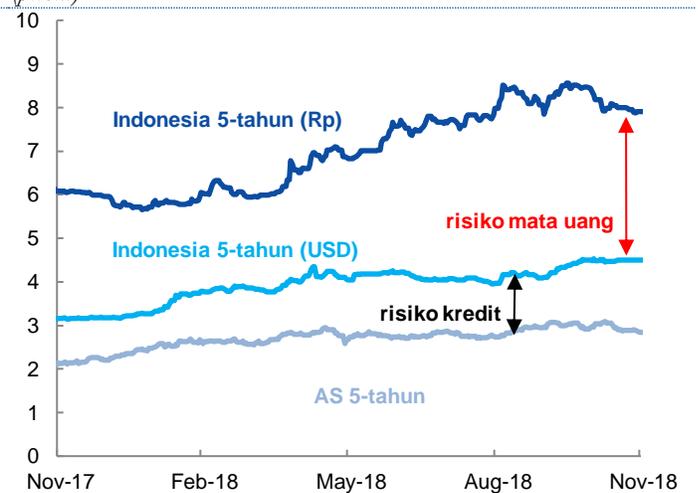
Seperti pada paruh pertama tahun 2018, bagaimanapun juga imbal hasil obligasi terus meningkat di Triwulan ke-3, dengan laju yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Triwulan ke-2 (Gambar A.24). Di Triwulan ke-3, imbal hasil obligasi 10-tahun naik 19 basis poin dibandingkan 122 basis poin di Triwulan ke-2. Kenaikan yang lebih kecil dalam imbal hasil obligasi juga terjadi di negara-negara pasar berkembang lainnya, dengan *Emerging Markets Bond Index Plus* (EMBI+) mengakhiri Triwulan ke-3 di wilayah netral dalam hal kerugian dan keuntungan, dibandingkan dengan kenaikan 73 basis poin di Triwulan ke-2. Tekanan naik yang lebih rendah pada imbal hasil obligasi negara-negara pasar berkembang (EM) secara umum terjadi karena menurunnya ketidakpastian dan gejolak yang terkait dengan negara-negara pasar berkembang tertentu – Turki dan Argentina – terutama menjelang akhir Triwulan ke-3.

**Gambar A.24: Kepercayaan investor kembali pulih di Triwulan ke-3 dengan peningkatan imbal hasil obligasi yang jauh lebih rendah daripada di Triwulan ke-2 (persen)**



Sumber: JP Morgan, CEIC, perhitungan staf Bank Dunia  
 Catatan: EMBI+ adalah imbal hasil obligasi JP Morgan emerging market hingga jatuh tempo

**Gambar A.25: Selisih (*spread*) antara obligasi berdenominasi Rupiah dan obligasi berdenominasi USD mencapai puncaknya di Triwulan ke-3 tetapi mulai menyempit di awal Triwulan ke-4 (persen)**



Sumber: Bloomberg, CEIC, perhitungan staf Bank Dunia

Salah satu hal yang menandakan kemungkinan pulihnya kepercayaan investor terhadap aset Indonesia (dan khususnya mata uangnya), selisih (*spread*) antara obligasi berdenominasi Rupiah dan Dolar AS mencapai puncaknya (dibandingkan dengan *spread* sepanjang tahun 2018) di awal September sebelum menyempit di Triwulan ke-4. Menganalisis komposisi *spread* untuk

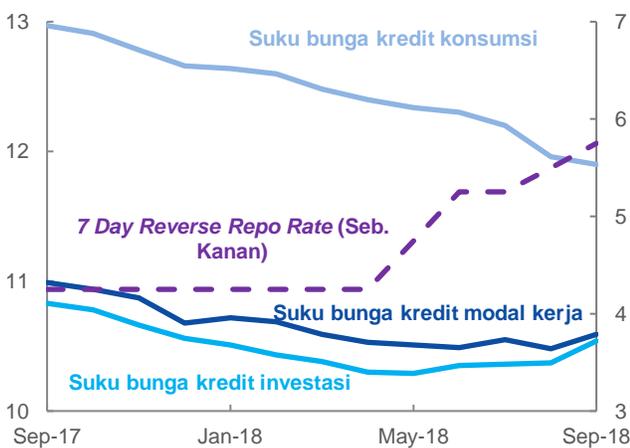
<sup>29</sup> <https://www.cnbc.com/2018/11/07/forex-markets-dollar-us-midterm-elections-in-focus.html>

<sup>30</sup> DNDF adalah instrumen lindung nilai tukar bagi bank dan perusahaan untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Tidak seperti transaksi berjangka (*forward transactions*) lainnya, transaksi DNDF akan menggunakan Rupiah, bukan USD; mendorong para pelaku bisnis dan investor untuk membeli lebih banyak Rupiah. Lihat [https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_207318.aspx](https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_207318.aspx) untuk informasi lebih lanjut.

<sup>31</sup> Nilai tukar efektif riil (*real effective exchange rates*) didasarkan pada rata-rata tertimbang nilai tukar bilateral dan disesuaikan dengan tingkat harga (inflasi) konsumen.

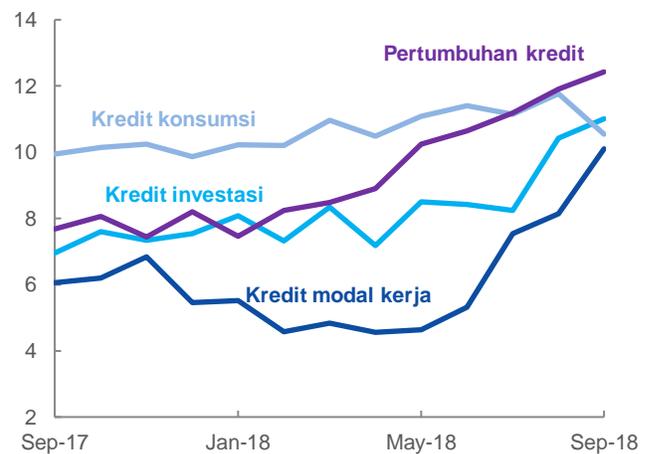
mengetahui apakah risiko utamanya berasal dari pergerakan mata uang, atau dari risiko yang terkait dengan kredit (*credit-related risk*); terlihat bahwa, seperti halnya di Triwulan ke-2, risiko utama tetap berasal dari gejolak nilai tukar (Gambar A.25). *Spread* antara imbal hasil obligasi Indonesia berdenominasi Dolar AS dan imbal hasil obligasi AS tetap stabil; sementara *spread* antara imbal hasil obligasi Indonesia berdenominasi Rupiah dengan yang berdenominasi Dolar AS melebar di Triwulan ke-3 sebelum mulai menyempit kembali. Selain itu, lelang obligasi Pemerintah pada tanggal 6 November mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebanyak tiga kali yang menguatkan hipotesis tentang kembalinya kepercayaan investor secara bertahap. Rata-rata, lelang obligasi Pemerintah di Triwulan ke-4 (hingga akhir November) mengalami kelebihan permintaan sebesar rata-rata 2,5 kali lipat, lebih tinggi daripada di Triwulan ke-3 (2,2) dan Triwulan ke-2 (2,1).

**Gambar A.26: Kenaikan tingkat suku bunga kebijakan acuan belum sepenuhnya ditransmisikan ke tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi...**  
(persen)



Sumber: CEIC, Bank Indonesia, dan perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar A.27: ... dan pertumbuhan kredit terus meningkat**  
(pertumbuhan yoy, persen)

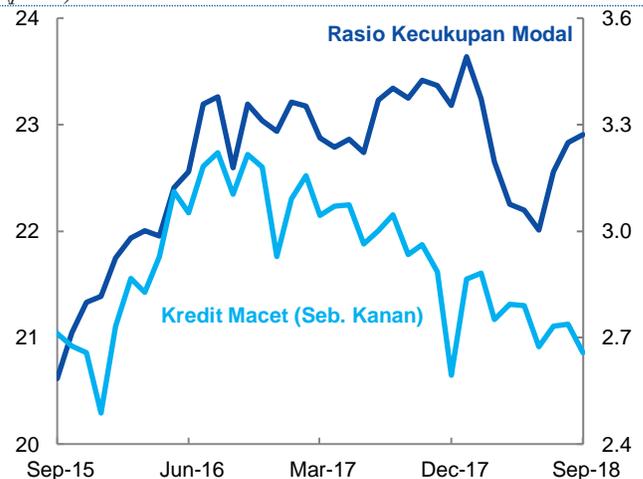


Sumber: CEIC, Bank Indonesia, dan perhitungan staf Bank Dunia

**Pengetatan kebijakan moneter berlanjut di Triwulan ke-3**

Pengetatan kebijakan moneter berlanjut di Triwulan ke-3 dengan BI menaikkan suku bunga kebijakannya sebanyak dua kali, senilai 25 basis poin setiap kalinya (Gambar A.26). Namun demikian, berbeda dengan Triwulan ke-2 di mana kebijakan moneter berfokus pada stabilitas Rupiah; di Triwulan ke-3, BI secara eksplisit menyatakan tujuannya ialah untuk menurunkan defisit

**Gambar A.28: Sektor perbankan menunjukkan ketahanan yang berkelanjutan dalam menghadapi pengetatan kebijakan moneter**  
(persen)



Sumber: CEIC dan Bank Indonesia

transaksi berjalan<sup>32</sup>. Berbeda dengan pergerakan suku bunga kebijakan (*BI 7-Day Reverse Repo Rate*) yang meningkat, tingkat suku bunga pinjaman masih cenderung menurun; masih dipengaruhi oleh siklus pelonggaran moneter sebelumnya, dengan rata-rata tingkat suku bunga pinjaman<sup>33</sup> turun ke 11,0 persen di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan 11,1 di Triwulan ke-2. Akibatnya, pertumbuhan kredit menguat, mencapai rata-rata 11,8 persen *yoj* di Triwulan ke-3 (Gambar A.27), yang tertinggi dalam hampir 4 tahun ini, dengan pemberian kredit untuk kredit modal kerja dan kredit investasi yang meningkat tajam – 13,6 persen *yoj* dan 11,4 persen *yoj*. Sebagai pertanda dari ketahanan sistem perbankan, depresiasi mata uang dan pengetatan kebijakan moneter tampaknya tidak memiliki dampak buruk pada kredit macet, yang berada di sekitar 2,7 persen di Triwulan ke-3 (secara umum mirip dengan hasil di Triwulan ke-2). Rasio kecukupan modal (CAR) juga menunjukkan sistem perbankan yang tangguh, dan rata-rata 22 persen di Triwulan ke-3 – serupa dengan di Triwulan ke-2 dan jauh di atas batas aman 8 persen (Gambar A.28).

## 6. Realisasi penerimaan yang solid mendukung pertumbuhan belanja yang tinggi, tetapi tantangan dalam hal kualitas belanja tetap ada

**Realisasi penerimaan yang lebih baik mengakibatkan defisit yang lebih rendah meskipun pengeluaran lebih tinggi**

Baik total penerimaan maupun belanja Pemerintah terus menunjukkan pertumbuhan yang tinggi sampai dengan bulan Oktober tahun ini. Realisasi penerimaan terutama didorong oleh pajak penghasilan dari sektor non-Migas dan penerimaan yang terkait dengan Migas, dan PPN/PPnBM, sementara pertumbuhan total belanja Pemerintah yang tinggi terutama disebabkan oleh belanja pegawai, belanja barang, dan subsidi energi yang lebih tinggi. Hasilnya adalah defisit anggaran yang jauh lebih kecil, dibandingkan dengan defisit selama periode yang sama tahun 2017. APBN tahun 2019 menandakan prioritas Pemerintah untuk meningkatkan realisasi penerimaan guna mendukung pengeluaran yang lebih tinggi. Akibatnya, defisit anggaran diproyeksikan akan lebih rendah sebesar 1,8 persen dari PDB pada tahun 2019, dibandingkan dengan defisit yang diperkirakan sebesar 2,1 persen sesuai dengan perkiraan untuk tahun 2018.

**Total penerimaan terus meningkat kuat seperti yang terlihat di awal tahun ini**

Penerimaan Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Oktober 2018 terus meningkat pesat: 23 persen tahun ini *yoj* dibandingkan dengan 10,4 persen selama periode yang sama tahun 2017, tidak termasuk penerimaan dari Program Amnesti Pajak<sup>34</sup> (lihat Gambar A.29).

<sup>32</sup> Seperti yang terlihat dalam siaran pers yang menyertai keputusan Dewan pada bulan Agustus dan September 2018. Siaran pers bulan Agustus: [https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_206618.aspx](https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_206618.aspx), dan bulan September: [https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_207318.aspx](https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_207318.aspx).

<sup>33</sup> Rata-rata termasuk tingkat suku bunga kredit konsumsi, suku bunga kredit modal kerja, dan suku bunga kredit investasi.

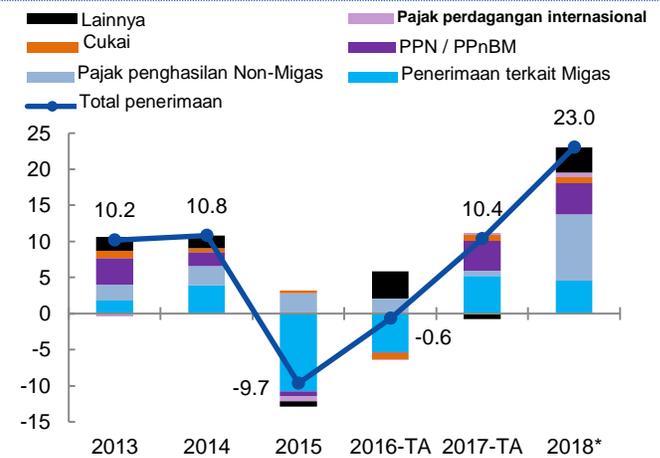
<sup>34</sup> Program Amnesti Pajak adalah program penerimaan pajak penghasilan Pemerintah Pusat yang dimulai dari Triwulan ke-3 tahun 2016 hingga Triwulan ke-1 tahun 2017.

Semua komponen penerimaan berkontribusi positif terhadap peningkatan total penerimaan. Penerimaan dari pajak penghasilan non-Migas<sup>36</sup> dan dari PPN<sup>37</sup> terus menunjukkan kontribusi yang signifikan, masing-masing sebesar 9,2 dan 4,4 poin persentase. Selain itu, penerimaan yang terkait dengan Migas (pajak penghasilan, dividen, dan royalti) juga menunjukkan kontribusi positif terhadap total penerimaan sebesar 4,6 poin persentase, meskipun lebih kecil dibandingkan pada tahun 2017. Peningkatan penerimaan Migas ini sebagian disebabkan oleh harga komoditas global yang lebih tinggi, khususnya minyak dan batubara. Hingga akhir Oktober 2018, penerimaan cukai mencatat peningkatan dua digit – 10,4 persen *yoy* dibandingkan 9,4 persen di tahun 2017 untuk periode yang sama, peningkatan yang tertinggi sejak tahun 2013. Hal ini didorong oleh pemberlakuan tarif cukai yang lebih tinggi dan produksi tembakau yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

**Peningkatan total belanja Pemerintah meningkat dua kali lipat, didorong oleh belanja subsidi energi...**

Total pengeluaran pemerintah di tahun ini sampai bulan Oktober 2018, termasuk transfer ke pemerintah daerah, naik 12 persen *yoy*, meningkat dua kali lipat dari peningkatan sebesar 6 persen selama periode yang sama tahun 2017 (Gambar A.30). Subsidi energi, tidak termasuk tunggakan pembayaran, meningkat sebagian karena harga komoditas global yang lebih tinggi. Pengeluaran pada pembayaran bunga pinjaman juga meningkat, terutama didorong oleh depresiasi Rupiah dan imbal hasil obligasi Pemerintah yang lebih tinggi. Demikian pula, belanja sosial juga meningkat menyusul dilakukannya perluasan program PKH dan pencairan awal premi kesehatan

**Gambar A.29: Pajak penghasilan non-Migas, penerimaan terkait Migas dan PPN adalah kontributor utama untuk peningkatan total penerimaan yang tinggi (kontribusi terhadap pertumbuhan, Jan - Okt yoy, poin persentase)**



Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Penerimaan terkait Migas mengacu pada pajak penghasilan minyak dan gas, dividen dan royalti (penerimaan negara bukan pajak), Non-Migas adalah singkatan dari pajak penghasilan non-migas; PPN /PPnBM adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai / pajak penjualan barang mewah; “Lainnya” meliputi: pajak bumi dan bangunan, penerimaan pajak lainnya; penerimaan negara bukan pajak non-minyak dan gas; penerimaan negara bukan pajak lainnya (keuntungan perusahaan publik, penerimaan dari Badan Layanan Umum [BLU], dan penerimaan negara bukan pajak [PNBP]<sup>35</sup> lainnya); serta dana hibah. 2017-TA berarti bahwa total penerimaan mengecualikan biaya penebusan yang dipungut berdasarkan Program Amnesti Pajak. 2018\* adalah perbandingan yoy terhadap 2017-TA.

<sup>35</sup> Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya termasuk dana bagi hasil dari penjualan batubara (Penjualan Hasil Tambang / PHT) dan kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi. Kontribusi besar dari komponen “lain-lain” terhadap peningkatan total penerimaan pada tahun 2018 sebagian disebabkan oleh peningkatan harga komoditas tersebut sementara pada tahun 2016 sebagian disebabkan oleh jumlah produksi (*lifting*) Migas yang lebih tinggi.

<sup>36</sup> Hal ini terutama didorong oleh realisasi pemungutan pajak penghasilan perusahaan yang tinggi oleh karena adanya peningkatan kepatuhan. Tahun ini hingga bulan Oktober, pajak penghasilan dari impor (Pasal 22 Impor) dan pajak penghasilan badan (Pasal 25/29) masing-masing meningkat sebesar 28 persen dan 25 persen secara tahunan. PPh Pasal 22 Impor adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi impor tertentu, yang dapat dianggap sebagai bagian dari pajak penghasilan badan untuk Indonesia.

<sup>37</sup> PPN meningkat 15 persen yoy di akhir Oktober karena harga komoditas yang lebih tinggi. Sementara itu, meningkatnya permintaan dalam negeri mendorong peningkatan PPN impor yang mengalami peningkatan sebesar 28,1 persen yoy secara nominal dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

<sup>38</sup> Tarif cukai tembakau yang diberlakukan meningkat lebih dari tarif normatif sebesar 10,04 persen pada tahun ini hingga bulan Oktober. Sementara itu, produksi tembakau juga meningkat 2,6 persen yoy sebagian karena adanya peningkatan dalam penegakan peraturan (Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi yang dimulai di Triwulan ke-3 tahun 2017). Selanjutnya, cukai pada cairan *nape* (rokok elektronik – pent.) yang digunakan dalam rokok elektronik mulai diberlakukan tanggal 1 Oktober 2018.

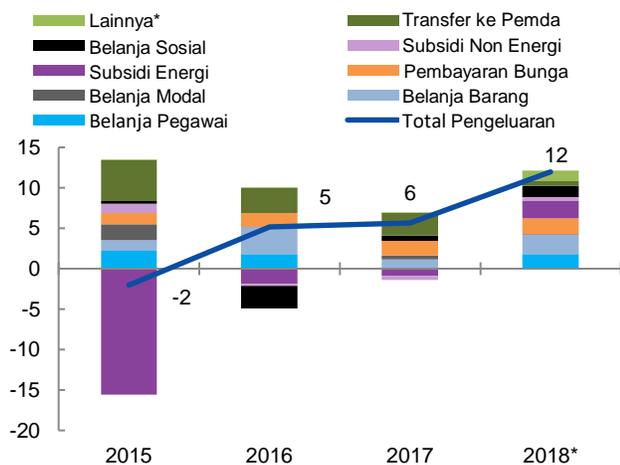
bersubsidi (PBI-JKN), khususnya dalam tujuh bulan pertama tahun 2018. Belanja pegawai dan belanja barang meningkat pada pembayaran tunjangan bagi para pensiunan dan tambahan tunjangan kinerja bagi pegawai negeri aktif selama perayaan Idul Fitri. Sementara itu, belanja barang meningkat sebagian karena berlangsungnya beberapa acara besar seperti pemilihan daerah, Asian Games 2018 dan Pertemuan Tahunan Bank Dunia-IMF di Bali. Namun demikian, di akhir Oktober 2018, belanja modal hanya meningkat sebesar 1 persen *yoy*, lebih kecil dari 8 persen pada periode yang sama tahun lalu, karena alokasi anggaran yang lebih rendah<sup>39</sup>.

**Tingkat pencairan belanja terus meningkat tetapi tetap terdapat masalah dalam hal kualitas**

Hingga bulan Oktober 2018, Pemerintah telah membelanjakan 77 persen dari anggaran (lihat Gambar A.31), walau ini merupakan yang tertinggi setidaknya dalam delapan tahun terakhir, tetapi masih ada tantangan yang berkaitan dengan kualitas belanja. Tingginya belanja berlaku secara umum, tetapi sangat tinggi untuk subsidi energi, belanja bantuan sosial dan pegawai. Sebaliknya, pelaksanaan belanja modal hanya mencapai setengah dari anggaran (53 persen) selama 10 bulan tahun ini, meskipun ini sedikit lebih baik dari tahun 2017.

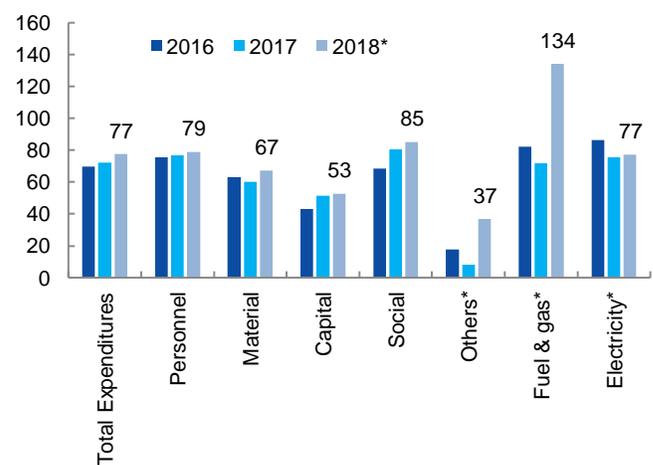
**Gambar A.30: Subsidi energi, pembayaran bunga, belanja pegawai, dan belanja barang adalah kontributor utama peningkatan total pengeluaran**

(kontribusi pengeluaran Januari-Oktober bagi peningkatan, poin persentase)



**Gambar A.31: Tingginya pembelanjaan berlaku secara umum, dengan subsidi bahan bakar dan gas yang lebih tinggi dari yang direncanakan**

(pengeluaran Januari-Oktober sebagai persen anggaran, persen)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: \*Bahan bakar dan gas untuk 2018 bukan angka yang diterbitkan oleh APBN Kita dari Pemerintah, karena tidak termasuk pembayaran tunggakan yang ditambahkan kembali ke kategori belanja "Lainnya" sesuai dengan klasifikasi anggaran. \*Lainnya mulai tahun 2017 dan seterusnya termasuk pembayaran tunggakan dari subsidi energi sebelumnya

**Realisasi penerimaan yang lebih baik menyebabkan defisit yang lebih rendah**

Hingga akhir Oktober 2018, total defisit anggaran Pemerintah mencapai Rp 237 triliun, atau 73 persen dari kekurangan anggaran yang ditargetkan, lebih rendah, baik dalam jumlah maupun dalam tingkat capaian terhadap target yang sebesar 75 persen untuk periode yang sama tahun 2017, ketika itu sebesar Rp 299 triliun, berkat adanya peningkatan realisasi penerimaan. Demikian pula total pembiayaan bersih pada Oktober 2018 mencapai Rp320 triliun atau 98 persen dari target, yang lebih rendah secara nominal sebesar 16 persen *yoy* dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Total utang Pemerintah Pusat mencapai Rp 4.479 triliun atau 31 persen dari PDB pada akhir Oktober 2018, dan masih sekitar setengah dari ambang batas legal 60 persen. Utang berdenominasi Rupiah tetap mendominasi, yakni sebesar 57 persen dan hanya 10,1 persen yang

<sup>39</sup>APBN Kita, November 2018

akan jatuh tempo dalam jangka pendek<sup>40</sup>, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar dan risiko pembiayaan ulang (*refinancing risks*).

**APBN tahun 2019 menyoroti pentingnya peningkatan realisasi penerimaan**

Pada tahun 2019, Pemerintah menargetkan pertumbuhan dua digit baik untuk penerimaan maupun pengeluaran dengan defisit primer dan defisit fiskal yang lebih rendah. Total penerimaan dan dana hibah diproyeksikan sebesar Rp 2.165 triliun (13,5 persen dari PDB), meningkat 13,8 persen (dalam nominal) dibandingkan dengan perkiraan tahun 2018. Angka ini sedikit lebih rendah dari perkiraan kenaikan sebesar 14,2 persen tahun ini, tetapi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan rata-rata sebesar 3,8 persen dari tahun 2014 hingga 2017. Selain itu, total pengeluaran diusulkan sebesar Rp 2.461 triliun (15,3 persen dari PDB) meningkat 11 persen relatif terhadap perkiraan tahun 2018. Ini adalah peningkatan tahun ke tahun terbesar yang diproyeksikan<sup>41</sup> sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada tahun 2014, menyoroti pentingnya peningkatan realisasi penerimaan untuk mengakomodasi belanja yang lebih tinggi sambil tetap mempertahankan defisit fiskal yang konservatif.

**Target rasio pajak yang optimis sebesar 11,1 persen dari PDB pada tahun 2019**

Penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat sebesar 11,4 persen secara riil terhadap perkiraan tahun 2018 (atau 15,4 persen secara nominal), sehingga rasio pajak menjadi 11,1 persen dari PDB. Ini adalah target yang optimistis tetapi belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat bahwa pertumbuhan riil penerimaan pajak telah melampaui 10 persen sebanyak lima kali dalam 15 tahun terakhir. Pemungutan Pajak Penghasilan non-Migas, diikuti oleh pemungutan PPN, diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan penerimaan, karena upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak terus berlanjut. Cukai juga diperkirakan akan meningkat sebesar 6,4 persen secara nominal dari perkiraan tahun 2018, sebagian besar melalui penegakan peraturan yang lebih baik<sup>42</sup>.

**Peningkatan total belanja yang lebih tinggi diharapkan terjadi pada tahun 2019, karena pengeluaran yang lebih tinggi untuk subsidi energi, program-program sosial, dan transfer ke daerah tetapi peningkatan belanja untuk sektor infrastruktur yang lebih rendah**

Pengeluaran Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2019 diperkirakan masih meningkat dua digit sebesar 12,4 persen (angka nominal) dari perkiraan tahun 2018, lebih rendah dari rata-rata peningkatan 14,5 persen pada tahun 2017-18. Ini menunjukkan alokasi yang secara umum lebih tinggi untuk subsidi energi dan peningkatan manfaat dari PKH dan premi serta jumlah penerima manfaat yang lebih tinggi untuk PBI-JKN. Konsisten dengan harapan akan melemahnya nilai Rupiah dan tingginya harga minyak mentah tahun depan, Pemerintah akan mengalokasikan Rp 160 triliun untuk subsidi energi, sekitar 69 persen lebih tinggi dari APBN tahun 2018, tetapi jumlahnya (dan sebagai persentase terhadap total anggaran) masih jauh lebih rendah daripada masa pra-reformasi<sup>43</sup>. Alokasi anggaran tahun 2019 sedikit lebih rendah dari perkiraan tahun 2018, karena pembayaran tunggakan subsidi kepada Pertamina dan PLN tahun 2018 untuk belanja subsidi pada tahun 2016 dan 2017 tidak dianggarkan kembali di 2019. Untuk belanja bantuan sosial, Pemerintah merencanakan untuk meningkatkan besaran bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang diterima tiap rumah tangga, hampir senilai dua kali lipat – saat ini rata-rata Rp 1,7 juta (USD 118) per tahun – menjadi Rp 3,1 juta (USD 215) pada tahun 2019. Dengan demikian, alokasi PKH akan berlipat ganda menjadi Rp 34,4 triliun, sementara jumlah rumah tangga penerima manfaat ditargetkan tetap sebesar 10 juta keluarga miskin.

Selain itu, Pemerintah juga bermaksud untuk meningkatkan jumlah Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 8,3 persen dari perkiraan tahun 2018, yang lebih besar dari rata-rata peningkatan 5,5 persen pada tahun 2017-18. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan konsisten dengan peningkatan proyeksi pengeluaran secara

<sup>40</sup> Pada bulan Desember 2017, Pemerintah memproyeksikan 10,1; 25,4; dan 39,8 persen dari total utang pemerintah akan jatuh tempo dalam 1, 3, dan 5 tahun, masing-masing. Sumber: <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/24>

<sup>41</sup> Membandingkan alokasi anggaran (APBN) yang disetujui selama tahun-tahun tersebut

<sup>42</sup> Pengumuman Pemerintah baru-baru ini menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau dalam APBN 2019. Namun demikian, Dirjen Bea Cukai menyebutkan bahwa mereka optimis untuk dapat memenuhi target APBN 2019.

<http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/gNQMYBvN-target-penerimaan-cukai-masih-sesuai-apbn-2019>

<sup>43</sup> Periode pra-reformasi mengacu pada periode ketika Pemerintah masih memberikan subsidi untuk bensin RON 88 atau sebelum tahun 2015.

keseluruhan, termasuk dana transfer tambahan ke Kelurahan sebagai bagian dari DAU (Dana Alokasi Umum).

Infrastruktur masih menjadi prioritas, tetapi peningkatannya lebih rendah dari rata-rata tahunan selama empat tahun terakhir. Pemerintah berencana untuk membelanjakan Rp 415 triliun untuk infrastruktur dalam APBN tahun 2019 yang berasal dari belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah dan pembiayaan, atau peningkatan sebesar 1,1 persen dari perkiraan tahun 2018 tetapi kurang dari rata-rata 18 persen peningkatan tahun-ke-tahun (*yoY*) di antara APBN tahun 2016-18. Namun demikian, jumlah tersebut masih senilai hampir seperlima dari total belanja, jauh lebih tinggi dari total belanja di tahun 2013-14 yang hanya sepersepuluh.

## 7. Perkiraan dan risiko pertumbuhan ekonomi

**Perkiraan pertumbuhan ekonomi masih cukup positif, dengan risiko penurunan yang tetap substansial**

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap cukup positif dan stabil karena fundamental ekonomi makro yang kuat dan permintaan dalam negeri yang tinggi selama rentang waktu proyeksi. Namun demikian, risiko penurunan (*downside risks*) tetaplah substansial meskipun terjadi sedikit pelanggaran baru-baru ini dalam gejolak keuangan.

**Pertumbuhan diproyeksikan mencapai 5,2 persen pada tahun 2018 dan 2019 karena permintaan dalam negeri yang lebih tinggi diperkirakan lebih dari cukup untuk mengimbangi hambatan dari sektor eksternal**

Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan sebesar 5,2 persen *yoY* tahun ini dan pada tahun 2019, lebih tinggi dari tahun 2017 (Tabel A.3), karena permintaan dalam negeri yang lebih tinggi diperkirakan lebih dari cukup untuk mengimbangi hambatan dari sektor eksternal. Meskipun perkiraan inflasi harga konsumen akan meningkat tahun depan, konsumsi swasta diproyeksikan akan menguat oleh karena belanja sosial yang meningkat. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diharapkan akan meningkat karena investor terus mengambil keuntungan dari kondisi pembiayaan dalam negeri yang masih mudah, khususnya pada paruh kedua tahun ini ketika ketidakpastian politik berkurang. Demikian pula konsumsi Pemerintah diperkirakan akan tetap tinggi seiring berlanjutnya reformasi dan peningkatan penerimaan yang menciptakan ruang untuk konsolidasi fiskal dan belanja tambahan.

**Tabel A.3: Indikator ekonomi utama**

(*pertumbuhan yoY, persen, kecuali dinyatakan lain*)

	Tahunan			Revisi dari IEQ sebelumnya
	2017	2018p	2019p	2018
<b>1. Indikator ekonomi utama</b>				
<b>Produk Domestik Bruto (PDB)</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>
Pengeluaran konsumsi swasta	5,0	5,1	5,2	0,0
Konsumsi pemerintah	2,1	5,0	5,3	1,0
Pembentukan modal tetap bruto	6,2	7,0	7,5	0,2
Ekspor barang dan jasa	9,1	7,3	7,2	0,8
Impor barang dan jasa	8,1	13,8	10,7	4,3
<b>2. Indikator ekonomi lainnya</b>				
Indeks harga konsumen	3,8	3,2	3,5	-0,2
<b>3. Asumsi Ekonomi</b>				
Nilai tukar (Rp/USD)	13.381	14.200	14.250	100
Harga minyak mentah Indonesia (USD/bbl)	51,2	67,7	66,7	4,8

Sumber: BPS; Bank Indonesia; CEIC; proyeksi staf Bank Dunia

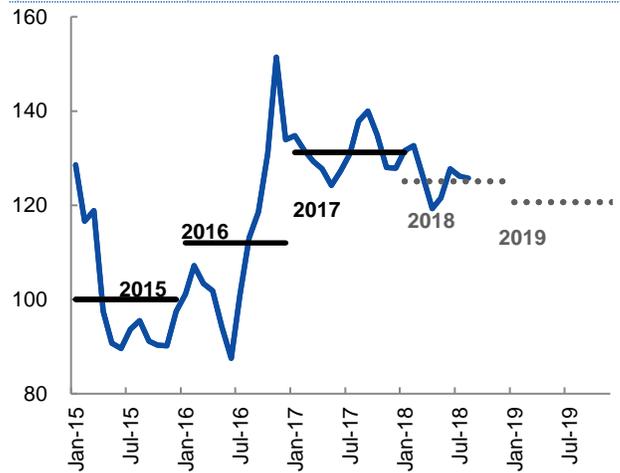
Catatan: Angka di tahun 2017 adalah hasil aktual. p adalah singkatan dari perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan inventaris tidak disajikan dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB terbaru. Nilai tukar dan asumsi harga minyak mentah adalah data tahunan rata-rata. Revisi relatif terhadap proyeksi pada Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia (IEQ) edisi September 2018

**Nilai tukar perdagangan (terms-of-trade) diproyeksikan akan menurun**

**Nilai tukar perdagangan Indonesia pada tahun 2018 kemungkinan akan lebih lemah dibandingkan dengan tahun 2017**

Dengan tidak adanya pergerakan signifikan dalam harga ekspor komoditas utama Indonesia di Triwulan ke-4 tahun 2018, maka nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*, ToT) Indonesia<sup>44</sup> di tahun 2018 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2017 (Gambar A.32). Setelah 2018, proyeksi pergerakan harga batubara, minyak mentah, dan minyak kelapa sawit – tiga komoditas dengan bobot terbesar dalam kelompok komoditas ekspor – menyiratkan adanya koreksi penurunan lebih lanjut di tahun 2019 untuk Indeks Harga Perdagangan Besar Neto Indonesia<sup>45</sup> diperkirakan akan terjadi<sup>46</sup>.

**Gambar A.32: Indeks harga tertimbang perdagangan bersih - historis dan perkiraan hingga tahun 2019**  
(indeks 2015=100)



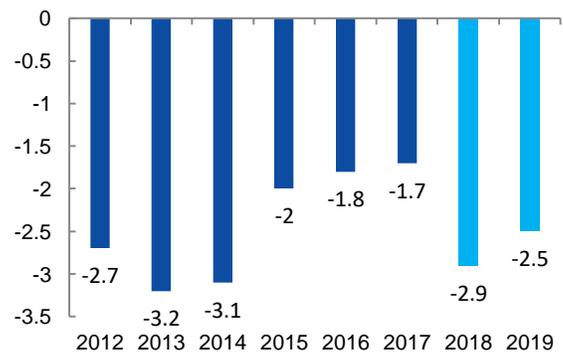
Sumber: BPS; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih dibangun atas enam komoditas ekspor utama Indonesia (karet, logam dasar, batubara, minyak, LNG, dan minyak kelapa sawit)

**Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar di tahun 2018**

**Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar di tahun 2018**

Dengan adanya ketidakpastian kebijakan perdagangan global saat ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama yang lebih lambat, nilai tukar perdagangan (ToT) yang lebih lemah, dan investasi dalam negeri yang terus mendorong kebutuhan impor yang tinggi, defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan melebar menjadi 2,9 persen dari PDB di tahun 2018, meskipun terdapat langkah-langkah kebijakan yang diberlakukan baru-baru ini yang mendukung ekspor dan membatasi impor. Namun demikian, dengan meredam dampak depresiasi mata uang yang membebani impor dan neraca penerimaan, defisit

**Gambar A.33: Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar pada tahun 2018 dan 2019 karena investasi yang sarat barang impor tetap tinggi dan nilai tukar perdagangan yang melemah**  
(persen PDB)



Sumber: CEIC dan Bank Indonesia; perhitungan Staf Bank Dunia  
Catatan: Data untuk tahun 2018 dan 2019 adalah perkiraan

<sup>44</sup> Nilai tukar perdagangan (*Terms of Trade*, ToT) mengacu pada harga relatif impor dalam hal ekspor dan didefinisikan sebagai rasio harga ekspor terhadap harga impor. Hal ini dapat diartikan sebagai jumlah barang impor yang dapat dibeli oleh suatu negara per satuan barang ekspor.

<sup>45</sup> Indeks Harga Perdagangan Besar Neto (*Net Trade-Commodity Price Index*, NTI) didefinisikan sebagai:  $NTI_t = \frac{Bobot_{i,p} \times Harga_{i,t}}{Harga_{i,t}}$  di mana  $Bobot_{i,p} = \frac{(E_{i,t}) - (I_{i,t})}{\sum (E_{N,t}) - \sum (I_{N,t})}$  dan  $i =$  jenis komoditas;  $t =$  bulan;  $p =$  periode siklus (mis. 5 tahun rata-rata);  $N =$  jumlah komoditas;  $T =$  tahun basis;  $E =$  nilai ekspor;  $I =$  nilai impor

<sup>46</sup> Jika harga untuk penyerahan berjangka diasumsikan bukannya menggunakan perkiraan Bank Dunia untuk batubara, minyak mentah dan minyak kelapa sawit, ToT yang diproyeksikan untuk tahun 2018 dan 2019 (tidak disajikan dalam grafik) akan sedikit lebih rendah. NTI alternatif dihitung dengan menggunakan rata-rata harga berjangka batubara (ICE, Newcastle), rata-rata dari tiga tolok ukur minyak, yaitu Brent, WTI dan Dubai (ICE) dan minyak kelapa sawit (Malaysia). Harga untuk komoditas penting lainnya diambil dari Bank Dunia (2018).

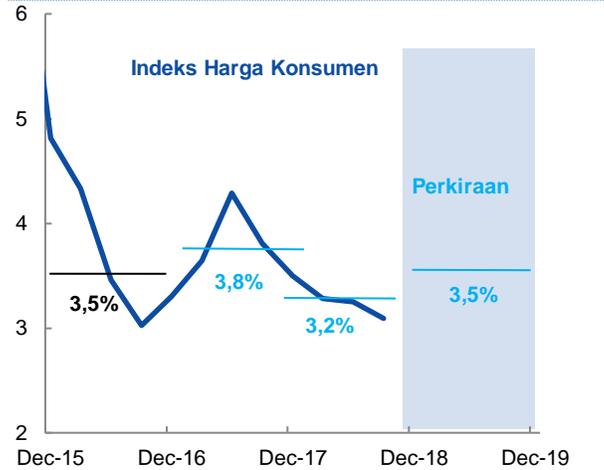
neraca transaksi berjalan diperkirakan akan mencapai 2,5 persen dari PDB pada tahun 2019 (Gambar A.33).

**Inflasi harga konsumen diperkirakan akan sedikit meningkat di tahun 2019, tetapi dalam kisaran target BI**

**Proyeksi inflasi IHK direvisi turun secara marjinal, tetapi tetap dalam kisaran target**

Inflasi IHK diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia rata-rata sebesar 3,2 persen pada tahun 2018, lebih rendah dari 3,8 persen di tahun 2017 (Gambar A.34). Belanja sosial yang tinggi bersama dengan inflasi harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered prices*) yang lebih tinggi karena *base effects* yang tinggi dari tahun 2017 telah menurun, diperkirakan akan memberi *upward pressures* di tahun 2019, yang diperkirakan akan menjadi 3,5 persen.

**Gambar A.34: Tingkat inflasi IHK diproyeksikan akan tetap berada dalam kisaran target (perubahan rata-rata tahunan yoy, persen)**



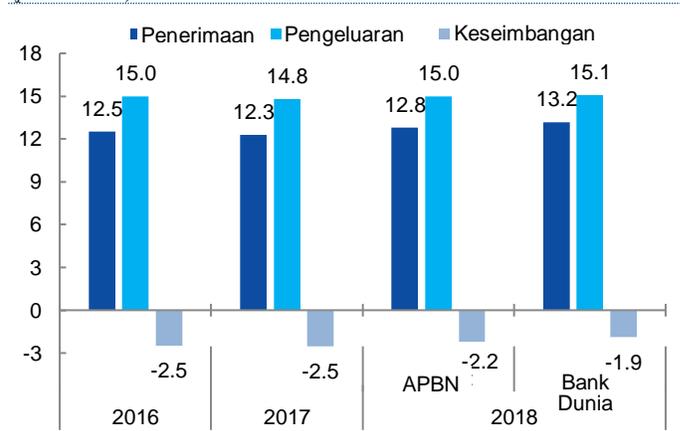
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Defisit APBN diperkirakan menurun di tahun 2018**

**Pengelolaan fiskal meningkat; Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 1,9 persen dari PDB pada tahun 2018**

Pengelolaan fiskal dalam sembilan bulan pertama tahun 2018 meningkat karena perkiraan penerimaan yang realistis, dan akibatnya, APBN Perubahan tidak diperlukan pada tahun 2018, meskipun tahun ini merupakan tahun pemilihan. Ini merupakan perubahan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, seperti di tahun 2016 ketika diperlukan adanya pemotongan anggaran tengah tahun. Berdasarkan realisasi penerimaan hingga bulan Oktober, total penerimaan Pemerintah Pusat diproyeksikan mencapai Rp 1.876 triliun, meningkat 12,6 persen dibandingkan dengan tahun 2017, yang sebagian besar didorong oleh proyeksi peningkatan dalam realisasi penerimaan dari pajak penghasilan (Tabel A.4). Sementara itu, total pengeluaran pemerintah diproyeksikan mencapai Rp 2.145 triliun, meningkat 6,9 persen dibandingkan dengan tahun 2017, didorong oleh peningkatan belanja sosial. Secara keseluruhan, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 1,9 persen PDB, 0,3 poin persentase lebih rendah dari defisit anggaran yang ditargetkan untuk tahun 2018 sebesar 2,2 persen PDB (Gambar A.35).

**Gambar A.35: Penerimaan dan pengeluaran yang lebih tinggi dengan hasil bersih berupa defisit APBN yang lebih rendah diproyeksikan untuk tahun 2018 (persen PDB)**



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Tabel A.4: Proyeksi anggaran Kementerian Keuangan dan Bank Dunia

(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2018	2018	2018	2019	Perkiraan Kemenkeu thn 2018 vs APBN thn 2018 (% penyimpangan)	APBN thn 2019 vs APBN thn 2018 (% perubahan)
	Aktual	APBN	Perkiraan Kemenkeu	Bank Dunia	APBN		
<b>A. Penerimaan</b>	<b>1.666</b>	<b>1.895</b>	<b>1.903</b>	<b>1.876</b>	<b>2.165</b>	<b>0,44</b>	<b>14,3</b>
<b>1. Penerimaan pajak</b>	<b>1.344</b>	<b>1.618</b>	<b>1.548</b>	<b>1.469</b>	<b>1.786</b>	<b>-4,30</b>	<b>10,4</b>
Penerimaan pajak Minyak & Gas	50	38	55	66	66	45,3	73,6
Penerimaan pajak Non-Migas, antara lain:	1.101	1.386	1.296	1.207	1.511	-6,5	9,1
Pajak penghasilan Non-Migas	596	817	706	663	828	-13,6	1,4
PPN/PPnBM	481	542	565	517	655	4,2	21,0
Pajak bumi dan bangunan	17	17	17	19	19	0,4	10,0
Pajak lainnya	7	10	8	8	9	-21,4	-11,3
Cukai	153	155	156	149	166	0,1	6,5
Pajak perdagangan internasional	39	39	42	47	43	8,7	11,9
<b>2. Penerimaan negara bukan pajak</b>	<b>311</b>	<b>275</b>	<b>349</b>	<b>398</b>	<b>378</b>	<b>26,8</b>	<b>37,4</b>
Penerimaan sumber daya alam	111	104	169	181	191	63,2	84,0
Minyak & Gas	82	80	144	145	160	79,6	98,9
Non-Minyak & Gas	29	23	25	37	31	6,6	32,9
Penerimaan negara bukan pajak lainnya	200	172	180	216	188	4,8	9,2
<b>3. Dana hibah</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>349,8</b>	<b>-66,6</b>
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>2.007</b>	<b>2.221</b>	<b>2.217</b>	<b>2.145</b>	<b>2.461</b>	<b>-0,2</b>	<b>10,8</b>
<b>1. Pemerintah pusat</b>	<b>1.265</b>	<b>1.454</b>	<b>1.454</b>	<b>1.377</b>	<b>1.634</b>	<b>-0,1</b>	<b>12,4</b>
Belanja pegawai	313	366	342	345	382	-6,3	4,3
Belanja barang	291	340	320	307	345	-6,0	1,5
Belanja modal	209	204	194	163	189	-5,0	-7,1
Pembayaran bunga	217	239	249	253	276	4,5	15,6
Subsidi, antara lain:	166	156	228	214	224	46,0	43,6
Energi	98	95	163	151	160	73,0	69,3
BBM	47	47	109	95	101	131,3	114,7
Listrik	51	48	55	56	59	15,3	24,3
Non-energi	69	62	65	62	64	4,8	4,2
Dana hibah	5	1	1	0	2	0,0	32,9
Sosial	55	81	80	84	102	-1,2	25,6
Lainnya	9	67	39	11	114	-42,5	69,6
<b>2. Transfer ke daerah</b>	<b>742</b>	<b>766</b>	<b>764</b>	<b>768</b>	<b>827</b>	<b>-0,3</b>	<b>7,9</b>
<b>C. Saldo Keseluruhan</b>	<b>(341)</b>	<b>(326)</b>	<b>(314)</b>	<b>(269)</b>	<b>(296)</b>		
<b>D. Pembiayaan</b>	<b>367</b>	<b>326</b>	<b>314</b>	<b>269</b>	<b>296</b>		
<b>1. Pembiayaan utang</b>	<b>429</b>	<b>399</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	<b>359</b>		
<b>2. Pembiayaan investasi</b>	<b>(60)</b>	<b>(66)</b>	<b>(66)</b>	<b>-</b>	<b>(76)</b>		
<b>3. Pemberian pinjaman</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>		
<b>4. Kewajiban penjaminan</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>5. Pembiayaan lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>15</b>		
<i>Item memo (sebagai % PDB)</i>							
Total Penerimaan	12,3	12,8	12,8	13,2	13,5		
Penerimaan Pajak	9,9	10,9	10,4	10,3	11,1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,3	1,9	2,4	2,8	2,4		
Total Pengeluaran	14,8	15,0	15,0	15,1	15,3		
Pengeluaran Pemerintah Pusat	9,3	9,8	9,8	9,7	10,2		
Transfer ke daerah dan Dana Desa	5,5	5,2	5,2	5,4	5,1		
Saldo Keseluruhan	-2,5	-2,2	-2,1	-1,9	-1,8		
<b>Asumsi:</b>							
Tingkat pertumbuhan PDB riil (%)	5,1	5,4	5,2	5,2	5,3		
IHK (%)	3,6	3,5	3,5	3,2	3,5		
Nilai tukar (Rp/USD)	13.384	13.400	14.294	14.200	15.000		
Harga minyak mentah (USD/barrel)	51,2	48,0	70,0	69,5	70,0		

Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan Staff Bank Dunia.

**Sementara perkiraan pertumbuhan ekonomi tetap positif, dengan adanya peningkatan downside risks**

**Risiko eksternal terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi termasuk meningkatnya sengketa perdagangan yang berlarut-larut, gejala di pasar keuangan dan modal, pengetatan kondisi keuangan, dan penyangga yang tidak memadai untuk stabilisasi kebijakan**

Meskipun baru-baru ini ada dari arus modal keluar dari negara-negara pasar berkembang (*emerging markets*, EM) cukup tertahan dan adanya pelemahan nilai tukar Rupiah, risiko yang merugikan terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bagaimanapun juga, tetaplah substansial.

Ketidakpastian seputar kebijakan perdagangan global terus menimbulkan risiko terhadap perkiraan pertumbuhan negara-negara besar regional, seperti Cina. Negara-negara lain seperti Vietnam dan Malaysia, yang berperan dalam *regional supply chains* juga dapat mengalami efek limpahan (*spillover*) negatif dari potensi pelambatan ekonomi di Cina. Oleh karena itu, persistensi atau eskalasi perselisihan tersebut terus menimbulkan risiko signifikan bagi perekonomian Indonesia melalui ekspor yang lebih lemah dan harga komoditas yang rendah.

Pada saat yang sama, kelanjutan potensi pengetatan kebijakan moneter The Fed dapat menyebabkan lebih banyak arus modal keluar dan gejala keuangan di antara negara-negara EM, termasuk Indonesia. Imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat menghambat pemulihan kredit yang baru mulai berlangsung dan oleh karenanya dapat menghambat investasi swasta.

**Indonesia harus mengambil kesempatan untuk membangun kembali dan memperkuat penyangga kebijakan**

Sampai saat ini, Indonesia telah mampu melalui gejala dengan cukup baik, terutama karena memiliki fundamental ekonomi makro yang sehat dan penyangga (*buffer*) yang memadai yang memungkinkan terkoordinasinya kerangka kebijakan moneter, fiskal dan nilai tukar. Inflasi yang stabil dan rendah, memungkinkan kebijakan moneter untuk berfokus pada stabilisasi nilai tukar. Reformasi fiskal baru-baru ini telah meningkatkan kepatuhan dan *enforcement*, sehingga pertumbuhan penerimaan fiskal mencapai nilai yang tertinggi dalam beberapa tahun ini, sehingga memungkinkan Pemerintah untuk meningkatkan belanja yang mendorong pertumbuhan maupun melakukan konsolidasi fiskal. Yang terakhir, cadangan devisa yang mencapai rekor tertinggi berkontribusi terhadap upaya untuk mengatasi depresiasi Rupiah selama masa gejala nilai tukar yang berlarut-larut ini.

Dengan kembalinya arus masuk modal dan menguatnya kemungkinan apresiasi nilai Rupiah, sudah waktunya bagi Indonesia untuk membangun kembali cadangan devisa dengan mempertahankan penyangga yang cukup besar guna memungkinkan pengelolaan lebih lanjut dari gejala nilai tukar, jika gejala tersebut kembali muncul dalam waktu dekat. Dengan cara yang serupa, reformasi penting lainnya seperti yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan fiskal dan peningkatan kualitas belanja harus terus memperkuat kebijakan fiskal lebih lanjut.

## B. Meningkatkan ekspor dan investasi di Indonesia: Salah satu agenda reformasi



Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, yang didukung oleh landasan-landasan ekonomi makro yang seimbang serta pasar komoditas dan struktur demografi yang relatif menguntungkan. Akan tetapi, gejolak global baru-baru ini telah menyingkap beberapa kerentanan yang dimiliki Indonesia, khususnya ketergantungan pada arus modal portofolio yang tidak stabil untuk membiayai defisit transaksi berjalan. Sebagian dari kerentanan tersebut disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekspor dan penanaman modal asing (FDI), yang akhirnya menambah tantangan dalam upaya penguatan daya saing Indonesia. Kerentanan Indonesia semakin jelas dengan menurunnya pangsa ekspor manufaktur global, rendahnya rasio nilai investasi asing terhadap PDB, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja yang sebagian besar merupakan akibat dari sederet kebijakan yang memperbesar biaya dan mengurangi kualitas maupun ketersediaan input fisik, jasa, dan tenaga kerja untuk produksi. Distorsi-distorsi ini mencakup berbagai hambatan regulasi, seperti pembatasan perdagangan dan investasi; inefisiensi pasar tenaga kerja dan pasar modal yang memperbesar biaya tenaga kerja dan pembiayaan perusahaan; serta kekurangan infrastruktur, termasuk energi dan transportasi.

Agenda kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan investasi harus mengatasi distorsi-distorsi tersebut melalui reformasi jangka pendek dan jangka menengah (Kotak B.1). Reformasi yang akan dilaksanakan juga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan insentif pajak yang memakan biaya relatif besar dalam upaya menarik investasi oleh pemerintah Indonesia, mengingat dampak dari insentif pajak masih akan tetap minim tanpa didampingi reformasi struktural.

### Kotak B.1: Agenda reformasi kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan investasi

Agenda reformasi kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan investasi harus mengatasi distorsi-distorsi yang ada pada pasar utama melalui enam reformasi jangka pendek dan empat reformasi jangka menengah.

Reformasi jangka pendek meliputi:

- mengurangi kebijakan tarif dan non-tarif (tertentu) terhadap impor;
- melaksanakan perjanjian perdagangan bebas secara ambisius;
- melonggarkan pembatasan investasi;
- mengizinkan penambahan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan sangat langka dari luar negeri;
- mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM); dan
- meningkatkan kemampuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mencegah praktek-praktek anti persaingan dalam dunia usaha.

Reformasi jangka menengah meliputi:

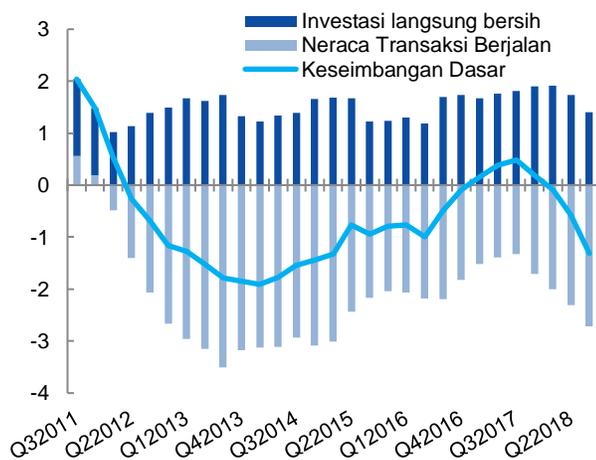
- memasukkan pertimbangan-pertimbangan persaingan dalam proses pembuatan kebijakan Indonesia dan memperkuat otoritas pengawas persaingan usaha;
- memperkuat sistem pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;
- memperkuat infrastruktur energi dan transportasi dengan memanfaatkan investasi swasta di sektor-sektor ini—termasuk dengan mengurangi subsidi untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menambah tender terbuka melalui penyederhanaan kerangka hukum kemitraan publik-swasta (PPP), serta memperluas pasar perbankan dan pasar modal lokal.

### 1. Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya di tingkat global guna memperkuat ketahanan dari berbagai guncangan yang terjadi dan menuai kesempatan-kesempatan yang ada dari lingkungan global saat ini

**Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan landasan-landasan ekonomi makro yang sehat**

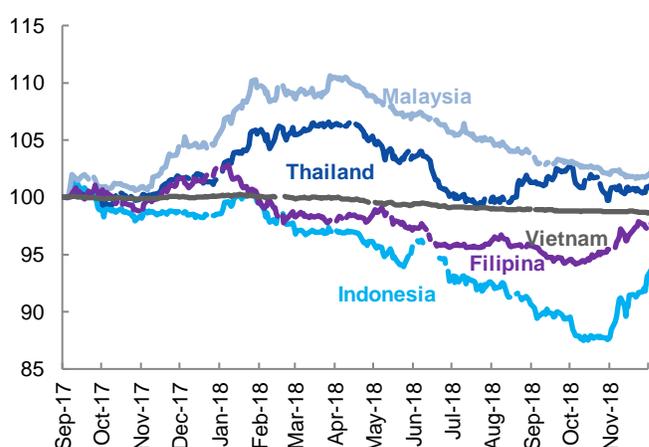
Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat di sekitar 5 persen per tahun secara riil sejak tahun 2012, yang didukung oleh landasan-landasan ekonomi makro yang sehat, termasuk rendahnya tingkat defisit fiskal, utang publik, dan inflasi. Meskipun terjadi penurunan dari puncaknya pada tahun 2011, harga-harga komoditas masih cukup baik dan menjadi penggerak utama perluasan ekonomi. Selain itu, Indonesia masih memperoleh dividen dari struktur demografi yang memungkinkan jutaan orang bergabung dengan angkatan kerja setiap tahun.

**Gambar B.1: Defisit transaksi berjalan melebar bersamaan dengan keseimbangan dasar**  
(rata-rata bergerak 4 triwulan, persen dari PDB)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data BI

**Gambar B.2: Rupiah lebih terdepresiasi dibandingkan dengan mata uang regional lainnya**  
(USD/mata uang lokal – 1 Sep 2017 = 100)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data BI

**Akan tetapi, lambatnya pertumbuhan ekspor dan penanaman modal asing/PMA (FDI) memperbesar ketergantungan Indonesia pada**

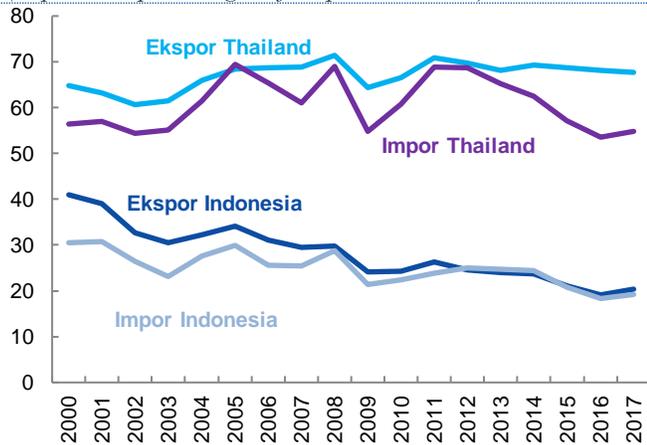
Terlepas dari kinerja ekonomi makro yang positif, gejala global baru-baru ini telah menyingkapkan beberapa kerentanan yang dimiliki Indonesia. Defisit transaksi berjalan Indonesia meningkat sepanjang tahun 2018 yang mencapai 3,4 persen dari PDB pada triwulan ketiga tahun tersebut (Gambar B.1).<sup>47</sup> Defisit yang melebar ini sebagian disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang lamban dan pertumbuhan impor yang berkelanjutan, terutama barang modal. Pertumbuhan impor ini berhubungan dengan diperbaharainya kerja sama investasi di sektor pertambangan setelah harga-harga komoditas menguat dan dengan promosi infrastruktur oleh Pemerintah dalam tiga tahun terakhir. Karena besarnya kesenjangan infrastruktur di

<sup>47</sup> Gambar ini didasarkan pada rata-rata bergerak 4 triwulan.

portofolio jangka pendek yang tidak stabil, yang sebagian besar telah meninggalkan Indonesia selama terjadinya gejolak global baru-baru ini.

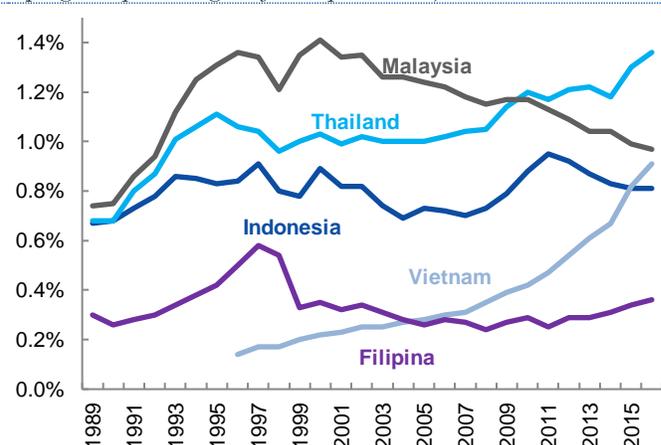
Indonesia dan adanya potensi ekspor pertambahan di masa mendatang, tingkat pertumbuhan impor yang tinggi tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebaliknya, yang menjadi masalah adalah lambatnya pertumbuhan ekspor dan menurunnya FDI yang, dalam beberapa triwulan terakhir, belum dapat menutupi defisit transaksi berjalan. Akibatnya, Indonesia semakin bergantung pada arus portofolio jangka pendek untuk membiayai defisit transaksi berjalan.<sup>48</sup> Arus portofolio tersebut lebih bergejolak daripada FDI dan cenderung keluar dari negara-negara ekonomi berkembang (*emerging economies*) ke negara-negara yang aman (*safe haven destinations*) selama masa-masa ketidakpastian global. Itulah yang terjadi selama beberapa bulan terakhir akibat ketegangan dan gejolak perdagangan yang berkaitan dengan negara-negara ekonomi berkembang besar tertentu lainnya. Hal ini menyebabkan Rupiah lebih terdepresiasi terhadap USD daripada mata uang regional lainnya antara Maret sampai Oktober 2018 (Gambar B.2), sekalipun terdapat landasan ekonomi makro yang sehat dan pengetatan kebijakan moneter dan fiskal domestik (lihat Bagian A5).

**Gambar B.3: Kisah dua negara: Keterbukaan perdagangan di Indonesia vs Thailand**  
(ekspor dan impor barang dan jasa, persen dari PDB)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia dan Bank Thailand

**Gambar B.4: Total ekspor Indonesia kehilangan pangsa pasar selama beberapa dekade terakhir**  
(pangsa ekspor barang dan jasa di pasar dunia)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia

Indonesia berpotensi besar untuk meningkatkan ekspornya ke level yang mendekati level di negara-negara setara lain di kawasan regional.

Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspornya ke level yang mendekati level di negara-negara setara lain di kawasan regional. Ekspor barang dan jasa Indonesia mencapai sekitar 20 persen dari PDB, separuh dari 40 persen pada tahun 2000 (Gambar B.3). Pangsa ekspor tersebut jauh lebih rendah daripada Thailand, negara yang hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kerentanan eksternal terhadap gejolak global baru-baru ini (Gambar B.2), karena ekspornya mengalami pertumbuhan yang kuat selama dua dekade terakhir. Seperti kebanyakan negara di kawasan regional, ekspor menjadi bagian utama dari perekonomian Thailand, yang mencapai hampir 70 persen dari PDB, di mana pangsa ini tetap stabil dari waktu ke waktu. Di Indonesia maupun Thailand, impor juga sangat dipengaruhi oleh ekspor dalam hal jumlah dan pertumbuhan, sesuai dengan kebutuhan impor untuk ekspor. Demikian pula, kinerja ekspor Indonesia di pasar global kurang memuaskan. Nilainya terus berkurang sejak tahun 2000, kecuali selama masa kejayaan harga komoditas (*commodity boom*) (tahun 2007–11) (Gambar B.4). Pada tahun 2016—yaitu tahun terakhir ketika tersedia data perdagangan global pembandingan—pangsa ekspor barang dan jasa Indonesia di pasar global mencapai 0,81 persen, turun dari pangsa tahun 2011 sebesar 0,95 persen dan bahkan dari 0,91 persen pada saat terjadinya krisis Asia. Tren ini berlawanan dengan yang dialami Vietnam dan Thailand, yang pangsa pasar globalnya terus

<sup>48</sup> Ini terlihat pada defisit keseimbangan dasar yang semakin melebar, yaitu FDI – defisit transaksi berjalan, yang mencapai 1,3 persen dari PDB pada triwulan 3 tahun 2018.

mengalami peningkatan sejak tahun 2000. Eksportir komoditas utama lain di kawasan regional, yaitu Malaysia, mengalami penurunan pangsa pasar global secara bertahap, tetapi masih lebih tinggi daripada pangsa Indonesia, meskipun ukuran perekonomian Malaysia hanya sepertiga dari Indonesia.

**Potensi ekspor meliputi berbagai sektor sebagaimana diilustrasikan, misalnya, dengan kasus hortikultura, produk elektronik, dan transportasi laut.**

Potensi pertumbuhan ekspor Indonesia meliputi berbagai sektor sebagaimana diilustrasikan, misalnya, dengan kasus hortikultura, produk elektronik, dan transportasi laut. Ekspor hortikultura dan elektronik Indonesia jauh lebih rendah dan kurang dinamis dibandingkan dengan ekspor dari negara-negara setara lain di kawasan regional (lihat Kotak B.2), meskipun sumber daya yang dimiliki berupa tanah yang subur dan tenaga kerja yang melimpah menjadi kesempatan yang baik untuk memanfaatkan pasar global yang berkembang dengan pesat. Demikian pula, meskipun letak Indonesia terbentang di sepanjang kepulauan terbesar di dunia, tidak satu pun perusahaan pengiriman angkutan laut Indonesia termasuk di antara 30 perusahaan teratas dunia berdasarkan pangsa pasarnya, dibandingkan dengan negara seperti Singapura dengan dua perusahaan yang berperingkat 20 teratas (UNCTAD, 2017).<sup>49</sup> Potensi ini juga berlaku bagi ekspor jasa pelabuhan: operator pelabuhan Indonesia tidak aktif di tingkat internasional, berbeda dengan operator-operator regional lain seperti Pelabuhan Singapura dan ICTS Filipina yang masing-masing berperingkat kedua dan ketujuh terbesar di dunia dalam hal investasi, yang terdiri dari lusinan proyek di seluruh dunia (UNCTAD, 2017).

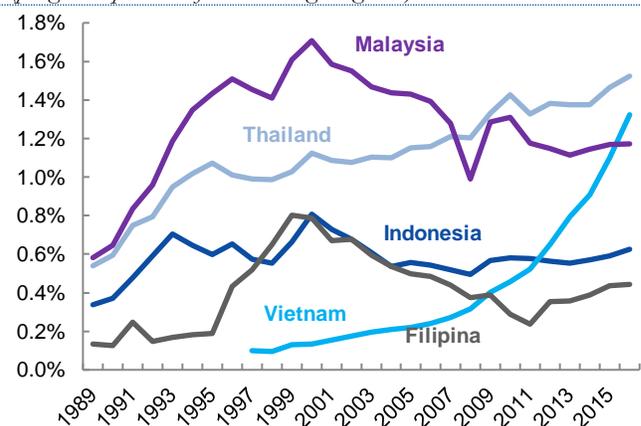
**Di sektor manufaktur, pangsa ekspor Indonesia di tingkat global dan PDB mengalami penurunan, berbeda dengan negara-negara lain di kawasan regional.**

Sebagian besar penurunan ekspor Indonesia di pasar global disebabkan oleh turunnya pangsa ekspor manufaktur, berbeda dari situasi di negara-negara lain yang berorientasi ekspor di kawasan. Pangsa pasar Indonesia dalam ekspor manufaktur global mencapai 0,6 persen pada tahun 2016, jauh lebih rendah dibandingkan dengan puncak 0,8 persen pada tahun 2000 dan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan pangsa tahun 1993 sebesar 0,7 persen (Gambar B.5).<sup>50</sup> Angka ini tampaknya belum sesuai dengan potensi Indonesia

sebenarnya, mengingat Indonesia adalah negara terbesar di kawasan dan pangsa pasar Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara besar lain.<sup>51</sup> Dalam periode yang sama, pangsa manufaktur Vietnam dan Thailand di pasar global mengalami peningkatan; pangsa Vietnam bertumbuh 10 kali lipat sejak tahun 2000 dan telah menjadi salah satu eksportir manufaktur dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Stagnasi daya saing manufaktur Indonesia di pasar global juga tercermin dari penurunan rasio manufaktur terhadap PDB. Penurunan ini biasa terjadi pada negara-negara yang mengalami pergeseran status dari berproduksi menengah ke berproduksi tinggi. Akan tetapi, Indonesia mengalami deindustrialisasi sebelum pergeseran

**Gambar B.5: Naik turun daya saing manufaktur Indonesia**

(pangsa ekspor manufaktur di tingkat global)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia

<sup>49</sup> Data sistematis tentang ekspor dan impor transportasi laut tidak tersedia.

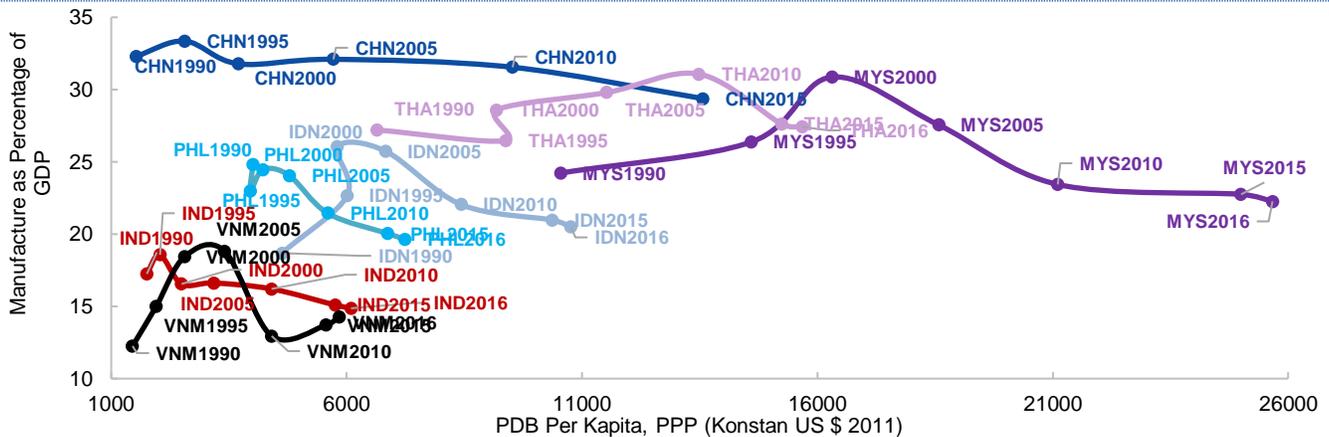
<sup>50</sup> Selama periode yang sama, pangsa ekspor komoditas Indonesia di tingkat global hampir tidak bergerak pada kisaran 1,7 persen kecuali puncaknya tahun 2007–11.

<sup>51</sup> Satu-satunya perkecualian adalah Filipina. Akan tetapi, secara relatif, ekspor manufaktur Indonesia masih belum maksimal, bahkan meskipun dibandingkan dengan Filipina karena pangsa global Filipina mencapai 70 persen dari pangsa Indonesia sedangkan ukuran ekonominya hanya sepertiga dari Indonesia.

status tersebut, di mana sektor manufaktur telah mulai menyusut pada tingkat penghasilan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penghasilan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand ketika mereka mulai mengalami deindustrialisasi (Gambar B.6). “Deindustrialisasi prematur” ini (Rodrik 2016) bukan merupakan kabar baik bagi Indonesia karena berisiko akan mengurangi kualitas kerja maupun pertumbuhan produktivitas di seluruh Indonesia, yang lazimnya lebih tinggi terjadi pada manufaktur dibandingkan dengan sektor-sektor lain (Rodrik 2012).

**Gambar B.6: Apakah deindustrialisasi prematur terjadi di Indonesia?**

(pangsa manufaktur dalam PDB vs. PDB per kapita)



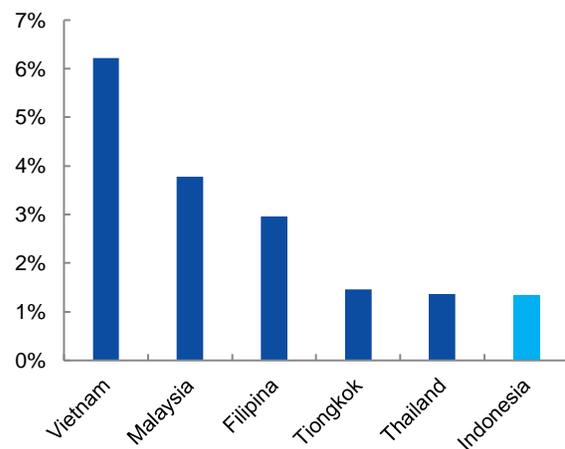
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia dan Diop (2016)

**Indonesia dapat melakukan lebih banyak untuk menarik dan mempertahankan FDI, yang masih rendah bila dibandingkan dengan ukuran perekonomiannya – khususnya FDI berorientasi ekspor yang sangat dibutuhkan.**

Pada saat yang sama, Indonesia juga dapat melakukan lebih banyak untuk menarik FDI—khususnya yang berorientasi ekspor—guna mengamankan sumber yang sangat dibutuhkan bagi pembiayaan eksternal dan pertumbuhan ekspor yang stabil. Meskipun persentase arus masuk FDI terhadap PDB, yang masih rendah menurut standar regional (Gambar B.7), mengalami peningkatan selama dua dekade terakhir, nilainya terus menyusut dalam 3 tahun terakhir.<sup>52</sup> Sebagian besar FDI yang masuk ke Indonesia didorong oleh keinginan untuk menggali dan/atau memproses sumber daya alam atau untuk melayani pasar domestik yang besar. Di pihak lain, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya menarik FDI yang mencari efisiensi, biasanya untuk mendapatkan basis produksi yang efisien untuk ekspor. Menarik investasi itu penting karena investasi menghasilkan banyak lapangan pekerjaan dengan gaji tinggi dan sering kali menjadi sumber produk dan teknologi produksi baru bagi negara penyelenggaranya. Gambar B.8 memperlihatkan bahwa, di sektor

**Gambar B.7: Arus masuk FDI ke Indonesia masih belum maksimal**

(Arus masuk FDI sebagai persentase dari PDB, rata-rata, 2016–17)



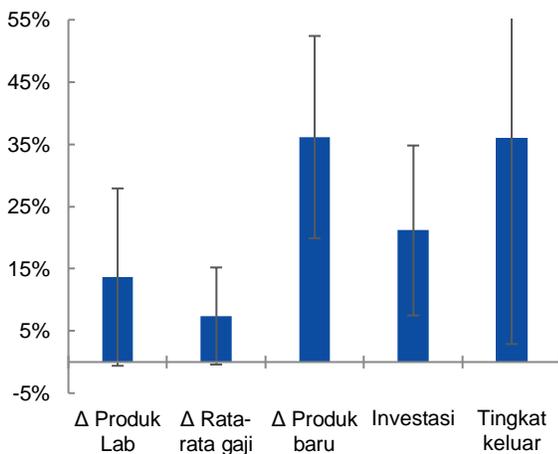
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia

<sup>52</sup> Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), FDI turun dari 3,3 persen PDB pada tahun 2014–15 menjadi 3,1 persen pada tahun 2016–17; padahal menurut data dari Bank Indonesia untuk periode yang sama, FDI turun dari 2,2 persen menjadi 1,3 persen PDB.

manufaktur, FDI yang berorientasi ekspor mengungguli FDI yang berorientasi pasar domestik, dalam hal pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, upah rata-rata, jumlah produk baru serta tingkat investasi selama periode tahun 2008-15. Pada saat yang sama, FDI yang berorientasi ekspor memiliki kemungkinan lebih besar untuk meninggalkan Indonesia karena investasi ini lebih sensitif terhadap kemunduran iklim usaha dibandingkan FDI manufaktur lainnya, yang lebih bergantung pada pasar domestik yang besar. FDI manufaktur di Indonesia semakin berorientasi untuk melayani pasar domestik ketimbang pasar global, yang menandakan bahwa Indonesia telah kehilangan daya saingnya di sektor manufaktur. Pada tahun 2014, industri manufaktur asing baru di Indonesia yang berorientasi ekspor hanya mencapai 35 persen, turun secara signifikan dari 58 persen pada tahun 1996 (Gambar B.9).<sup>53</sup> Penurunan ini bahkan lebih menonjol ketika kita memperhitungkan sektor yang secara historis sudah berorientasi ekspor seperti elektronik di mana pangsa industri berorientasi ekspor dibandingkan dengan seluruh pabrik asing baru anjlok dari 67 persen menjadi hanya 17 persen. Penurunan FDI berorientasi ekspor menyebabkan penurunan nilai FDI maupun ekspor secara keseluruhan dan akhirnya penurunan pendapatan devisa, sehingga membuat Indonesia semakin rentan terhadap guncangan eksternal.

**Gambar B.8: FDI berorientasi ekspor mengungguli FDI berorientasi pasar domestik di sektor manufaktur namun memiliki kemungkinan lebih besar untuk meninggalkan Indonesia**

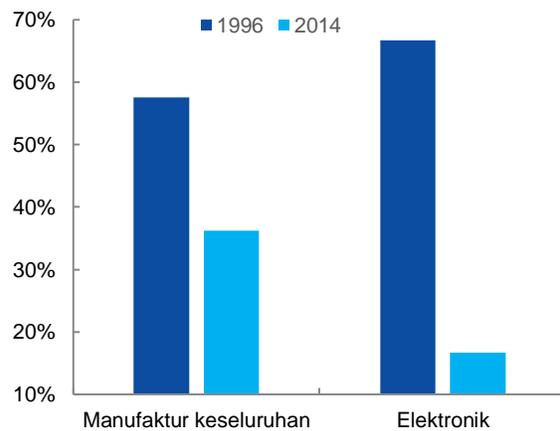
(perubahan persentase pada industri asing yang berorientasi pasar domestik, 2008-2015)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data Statistik Industri.  
Catatan: Batang-batang pada grafik menggambarkan estimasi angka dengan interval kepercayaan 95 persen terhadap regresi variabel hasil di tingkat industri dalam grafik (yang dihitung untuk periode 2008-15) sehubungan dengan model industri yang berorientasi ekspor (didefinisikan sebagai ekspor jika > 50 persen penjualan) dalam sampel industri asing yang dimasukkan dalam data, yang menguasai model-model sektor KBLI 2 digit.

**Gambar B.9: Penurunan pangsa investasi asing berorientasi ekspor yang baru di sektor manufaktur dan elektronik**

(rasio industri berorientasi ekspor terhadap seluruh industri asing, baru dan lama)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data Statistik Industri.  
Catatan: Yang dimaksud dengan industri baru adalah industri yang berusia 3 tahun ke bawah; industri lama adalah industri yang berusia lebih dari 3 tahun. Industri asing adalah industri yang lebih dari 50 persen sahamnya dimiliki pihak asing. Industri yang berorientasi ekspor adalah industri yang mengekspor lebih dari 50 persen nilai penjualannya.

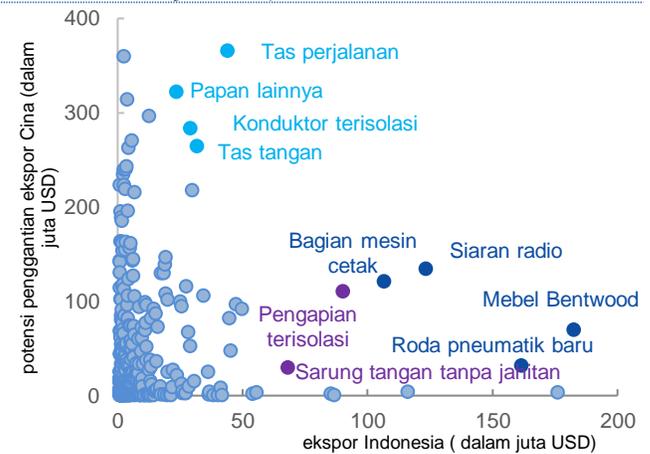
<sup>53</sup> Selain itu, data dari Survei Industri Besar dan Sedang memperlihatkan bahwa industri asing yang berorientasi ekspor juga mempunyai kemungkinan 36 persen lebih tinggi untuk meninggalkan Indonesia daripada industri-industri asing lain yang berorientasi domestik selama periode tahun 2008-15.

Jika berkepanjangan, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina memberikan kesempatan yang unik untuk meningkatkan ekspor dan investasi asing karena ekspor Cina ke Amerika Serikat anjlok dan para investor berupaya menghindari tarif impor dengan memindahkan produksi mereka ke Asia Tenggara

Kondisi global saat ini bukan hanya mengingatkan Indonesia tentang pentingnya meningkatkan ekspor dan investasi asing melainkan juga memberikan kesempatan yang unik untuk melakukannya. Secara khusus, ketegangan perdagangan yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Cina telah menyebabkan kedua negara itu menaikkan tarif atas sebagian besar barang impor antara kedua negara.<sup>54</sup> Meskipun telah menimbulkan ketidakpastian pada perdagangan dan pasar keuangan global, peningkatan tarif impor tersebut juga memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk menggantikan ekspor di kedua pasar terbesar di dunia itu. Potensi terbesar untuk negara-

negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah untuk menggantikan ekspor Cina ke Amerika Serikat mengingat kemiripan 'keranjang ekspor' mereka. Hasil perhitungan Bank Dunia menunjukkan bahwa penurunan impor AS dari Cina untuk produk-produk yang dikenakan kebijakan tarif impor dapat mencapai hampir USD70 miliar (Cali 2018). Penurunan ini mencakup produk-produk yang sudah diekspor ke Amerika Serikat oleh Indonesia dan, dengan demikian, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menggantikan Cina. Ekspor Cina ke Amerika Serikat untuk produk-produk tersebut mencapai 1 persen PDB Indonesia berdasarkan nilai tambah domestik, dan meliputi barang-barang mulai dari tas perjalanan sampai suku cadang printer dan ban angin (*pneumatic tires*) (Gambar B.10). Selain itu, ketegangan perdagangan juga mengalihkan investasi dari Cina dan Amerika Serikat karena para investor berupaya menghindari lonjakan tarif impor. Hasil survei baru-baru ini memperlihatkan bahwa dua per tiga perusahaan di Cina Selatan berencana merelokasi sebagian produksi mereka keluar Cina dan separuh dari mereka berencana akan merelokasi seluruh produksinya sebagai akibat memuncaknya ketegangan perdagangan<sup>55</sup>. Sebagian besar berencana untuk pindah ke Asia Tenggara dan bukti awal menunjukkan bahwa Vietnam dan Thailand khususnya telah menikmati peningkatan investasi akibat adanya ketegangan perdagangan tersebut.<sup>56</sup>

**Gambar B.10: Indonesia berpotensi menggantikan ekspor China ke AS dengan berbagai produknya**  
(Perkiraan penurunan ekspor Cina ke AS vs ekspor Indonesia ke AS tahun 2017, juta USD)



Sumber: Estimasi Bank Dunia berdasarkan data USTR, biro sensus AS dan Kee et al. (2008)

Catatan: Produk-produk yang ada di bagian kanan atas mempunyai potensi penggantian terbesar.

## 2. Distorsi di pasar faktor produksi utama melemahkan daya saing ekspor dan arus investasi

Agar dapat memanfaatkan peluang ini,

Agar dapat memanfaatkan peluang ini, Indonesia perlu meningkatkan daya saing perekonomiannya dan merealisasikan potensinya sebagai negara tujuan investasi dan basis produksi kelas dunia. Kinerja ekspor dan investasi asing yang relatif lemah dapat menjadi

<sup>54</sup> Khususnya, antara bulan Juli dan September tahun ini, Amerika Serikat telah mengenakan tarif impor sebesar 10 persen dan 25 persen atas impor dari Cina senilai USD 235 miliar (tarif impor 10 persen akan dinaikkan menjadi 25 persen mulai Januari 2019). Sebagai pembalasan, Cina telah menaikkan tarif impor menjadi 25 persen atas sebagian besar impor senilai USD130 miliar dari Amerika Serikat.

<sup>55</sup> Kamar Dagang Amerika di Cina Selatan (2018).

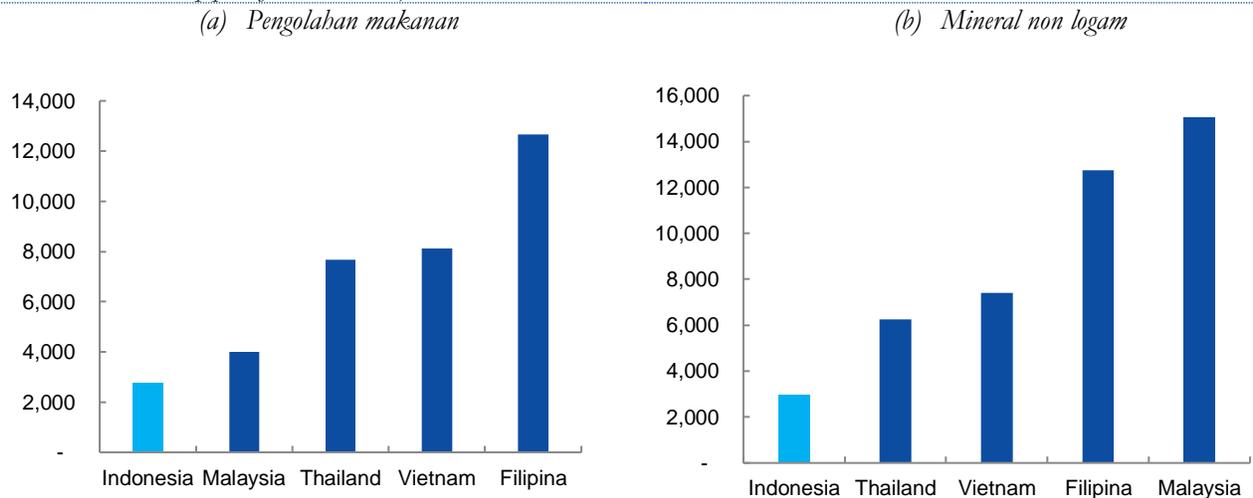
<sup>56</sup> Misalnya, China GoerTek sedang memindahkan produksi wireless earphones AirPods ke Vietnam, dan Cheng Uei, yang menyuplai charger dan connector untuk telepon cerdas (smartphone) iPhones dan Android, sedang mengevaluasi fasilitas barunya di Thailand, Vietnam, dan Filipina (Ting-Fan dan Li 2018). Perpindahan tersebut juga melibatkan sektor-sektor lain, termasuk suku cadang kendaraan oleh perusahaan Jepang Yukowo yang memindahkan produksi komponen antenna mobilnya ke Vietnam, dan Panasonic yang memindahkan produksi elektronik mobilnya ke Thailand, Malaysia, dan Meksiko, demikian pula dengan Daikin Industries yang memindahkan produksi kompresornya ke Thailand dan Malaysia (Nikkei Asian Review 2018).

### Indonesia perlu memperkuat daya saingnya

penyebab maupun akibat dari rendahnya produktivitas perusahaan di Indonesia. Bahkan berbagai jenis industri seperti pengolahan makanan yang bersifat padat karya dan mineral (bahan galian) non-logam yang bersifat padat modal di Indonesia mengalami ketimpangan daya saing dibandingkan dengan negara-negara komparator di kawasan regional (Gambar B.11). Karena rendahnya produktivitas, perusahaan-perusahaan Indonesia tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan negara lain di pasar global. Akibatnya, ekspor dan FDI yang rendah semakin memperlambat pertumbuhan produktivitas perusahaan, karena kurangnya akses mereka terhadap teknologi, pasar dan keterampilan global.

#### Gambar B.11: Produktivitas Indonesia harus menyusul negara-negara komparator

(nilai tambah median tiap pekerja, USD 2015)



Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Badan Usaha dari Bank Dunia

Catatan: Data untuk Indonesia, Vietnam, Malaysia dan Filipina berasal dari tahun 2015. Data untuk Thailand berasal dari tahun 2016.

### Meskipun serangkaian reformasi ekonomi telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, distorsi di pasar faktor produksi utama masih melemahkan daya saing Indonesia

Meskipun Pemerintah Indonesia telah melaksanakan serangkaian reformasi kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, distorsi di pasar faktor produksi utama masih melemahkan daya saing Indonesia. Indonesia telah meluncurkan 16 paket kebijakan ekonomi sejak September 2015, dengan tujuan untuk mengurangi biaya melakukan usaha. Reformasi yang dilaksanakan meliputi penyederhanaan proses impor-ekspor sampai pengurangan berbagai hambatan (*barriers to entry*) di sektor-sektor tertentu dan merevisi formulasi penghitungan upah minimum. Meskipun sejumlah reformasi yang dilakukan merupakan langkah ke arah yang tepat, berbagai distorsi berdampak pada meningkatnya biaya dan menurunnya kualitas dan ketersediaan faktor-faktor utama produksi yang melemahkan daya saing industri Indonesia. Ini mencakup hambatan regulasi seperti restriksi perdagangan dan investasi, inefisiensi pasar tenaga kerja dan modal, dan kekurangan infrastruktur. Banyak dari distorsi tersebut mungkin menjadi lebih berpengaruh ketika terdapat peningkatan permintaan untuk customized products (*customization*) dan tekanan yang semakin besar untuk meluncurkan produk baru dalam waktu singkat, peningkatan peranan input jasa dalam produksi manufaktur (“servisifikasi”) dan peningkatan penerapan otomatisasi. Faktor-faktor tersebut lebih menekankan akses dan keterhubungan dengan pasar input dan output serta kemampuan pekerja, perusahaan dan negara untuk mengadopsi teknologi baru.<sup>57</sup>

#### Restriksi perdagangan dan investasi

### Indonesia telah meningkatkan hambatan impor

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia secara bertahap telah meningkatkan hambatan impor barang yang meliputi tarif dan hambatan non-tarif (NTM), yang menambah biaya dan mengurangi ketersediaan input. Antara tahun 2009 dan 2017, Indonesia menerapkan tambahan

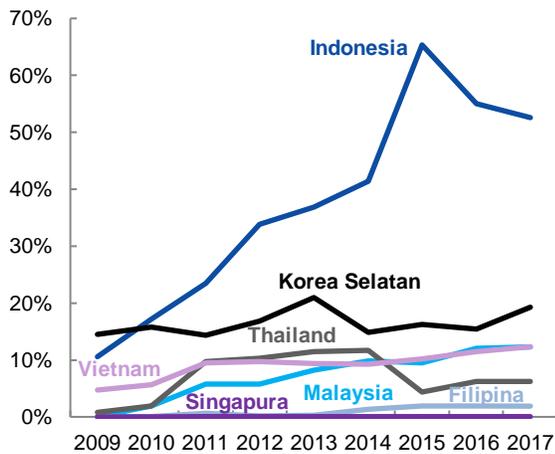
<sup>57</sup> Hallward-Driemeier dan Nayar (2017).

barang, termasuk tarif dan tindakan-tindakan non-tarif melebihi negara-negara lain

hambatan impor dalam porsi yang jauh lebih besar daripada negara-negara lain di kawasan regional (Gambar B.12). Ini telah menyebabkan kenaikan tingkat proteksi perdagangan (NRP) Indonesia (Gambar B.13).<sup>58</sup> Harga pangan domestik tahun 2015 rata-rata 33 persen lebih tinggi daripada harga tanpa restriksi perdagangan, lebih dari dua kali lipat NRP pada tahun 2008 (Marks 2017). Kenaikan serupa pada NRP diamati terjadi di sektor-sektor utama lain, termasuk yang digunakan sebagai produk antara (*intermediates*) dalam produksi, seperti tanaman pangan, ternak, peralatan modal dan logam. Akibatnya, kebijakan perdagangan yang restriktif tersebut meningkatkan biaya produksi yang harus ditanggung oleh produsen domestik, dan juga biaya hidup rumah tangga.

**Gambar B.12: Indonesia telah meningkatkan hambatan perdagangannya jauh melebihi negara-negara setara lain sejak tahun 2009**

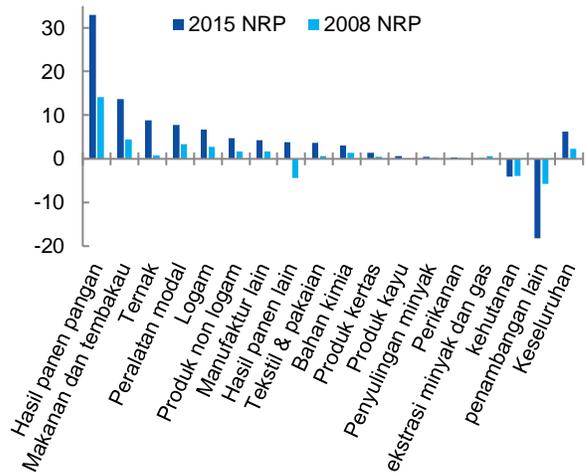
(pangsa nilai impor yang dikenakan restriksi impor baru)



Sumber: Global Trade Alert  
[https://www.globaltradealert.org/data\\_extraction](https://www.globaltradealert.org/data_extraction) (diakses 1 November 2018)

**Gambar B.13: Karena hambatan perdagangan meningkat, demikian pula dengan tingkat proteksi perdagangan (NRP)**

(Selisih harga dibandingkan dengan skenario perdagangan bebas, persen)



Sumber: Marks (2017)  
Catatan: NRP negatif menunjukkan subsidi produksi dan/atau ekspor.

<sup>58</sup> NRP dihitung sebagai selisih antara harga domestik yang disurvei dan harga yang berlaku dalam sistem perdagangan bebas, sehingga menghasilkan estimasi dampak dari semua tindakan distorsi perdagangan (tarif dan non-tarif) terhadap harga-harga domestik.

**Indonesia menaikkan tingkat tarif impor, yang kemudian memperbesar biaya dan/atau menurunkan kualitas input produksi**

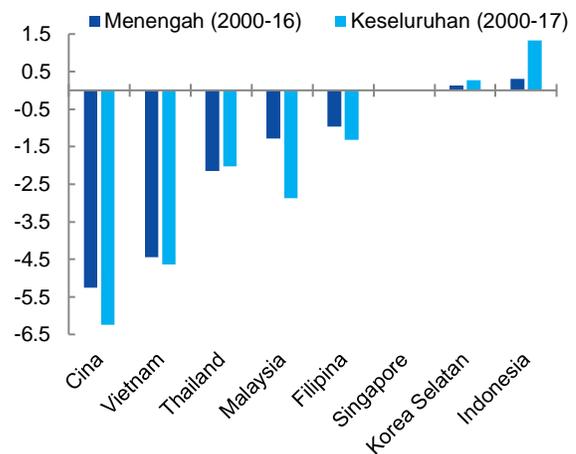
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menaikkan tarif impor, yang memperbesar biaya input produksi dan barang konsumsi, berlawanan dengan trend penurunan tarif di kawasan ini. Antara tahun 2000 dan 2017, Indonesia telah menaikkan tarif impor rata-rata sebesar 1,3 persen dan tarif impor atas produk antara sebesar 0,3 persen (Gambar B.14). Meskipun Indonesia awalnya menerapkan tarif impor yang relatif rendah, kecenderungannya seraya waktu berjalan bertolak belakang dengan kebanyakan negara lain di Asia Timur, yang menurunkan tarif impor mereka secara substansial. Tarif impor juga diterapkan dalam bentuk kebijakan anti-dumping atas sejumlah produk—termasuk baja dan benang—untuk melindungi produsen domestik dari persaingan impor yang dianggap tidak seimbang. Bukti empiris memperlihatkan bahwa kenaikan tarif impor yang besar dapat mengurangi produktivitas dan output perusahaan di sektor-sektor yang dilindungi karena persaingan impor yang lebih rendah mengurangi insentif untuk berinvestasi dan meningkatkan efisiensi.<sup>59</sup> Bukti ini juga berlaku bagi Indonesia di mana kenaikan tarif melemahkan daya saing sektor-sektor hilir, dengan bertambahnya biaya dan/atau menurunnya kualitas input produksi.<sup>60</sup>

**Indonesia juga telah memperluas penerapan hambatan non-tarif (NTM) atas impor barang, yang seringkali didasarkan pada alasan kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, tetapi disisi lain memperbesar biaya impor secara signifikan**

Indonesia juga telah memperluas hambatan non-tarif (NTM) atas impor barang yang seringkali didasarkan pada pertimbangan kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, tetapi berdampak pada peningkatan biaya impor secara signifikan. Perluasan penerapan NTM telah dilakukan untuk berbagai kategori impor, khususnya barang modal dan produk antara (Gambar B.15). Tindakan-tindakan non-tarif terdiri dari perizinan dan pemeriksaan impor yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor aman bagi konsumen dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat atau lingkungan, seperti penyakit yang dibawa oleh tumbuhan dan hewan yang diimpor, atau bahaya keselamatan dari barang-barang yang digunakan oleh anak-anak. Meskipun sebagian tindakan ini bisa dibenarkan, tindakan-tindakan lainnya tampaknya bisa memperbesar biaya impor yang tidak perlu. Hasil analisis Bank Dunia baru-baru ini memperlihatkan bahwa tindakan kebijakan seperti monopoli impor oleh badan usaha milik negara (BUMN) secara signifikan memperbesar biaya impor tanpa manfaat yang jelas bagi perekonomian (Gambar B.16). Demikian pula, biaya impor yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan kesesuaian kualitas produk menunjukkan perlunya meninjau kembali kebutuhan produk maupun sistem sertifikasi yang ada.<sup>61</sup> Potensi untuk merasionalisasi NTM guna menekan

**Gambar B.14: Indonesia telah menaikkan tingkat tarif impor terapan rata-rata lebih tinggi daripada negara-negara setara lain**

(perubahan persentase pada tingkat tarif impor rata-rata keseluruhan (2000–17) dan produk antara (2000–16))



Sumber: Estimasi Bank Dunia berdasarkan data dari TRAINS  
Catatan: Grafik ini melaporkan tarif impor terapan Negara Yang Paling Disukai (*Most Favored Nation/MFN*), yaitu tingkat tarif yang paling luas digunakan dibandingkan dengan mitra-mitra perdagangan. Karena alasan ketersediaan data untuk tarif keseluruhan, maka tahun awal untuk Cina dan Vietnam adalah 2001; tahun akhir untuk Malaysia dan Thailand masing-masing adalah 2016 dan 2015. Untuk tarif produk antara, tahun akhir untuk Thailand adalah 2015.

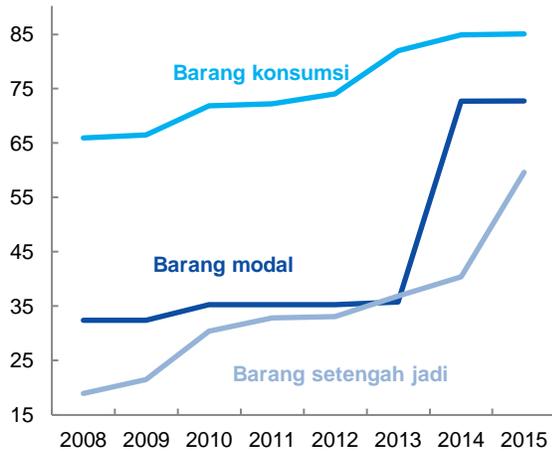
<sup>59</sup> Pavnick (2002); Amiti dan Khandewal (2013).

<sup>60</sup> Amiti dan Konings (2007); Narjoko, Anas dan Herdiyanto (2018); Rahardja dan Varela (2014).

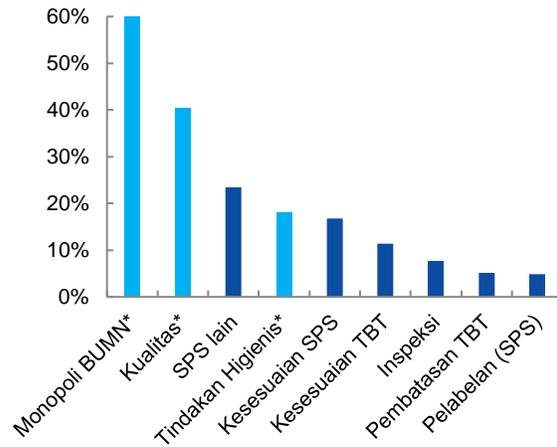
<sup>61</sup> Salah satu contoh biaya yang disebabkan oleh NTM tertentu adalah perselisihan pada bulan Maret yang lalu mengenai garam berkualitas tinggi yang menjadi salah satu input utama berbagai industri manufaktur. Garam ini dikenakan kuota impor yang dikendalikan oleh Kementerian

biaya perdagangan diilustrasikan dengan penghapusan izin impor di delapan kategori produk manufaktur besar pada akhir tahun 2015, yang berdasarkan hasil analisis Bank Dunia telah menghasilkan penurunan biaya impor secara signifikan.<sup>62</sup>

**Gambar B.15: Indonesia telah memperluas penerapan Tindakan Non Tarif atas berbagai kategori impor (persentase impor yang termasuk dalam sedikitnya satu NTM)**



**Gambar B.16: Sebagian Tindakan Non Tarif menaikkan biaya impor secara signifikan di Indonesia (dampak NTM atas harga impor berdasarkan nilai kesetaraan tarif (ad valorem equivalent))**



Sumber: Cali dan Puzzello (2018)

Catatan: \* menunjukkan bahwa estimasi ini signifikan secara statistik sedikitnya pada tingkat 10 persen. SPS singkatan dari *Sanitary and Phytosanitary Standards* (berlaku bagi produk pangan dan hasil pertanian lain) dan TBT singkatan dari *Technical Barriers to Trade* (berlaku bagi hasil manufaktur)

Kelautan dan Perikanan untuk tujuan melindungi produsen garam domestik. Kuota tahunan yang direkomendasikan sebesar 2,2 juta ton tidak cukup untuk memenuhi permintaan domestik tahun ini karena penurunan jumlah produksi domestik. Kelangkaan garam yang ditimbulkan sangat menghambat produksi berbagai industri, termasuk pengolahan makanan dan produk farmasi, yang hampir menghentikan produksi mereka. Hal ini mendorong dikeluarkannya keputusan presiden ‘darurat’ untuk mengalihkan tanggung jawab atas kuota impor kepada Kementerian Industri (lihat Reuters (2018) “Kisruh soal garam di Indonesia menggoyang dunia industri” (*Indonesia’s salt spat gives industry a shake*, 6 April).

<sup>62</sup> Cali (2017) memperkirakan bahwa penghapusan izin impor bagi importir maupun produsen memangkas harga impor sebesar 6,7 persen.

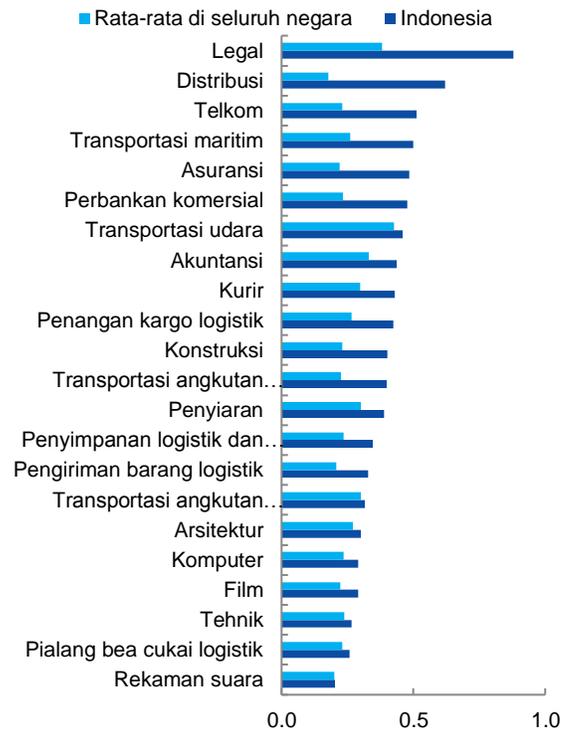
**Impor jasa juga dikenakan hambatan substansial yang berdampak negatif terhadap daya saing dengan menurunnya kualitas dan bertambahnya biaya jasa domestik, padahal sebagian besar jasa ini menjadi input utama produksi**

Impor jasa juga dikenakan hambatan (*barriers*) substansial yang berdampak negatif terhadap daya saing dengan menurunnya kualitas dan bertambahnya biaya jasa domestik, padahal sebagian besar jasa ini menjadi input utama produksi. Misalnya, hambatan impor jasa hukum mencakup larangan pengacara asing untuk mendirikan kantor hukum atau berpraktek hukum di Indonesia; di sektor jasa distribusi, investasi asing tidak diizinkan untuk dilakukan pada sebagian besar distribusi retail, termasuk pasar swalayan dan minimarket; di sektor transportasi laut, perusahaan-perusahaan asing tidak dapat mengangkut barang antar pelabuhan di Indonesia sehingga sangat membatasi persaingan di sektor transportasi utama. Bukti terbaru memperlihatkan bahwa hambatan yang lebih besar di sektor jasa menurunkan daya saing industri manufaktur Indonesia yang menggunakan jasa tersebut secara lebih luas dalam produksinya<sup>63</sup>. Bukti ini selaras dengan bukti internasional<sup>64</sup> dan memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan yang dikenakan memperburuk kualitas dan/atau memperbesar harga jasa domestik. Menurut Indeks Restriksi Perdagangan Jasa (STRI) OECD, tingkat restriksi perdagangan di 22 sektor jasa di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata tingkat restriksi perdagangan jasa di 44 negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang disurvei (Gambar B.17). Hambatan tersebut antara lain meliputi restriksi transfer pekerja intra perusahaan tetapi lintas negara (*intra-corporate transferees*), restriksi masuknya investasi asing seperti batas modal asing dan hambatan persaingan seperti persyaratan modal minimum yang tinggi.<sup>65</sup> Indonesia menerapkan hambatan yang paling ketat dibandingkan dengan semua negara lain yang disurvei di semua sektor yang menyediakan input jasa utama bagi produsen, seperti telekomunikasi, distribusi, angkutan darat, angkutan laut dan konstruksi.

**Banyak hambatan kebijakan—sebagian besar tercantum dalam Daftar Negatif Investasi—memperbesar biaya investasi di**

Selain perdagangan internasional, banyak hambatan kebijakan juga memperbesar biaya investasi di Indonesia, terutama bagi investor asing. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan regulasi yang paling restriktif terhadap FDI diantara 68 negara berpenghasilan menengah dan menengah ke bawah yang disurvei oleh OECD (Gambar B.18). Contoh-contoh utama mengenai restriksi itu dicantumkan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), berupa: batas kepemilikan asing, peruntukkan sektor tertentu bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), izin khusus dan persyaratan tingkat kandungan dalam negeri. Contohnya, DNI membatasi penyertaan modal

**Gambar B.17: Indonesia membatasi impor jasa lebih besar daripada negara-negara lain**  
(derajat restriksi impor jasa; 0 = terendah; 1 = tertinggi)



Sumber: OECD

<sup>63</sup> Duggan, Rahardja dan Varela (2013).

<sup>64</sup> Arnold, Javorcik, dan Mattoo (2011); Arnold et al. (2016).

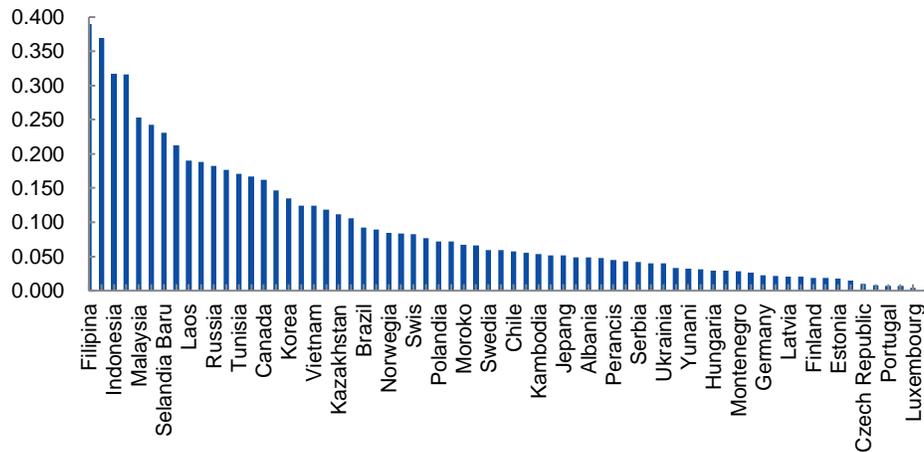
<sup>65</sup>STRI (Indeks Restriksi Perdagangan Jasa) adalah indikator restriksi gabungan pada lima kategori kebijakan standar, yang meliputi restriksi masuknya investasi asing, restriksi perpindahan orang, hambatan persaingan, transparansi berdasarkan regulasi dan tindakan-tindakan diskriminatif lain.

**Indonesia, terutama bagi investor asing yang dilarang melakukan investasi di beberapa sektor**

asing hingga 15 persen di semua sektor, yang dalam beberapa kasus bahkan melarang investasi asing sama sekali, seperti untuk instalasi produksi hulu migas di darat, pembangkit listrik di bawah 1MW, usaha retail mobil, sepeda motor dan kendaraan komersial, serta pasar swalayan dengan luas kurang dari 1.200 m<sup>2</sup>. Selain itu, puluhan sektor pertanian, industri dan jasa hanya diperuntukkan bagi UMKM, sehingga menutup kesempatan untuk investor asing karena mereka tidak dapat beroperasi sebagai UMKM di Indonesia.<sup>66</sup>

**Gambar B.18: Restriksi regulasi terhadap FDI masih tinggi di Indonesia**

(Indeks restriksi regulasi terhadap FDI, 0 = terendah; 1 = tertinggi)



Sumber: OECD

**Restriksi-restriksi ini secara signifikan mengurangi investasi asing maupun domestik, mengurangi masuknya modal dan kinerja, dan menaikkan harga di sektor-sektor yang dilindungi**

Restriksi-restriksi ini secara signifikan mengurangi investasi asing maupun domestik, mengurangi masuknya modal dan kinerja, dan menaikkan harga di sektor-sektor dimana restriksi-restriksi tersebut diberlakukan. Berdasarkan hasil analisa yang melihat hubungan antara restriksi dan investasi dari waktu ke waktu di berbagai sektor, Bank Dunia (2017a) berpendapat bahwa dengan menaikkan batas maksimum kepemilikan asing yang diizinkan di salah satu sektor, jumlah proyek FDI maupun investasi domestik akan meningkat secara substansial.<sup>67</sup> Hasil analisa ini juga memperlihatkan bahwa mencadangkan suatu sektor hanya bagi UMKM akan mengurangi jumlah proyek FDI, dan mewajibkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam produksi—sebagaimana yang baru-baru ini diterapkan oleh Indonesia atas produk elektronik, peralatan IT, telepon seluler dan agribisnis—akan memberikan dampak negatif kepada investasi asing maupun domestik.<sup>68</sup> Restriksi investasi juga memperburuk daya saing sektor manufaktur. Dengan membandingkan restriksi investasi yang tercantum di DNI di seluruh sektor dari waktu ke waktu dengan data perusahaan di industri manufaktur, hasil analisis terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa restriksi tersebut mengurangi persaingan di sektor manufaktur. Setelah penerapan restriksi DNI (melalui batas kepemilikan asing, pencadangan suatu sektor untuk UKM atau izin khusus), jumlah perusahaan asing baru yang masuk ke industri manufaktur mengalami penurunan, khususnya yang berorientasi ekspor, demikian pula dengan jumlah industri domestik yang keluar karena kurang keterbukaan untuk bersaing (Gambar B.19). Dengan berkurangnya persaingan, perusahaan-perusahaan petahana (*incumbent*) diuntungkan karena mereka bisa menaikkan laba dan harga yang membebani pemakai dan konsumen produk

<sup>66</sup> Sektor-sektor lain masih terbuka namun harus bermitra dengan UMKM. Jadi restriksi ini masih lebih ringan daripada memperuntukkan suatu sektor bagi UMKM.

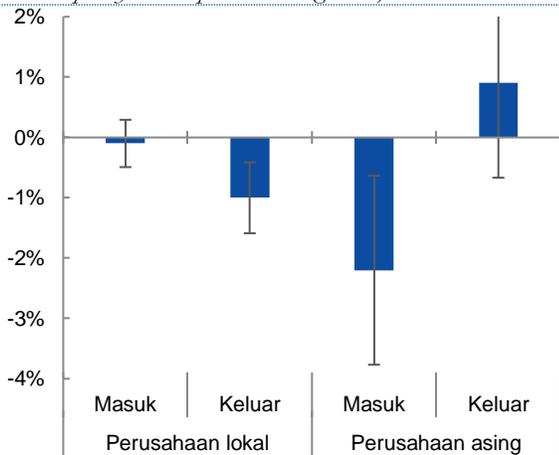
<sup>67</sup> Analisis ini dilakukan dengan data terkodifikasi menurut klasifikasi KBLI 4 digit, yang mencakup 514 sektor.

<sup>68</sup> Dalam hal investasi asing, analisis ini memperlihatkan bahwa persyaratan kandungan lokal mengurangi jumlah investasi yang telah disetujui (namun belum direalisasikan), namun tidak terlalu mempengaruhi jumlah investasi yang sudah direalisasikan. Persyaratan kandungan lokal tampaknya lebih menekan investasi domestik karena investasi yang telah disetujui maupun telah direalisasikan menurun sebagai akibat dari persyaratan kandungan lokal.

(Gambar B.20). Jika persaingan berkurang, maka kinerja rata-rata industri pun akan menurun, sebagaimana diukur dengan penurunan probabilitas investasi, produktivitas tenaga kerja, upah rata-rata yang dibayarkan dan kuantitas produksi industri. Dampak ini juga konsisten dengan restriksi yang mengurangi penerapan teknologi baru untuk produksi, yang biasanya didatangkan oleh industri asing. Hasil analisis menunjukkan bahwa restriksi yang diterapkan juga memperbesar biaya input utama produksi, khususnya produk antara dan jasa, sehingga mengurangi profitabilitas industri-industri hilir.

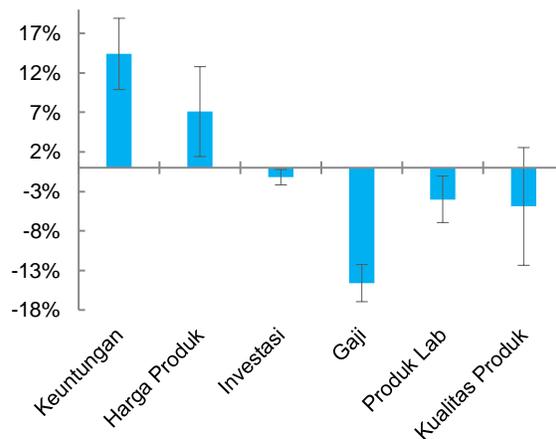
**Gambar B.19: Restriksi DNI mengurangi masuknya industri asing – khususnya eksportir – dan keluarnya industri domestik ...**

(perubahan persentase berkaitan dengan penerapan restriksi DNI dengan interval kepercayaan 95 persen bersangkutan)



**Gambar B.20: ... dan persaingan yang lebih rendah mengurangi kinerja dan upah, serta menaikkan harga-harga**

(perubahan persentase berkaitan dengan penerapan restriksi DNI dengan interval kepercayaan 95 persen bersangkutan)



Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan PerPres DNI dan data Statistik Industri.

Catatan: Kedua gambar di atas menggambarkan estimasi angka dengan interval kepercayaan 95 persen terhadap regresi variabel hasil di tingkat industri dalam grafik dengan model restriksi DNI bervariasi-waktu yang didefinisikan pada level 5-digit KBLI selama periode 2008-14 (121.068 survei untuk industri domestik dan 12.314 survei untuk industri asing).

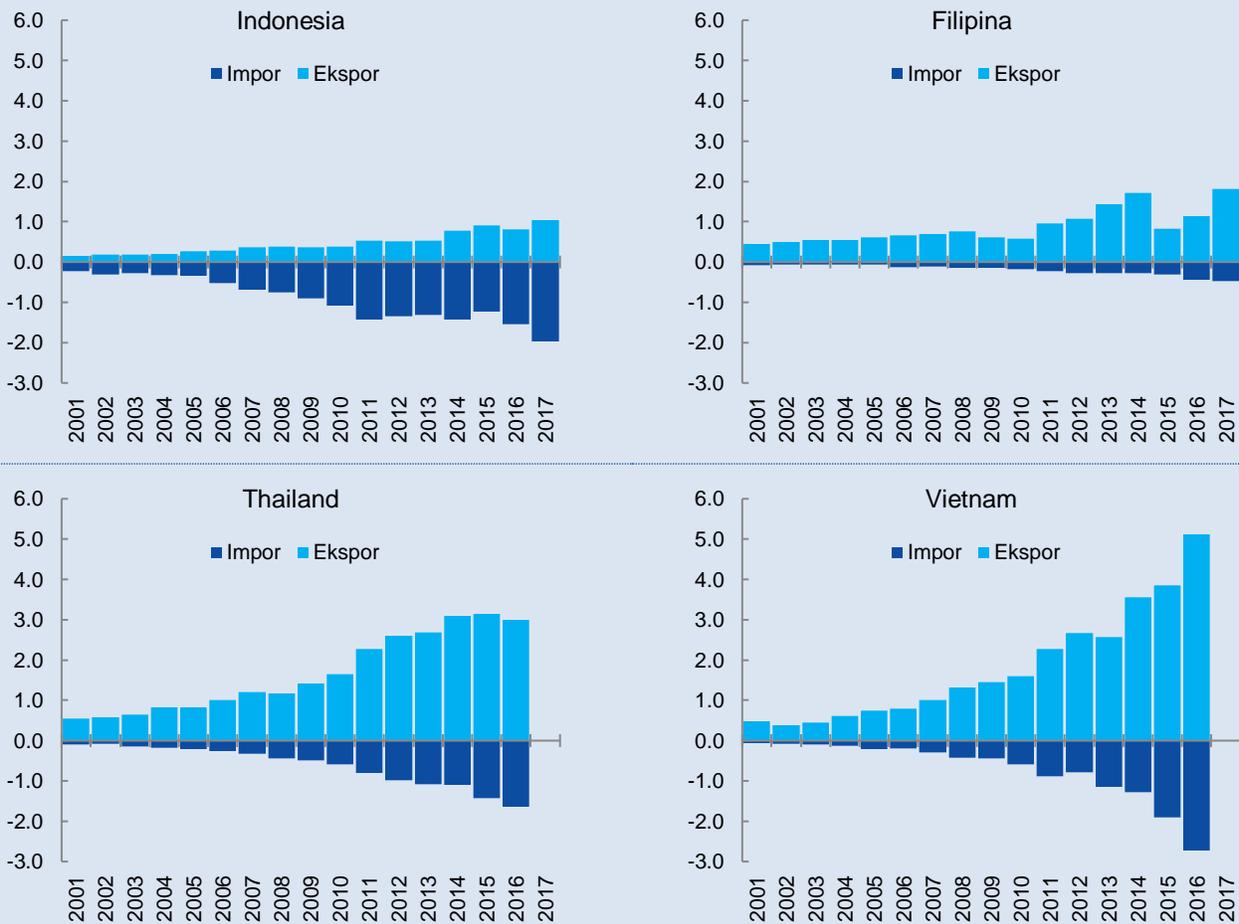
**Restriksi perdagangan dan investasi telah memperluas keterisolasian dunia industri dan mengurangi keinginan mereka untuk bersaing secara global**

Sebaliknya alih-alih meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global, restriksi perdagangan dan investasi tampaknya telah memperluas keterisolasian mereka dan mengurangi keinginan mereka untuk bersaing secara global. Dua contoh dalam hal ini adalah hortikultura dan elektronik, dua sektor yang berorientasi ekspor dengan tingkat pertumbuhan permintaan global yang besar, yang berhasil dimanfaatkan oleh negara-negara Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencoba mendorong pengembangan kedua sektor ini melalui kebijakan investasi dan perdagangan yang bersifat membatasi (restriktif), seperti membatasi penyertaan modal asing di perusahaan hortikultura dan mewajibkan TKDN minimum dalam produksi elektronik untuk penjualan domestik. Tindakan-tindakan kebijakan restriktif ini ditengarai menjadi salah satu penyebab ekspor Indonesia yang stagnan, berbeda dengan ekspor dan impor yang tinggi dan terus meningkat di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang mengadopsi sistem perdagangan dan investasi yang lebih terbuka (Kotak B.2).

**Kotak B.2: Mengapa restriksi perdagangan dan investasi tidak membantu pengembangan industri hortikultura dan elektronik di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Hortikultura No. 13 Tahun 2010, Indonesia berupaya mengembangkan sektor hortikultura melalui kombinasi restriksi terhadap investor asing (berupa kepemilikan modal asing maksimal 30 persen)<sup>1</sup> dan hambatan impor (*import barriers*) melalui penerapan persyaratan perizinan dan pelabuhan masuk secara terbatas. Restriksi investasi telah mengurangi partisipasi perusahaan benih asing, yang dapat menjadi sumber pengetahuan yang sangat bernilai di sektor padat teknologi, seperti hortikultura. Demikian pula, restriksi perdagangan telah menghambat pertumbuhan impor hortikultura dalam beberapa tahun terakhir (dan telah menaikkan harga buah-buahan dan sayur-sayuran domestik)<sup>2</sup>, tetapi tidak mendorong peningkatan ekspor yang signifikan (Gambar B.21). Di pihak lain, dengan mempertahankan sistem perdagangan dan investasi yang terbuka, Vietnam, Thailand dan, sampai taraf tertentu, Filipina, telah memperluas ekspor maupun impor produk hortikultura selama periode yang sama. Ekspor Vietnam, khususnya, telah meningkat lima kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir menjadi USD 5 miliar, dan impornya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat menjadi hampir USD 3 miliar. Perdagangan dan investasi memainkan peranan penting dalam pengembangan sektor ini: perusahaan-perusahaan asing menguasai 80 persen pasar benih domestik, dan 80 persen pasokan benih buah-buahan dan sayur-sayuran domestik berasal dari impor. Pemerintah telah menetapkan wilayah-wilayah produksi 8 buah-buahan unggulan ekspor, di mana petani diberikan hak kepemilikan lahan jangka panjang dan penyuluhan intensif untuk mengadopsi teknik-teknik tanam yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan dari luar negeri. Selain itu, investasi swasta diundang untuk meningkatkan kapasitas penanganan pasca-panen dan ekspor.

**Gambar B.21: Kesulitan perubahan (transisi) sektor hortikultura Indonesia**  
(ekspor dan impor produk hortikultura dalam miliar USD)



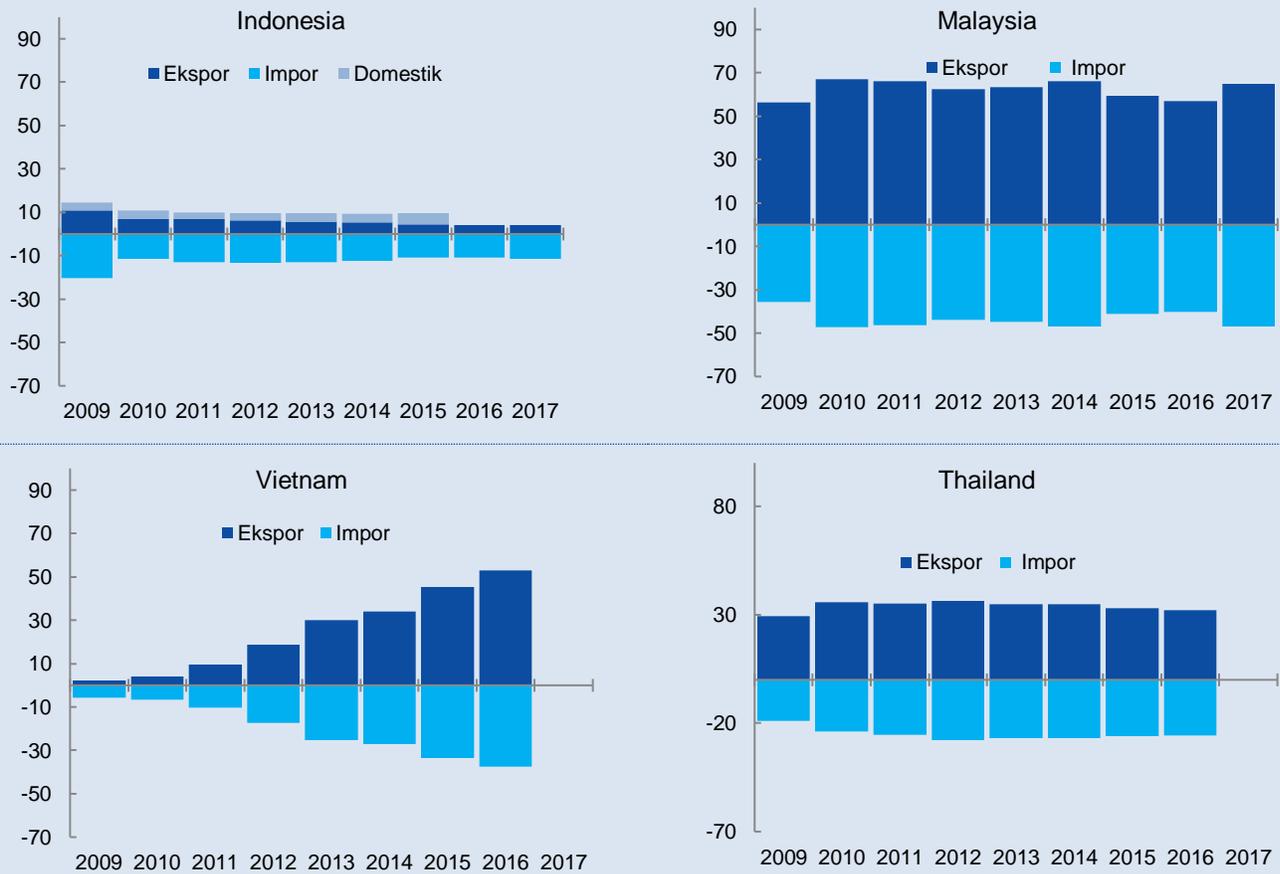
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan FAOSTATS.

Indonesia juga telah menggunakan tindakan-tindakan restriksi investasi dan penjualan untuk mendorong pengembangan industri elektronik. Sejak tahun 2013, pemerintah telah menerapkan persyaratan kandungan lokal antara 20 persen sampai 40 persen dari nilai produk untuk memasarkan berbagai peralatan elektronik di dalam negeri.<sup>3</sup> Berbagai tindakan ini bertujuan untuk mendorong industri domestik agar meningkatkan nilai kandungan lokal. Akan tetapi, restriksi ini mempersulit produsen domestik untuk mendapatkan

input terbaik di tingkat global, yang khususnya menjadi masalah bagi industri yang produksinya sangat terfragmentasi dari berbagai negara. Sebaliknya alih-alih menyelesaikan permasalahan daya saing yang telah mengurangi keinginan para investor untuk menggunakan Indonesia sebagai basis produksi ekspor elektronik mereka (Gambar B.9 di atas), berbagai tindakan tersebut justru telah menjadikan industri elektronik Indonesia semakin berorientasi pada pasar lokal. Dalam satu dekade terakhir, impor maupun ekspor telah mengalami penyusutan, dan penjualan domestik telah menggantikan ekspor sebagai sumber pendapatan terbesar bagi produsen domestik (Gambar B.22). Meskipun Indonesia mempunyai pasar domestik terbesar di kawasan regional, pasar globalnya masih kecil.<sup>4</sup> Jadi, Indonesia masih belum tampak cukup menarik bagi produsen yang ingin memenuhi pasar global dengan mencari input-input terbaik dari sumber-sumber global. Bahkan, nilai penjualan domestik Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai ekspor elektronik dari negara-negara regional lain, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, yang memiliki industri elektronik yang lebih berorientasi ekspor, dengan nilai impor dan ekspor yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Angka-angka berikut ini memperlihatkan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan kembali strateginya yang berwawasan tertutup saat ini untuk mengembangkan industrinya.

**Gambar B.22: Sektor elektronik Indonesia yang berorientasi pada pasar domestik**

(ekspor dan impor produk elektronik dalam miliar USD)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data perdagangan COMTRADE dan Statistik Industri, serta hasil survei usaha mikro dan kecil manufaktur untuk penjualan domestik Indonesia.

Catatan: Data penjualan domestik hanya untuk Indonesia dan tidak tersedia untuk tahun 2016–17.

<sup>1</sup> Undang-Undang Hortikultura berlaku surut, yang menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan asing perlu melakukan divestasi atas kepemilikan mayoritas mereka paling lambat tahun 2015. Meskipun pemerintah telah menunjukkan fleksibilitasnya dalam penerapan batas waktu divestasi, perusahaan-perusahaan asing tetap menghadapi ketidakpastian hukum.

<sup>2</sup> Bank Dunia memperkirakan bahwa harga buah-buahan dan sayur-sayuran sudah mengalami kenaikan lebih dari 20 persen dibandingkan dengan harga tanpa restriksi perdagangan.

<sup>3</sup> Persyaratan ini diperkenalkan melalui dua peraturan Menteri Informasi (No. 26/2013 dan No. 27/2015).

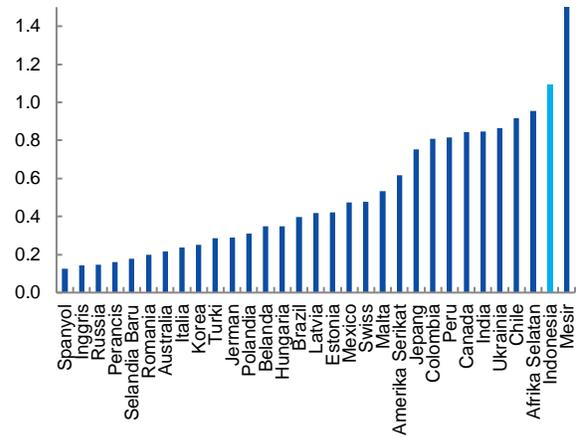
<sup>4</sup> Misalnya, pasar Indonesia hanya mencapai 2 persen dari pasar smartphone global senilai USD 479 miliar pada tahun 2017.

Karena membatasi persaingan, tindakan-tindakan regulasi ini dapat memfasilitasi perusahaan petahana (*incumbent*) untuk memperkuat posisi dominannya atau mempermudah kolusi di antara mereka sehingga menghambat produktivitas. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan kerangka hukum persaingan usaha yang sekarang masih lemah dan lembaga penegak hukumnya yaitu KPPU

Karena membatasi persaingan, tindakan-tindakan regulasi ini juga dapat memfasilitasi perusahaan-perusahaan petahana (*incumbent*) memperkuat posisi dominannya atau mempermudah kolusi di antara mereka sehingga menghambat persaingan. Kurangnya persaingan menghalangi pertumbuhan produktivitas dengan mengurangi insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan inovasi produk dan proses. Praktek-praktek anti persaingan ini seringkali terdapat di sektor-sektor antara<sup>69</sup>, sehingga semakin melemahkan daya saing dengan naiknya biaya input produksi. Oleh karena itu, kebijakan persaingan yang kuat dan penegakannya sangat dibutuhkan. Di banyak negara, otoritas pengawas persaingan usaha dapat membantu memastikan bahwa perumusan kebijakan mempertimbangkan kepentingan yang mendukung persaingan usaha dan mencegah atau menghalangi perilaku anti persaingan dari perusahaan-perusahaan petahana (*incumbent*). Di Indonesia, efektivitas kerangka kebijakan dan implementasinya perlu diperkuat. Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia sudah ada sejak tahun 1999—undang-undang pertama yang disusun atas inisiatif DPR di era pasca pemerintahan Suharto—ketika Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) juga dibentuk dengan mandat untuk menegakkan kebijakan persaingan itu. Akan tetapi, kerangka persaingan maupun kewenangan KPPU masih mengalami sejumlah keterbatasan yang membuat sistem persaingan di Indonesia menjadi paling tidak efektif di antara sistem persaingan di 49 yurisdiksi yang disurvei oleh OECD (Gambar B.23). Misalnya, KPPU adalah satu-satunya instansi pengawas yang tidak dapat melakukan inspeksi mendadak (*Sidak*) di tempat kedudukan perusahaan yang sedang diselidiki atas dugaan melakukan tindakan kartel untuk keperluan pengumpulan bukti. Demikian pula, KPPU juga tidak dapat bertindak terhadap perusahaan yang berkedudukan di luar negeri meskipun perilaku mereka secara langsung mempengaruhi persaingan dan/atau konsumen di pasar domestik. Akibatnya, jumlah kartel yang dideteksi oleh KPPU masih sangat terbatas dibandingkan dengan negara-negara lain yang bahkan lebih kecil.<sup>70</sup> Selain itu, KPPU mempunyai wewenang yang terbatas untuk melakukan pencegahan: denda maksimum yang dapat dijatuhkan oleh KPPU bernilai kurang dari USD 2 juta, yang jauh lebih rendah daripada kebanyakan yurisdiksi lain. Akhirnya, meskipun sebagian besar kegiatan KPPU dalam memberikan pendapat dan pertimbangan berfokus pada praktek-praktek anti persaingan yang difasilitasi oleh peraturan pemerintah, dampak dari pendapat yang diberikannya dalam pengambilan kebijakan masih belum jelas karena tidak adanya mekanisme umpan balik formal dari pemerintah.

**Gambar B.23: Indonesia masih tertinggal dalam hal kekuatan dan ruang lingkup sistem persaingannya (2013)**

(0 sampai 6, mulai dari paling kondusif sampai paling tidak kondusif bagi persaingan)



Sumber: Penjabaran Bank Dunia berdasarkan laporan Alemani et al. (2016)

<sup>69</sup> Ivaldi, Jenny dan Khimich (2016).

<sup>70</sup> Di Indonesia, selama periode 2000–17, KPPU menyelidiki hanya 11 kasus kartel, tidak termasuk kolusi dengan pejabat pemerintah dalam tender pengadaan publik (sumber: surat keputusan KPPU yang diterbitkan secara online). Sebagai perbandingan, di Afrika Selatan, yang perekonomiannya tiga kali lebih kecil daripada Indonesia, sebanyak 76 kartel berhasil dideteksi dan dikenakan sanksi antara tahun 2005 sampai 2015, tidak termasuk proyek-proyek konstruksi (Bank Dunia 2016).

**Inefisiensi di pasar faktor produksi lainnya**

**Kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, khususnya tenaga kerja berketerampilan tinggi, merupakan salah satu kendala utama yang menghambat peningkatan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia**

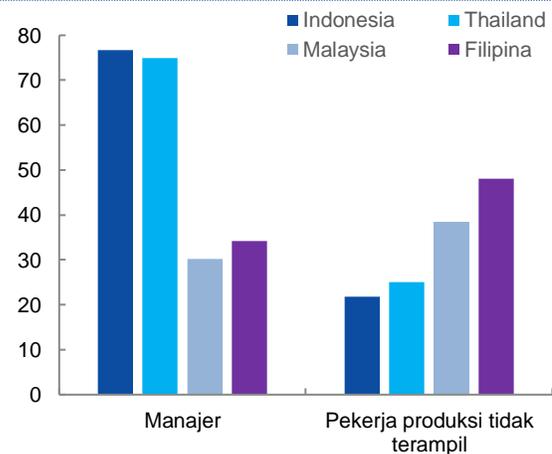
**Masalah keterampilan tenaga kerja selaras dengan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas sistem pendidikan domestik dan masalah ini diperburuk dengan minimnya pelatihan kerja formal yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya bagi pekerja terampil**

Dengan meningkatnya otomatisasi dan kecanggihan teknologi produksi maka kualitas keterampilan tenaga kerja menjadi semakin penting, dan hal ini memperkuat kebutuhan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja di Indonesia, khususnya tenaga kerja berketerampilan tinggi. Kualitas keterampilan tenaga kerja, terutama para profesional dan manajer yang berketerampilan tinggi, merupakan masalah yang serius. Perusahaan di Indonesia yang melaporkan kesulitan untuk mempekerjakan manajer dan profesional dengan keterampilan yang memadai menduduki jumlah tertinggi di kawasan regional (Gambar B.24). Di pihak lain, perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan bahwa mereka lebih mudah mencari pekerja produksi tidak terampil di Indonesia. Ketersediaan tenaga kerja tidak terampil lebih sedikit di negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Filipina. Selain itu, 80 persen perusahaan Indonesia secara spesifik mengeluh mengenai keterampilan bahasa dan manajerial, dan persentase ini jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain di kawasan. Berdasarkan hasil kajian bersama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia baru-baru ini, Indonesia sangat kekurangan tenaga terampil untuk puluhan posisi, seperti Kepala Pengawasan Manufaktur Kimia, Supervisor Biokimia, Supervisor Mikrobiologi, Ahli Teknologi Pangan, Teknisi Kimia, Arsitek Solusi *Cloud* dan Desainer UI/UX.<sup>71</sup> Kekurangan tenaga terampil ini menyebabkan pertumbuhan produktivitas dan kesempatan kerja lebih rendah<sup>72</sup>. Memang, buruknya kualitas manajemen biasanya berhubungan dengan rendahnya inovasi<sup>73</sup>, yang turut bertanggung jawab atas rendahnya persentase perusahaan yang menghasilkan inovasi produk atau proses di Indonesia.

Masalah keterampilan tenaga kerja selaras dengan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas sistem pendidikan domestik, dan masalah ini diperburuk dengan minimnya pelatihan kerja formal yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya bagi pekerja terampil. Perluasan akses pendidikan yang pesat baru-baru ini (dengan jumlah sekolah yang meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2003–16) telah menyebabkan peningkatan masif jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi dan menengah. Akan tetapi, ini masih belum tercermin dalam perbaikan kualitas pendidikan yang sesuai sejak tahun 2000<sup>74</sup>. Berdasarkan hasil tes internasional, lebih dari 55 persen warga negara Indonesia yang menamatkan pendidikan mereka masih ‘buta aksara fungsional’, persentase yang jauh lebih besar daripada Vietnam (14 persen) dan negara-negara OECD (20 persen). Meskipun mengalami kekurangan keterampilan ini,

**Gambar B.24: Kurangnya keterampilan yang tepat dan memadai, khususnya untuk manajer**

(persentase perusahaan yang melaporkan keterampilan yang tidak memadai sebagai hambatan utama dalam upaya mempekerjakan setiap jenis pekerja, dalam persen)



Sumber: Gomez-Mera dan Hollweg (2018) berdasarkan data WBES

<sup>71</sup> Pemerintah RI dan Bank Dunia (2018).

<sup>72</sup> Perusahaan-perusahaan yang melaporkan kesulitan dalam mempekerjakan manajer dan pegawai tingkat tinggi mengalami pertumbuhan lapangan kerja 50 persen lebih rendah; kesulitan dalam mencari karyawan dengan keterampilan bahasa asing, teknis, kepemimpinan dan manajemen disebabkan oleh kinerja perusahaan yang lebih lemah dan produktivitas yang lebih rendah, lihat Gomez Mera dan Hollweg (2018).

<sup>73</sup> Cirera dan Maloney (2017).

<sup>74</sup> Bank Dunia (2018a).

persentase perusahaan Indonesia yang melakukan pelatihan kerja masih menjadi yang terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah.<sup>75</sup>

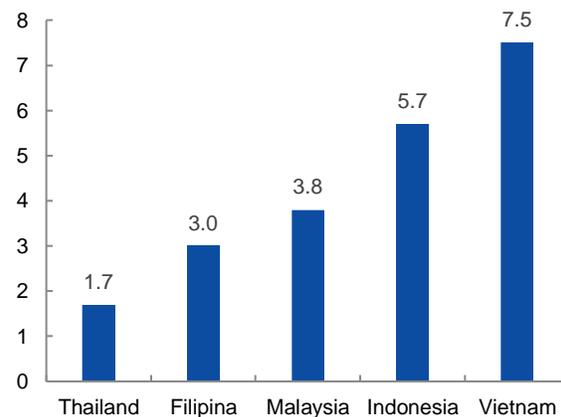
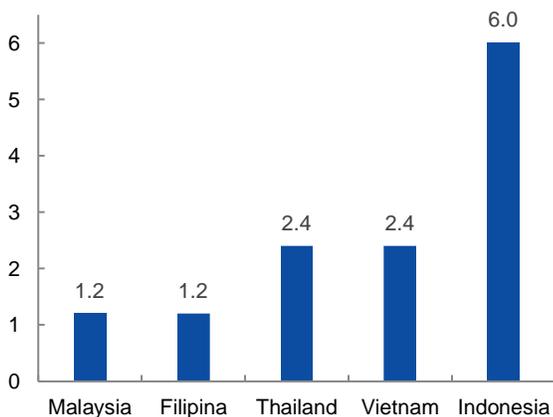
**Kebijakan subsidi pasar energi memberikan insentif negatif (*perverse incentives*) kepada produsen untuk menggunakan mesin-mesin tua bertenaga bahan bakar minyak (BBM), sebaliknya daripada memenuhi kebutuhan perusahaan: pasokan listrik yang lebih andal**

Kebijakan pemberian subsidi energi telah menurunkan harga energi domestik, tetapi dengan mengorbankan pemenuhan kebutuhan yang paling vital untuk perusahaan-perusahaan, yaitu pasokan listrik yang lebih andal. Pemerintah telah cukup lama menerapkan kebijakan harga energi bersubsidi, terutama BBM, yang harganya di Indonesia paling rendah di dunia. Subsidi BBM sebagian besar telah dihapuskan dalam APBN 2015, sayangnya sekitar 27 persen subsidi kembali membebani APBN tahun ini<sup>76</sup>. Kebijakan subsidi menciptakan disinsentif kepada perusahaan-perusahaan untuk beralih dari penggunaan mesin-mesin bertenaga BBM yang tidak efisien dan berproduktivitas rendah ke mesin-mesin bertenaga listrik yang lebih modern. Faktanya, Cali et al. (2018) memperkirakan, berdasarkan data panel industri manufaktur Indonesia, bahwa kenaikan harga BBM sebesar 10 persen menaikkan produktivitas industri sebesar 1,4 persen. Hasil ini dicapai karena adanya peralihan ke peralatan yang lebih produktif dan hemat energi, yang didorong oleh lonjakan harga BBM. Pada saat yang sama, kehandalan pasokan listrik masih menjadi masalah. Meskipun sudah banyak perusahaan yang terkoneksi ke jaringan transmisi listrik PLN, terutama di pulau-pulau besar, perusahaan-perusahaan Indonesia masih mengalami pemadaman listrik jauh lebih lama dan lebih sering, khususnya di Jawa Tengah, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional (Gambar B.25). Hal ini mengganggu proses produksi dan menaikkan biaya energi, misalnya, perusahaan terpaksa menggunakan generator untuk mendapatkan pasokan listrik yang handal, sehingga akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang berskala usaha lebih kecil.<sup>77</sup>

**Gambar B.25: Kehandalan pasokan listrik perlu ditingkatkan demi kepentingan perusahaan-perusahaan Indonesia**

a. Jumlah rata-rata pemadaman yang dilaporkan perusahaan setiap tahun

b. Durasi rata-rata pemadaman yang dilaporkan perusahaan setiap tahun (dalam jam)



Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data WBES (data tahun 2015 untuk semua negara kecuali Thailand (2016))

**Daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia terkena dampak negatif dari**

Yang terakhir, daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia terkena dampak negatif dari biaya transportasi yang tinggi, terutama akibat kemacetan dan kurangnya investasi yang memadai untuk infrastruktur. Data baru yang berhasil dikumpulkan oleh Bank Dunia (2018b) memperlihatkan bahwa sebagian besar biaya logistik perusahaan manufaktur Indonesia digunakan untuk transportasi, terutama transportasi darat dan laut, dan persentase biaya

<sup>75</sup> Gomez-Mera dan Hollweg (2018).

<sup>76</sup> Ini belum termasuk subsidi di luar APBN, yang sebagian besar diserap oleh Pertamina.

<sup>77</sup> Poczter (2017).

**biaya transportasi yang tinggi, terutama akibat kemacetan lalu lintas dan kurangnya investasi yang memadai untuk infrastruktur**

transportasi terhadap nilai penjualan produk manufaktur lebih tinggi di Indonesia daripada di Vietnam dan Thailand. Dorongan untuk menggunakan transportasi darat ketimbang transportasi laut, termasuk subsidi solar dan minimnya penegakan aturan keselamatan di jalan raya menyumbang kepada masalah kemacetan lalu lintas. Selain itu, kesenjangan infrastruktur yang besar terjadi di pelabuhan-pelabuhan, khususnya pelabuhan-pelabuhan sekunder, yang memperlambat kegiatan operasional pelabuhan dan/atau membuat pelabuhan tidak sanggup memenuhi permintaan yang diharapkan di masa mendatang.<sup>78</sup> Tingginya biaya ini mengurangi kemampuan perusahaan untuk sepenuhnya memanfaatkan skala ekonomi, bahkan di pulau-pulau besar Jawa dan Sumatra. Kesulitan konektivitas yang lebih besar terjadi di daerah-daerah terluar,<sup>79</sup> di mana upaya pemerintah untuk mensubsidi pembangunan sektor swasta tanpa memperluas integrasi daerah-daerah itu dengan daerah-daerah inti di Indonesia sebagian besar telah gagal (Rothenberg et al. 2017).<sup>80</sup>

### 3. Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan investasi?

**Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, perlu dilakukan reformasi jangka pendek maupun jangka menengah**

Untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat peningkatan daya saingnya, Indonesia perlu mempercepat investasi, ekspor dan pertumbuhan dengan memenuhi potensinya sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang bertumbuh tercepat di dunia. Kabar baiknya adalah bahwa beberapa kendala dapat diatasi melalui enam reformasi kebijakan jangka pendek spesifik, yaitu: mengurangi hambatan impor, melaksanakan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang ambisius, merevisi DNI, mengizinkan perekrutan lebih banyak tenaga kerja internasional dengan keahlian yang saat ini belum tersedia secara memadai di Indonesia, mencabut subsidi BBM dan merevisi Undang-Undang Persaingan Usaha. Hambatan lain yang berkaitan dengan modal manusia dan infrastruktur membutuhkan agenda reformasi jangka menengah.

#### *Kebijakan-kebijakan jangka pendek*

**Salah satu tindakan penting untuk meningkatkan ekspor dan investasi adalah mengurangi hambatan impor secara substansial, berupa tarif maupun non-tarif**

Salah satu tindakan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan investasi adalah mengurangi hambatan impor secara substansial, berupa tarif maupun non-tarif yang sangat membebani. Karena eksportir menggunakan banyak input impor maka tindakan ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan ketersediaan input utama produksi untuk ekspor. Tindakan ini perlu dimulai dengan menurunkan kembali tarif impor dari beberapa tahun terakhir, terutama untuk produk antara, termasuk kajian yang tepat mengenai apakah kondisi-kondisi yang menjadi alasan diterapkannya tarif anti-dumping masih relevan. Dalam mereformasi hambatan non tarif (NTM), Indonesia akan terbantu jika terlebih dulu berfokus pada tindakan-tindakan yang paling menghambat impor. Reformasi harus diarahkan untuk mengurangi jenis dan jumlah produk yang tercakup di dalam hambatan non tarif dan memastikan bahwa penerapan NTM tidak menambah biaya. Misalnya, kajian terhadap sertifikasi SNI akan membantu mengidentifikasi biaya dan manfaat sertifikasi untuk berbagai jenis barang dan kemungkinan menemukan cara-cara untuk mengurangi biaya sertifikasi itu sendiri. Selain itu, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan transparansi instansi-instansinya dalam penerapan NTM. Ini dapat mencakup, misalnya, penerbitan surat rekomendasi untuk impor barang tertentu oleh kementerian teknis, yang seringkali menggunakan diskresi dalam mengeluarkan surat-surat semacam itu.

<sup>78</sup> Ini didasarkan pada kajian terperinci di 18 pelabuhan yang dilaksanakan oleh Bank Dunia – lihat Bank Dunia (2015a).

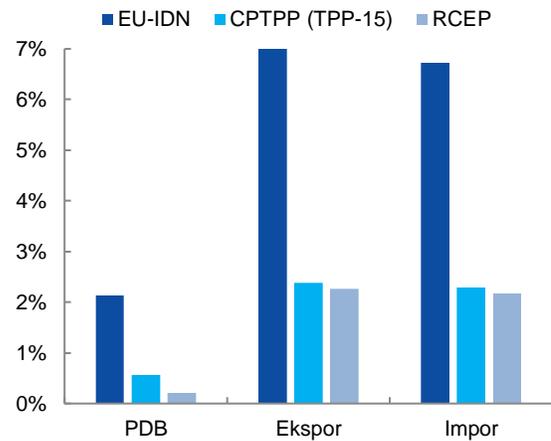
<sup>79</sup> Bank Dunia (2015a)

<sup>80</sup> Salah satu contohnya adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bertujuan mengembangkan daerah-daerah tertinggal di Indonesia Timur. Skema ini mencakup keringanan pajak atas semua faktor produksi, selain fasilitas, infrastruktur dan jasa layanan bersubsidi (Temenggung 2013). Meskipun subsidi yang diberikan mahal secara fiskal, masih belum ada bukti mengenai dampak signifikan atas investasi atau kinerja (Rothenberg et al. 2017), karena hal ini mungkin terkendala oleh kurangnya konektivitas di daerah-daerah tersebut ke pasar maupun kurangnya faktor-faktor produksi yang memadai.

**Indonesia juga dapat mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas yang sedang berlangsung dan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian lain dengan tingkat ambisi yang tinggi agar dapat membantu mempercepat reformasi domestik dan meningkatkan akses ke pasar-pasar utama**

Indonesia dapat mempercepat penyelesaian perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang sedang berlangsung dan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian lain dengan tingkat ambisi yang tinggi. FTA bukanlah alternatif dari reformasi perdagangan dan investasi yang mutlak harus dilakukan, melainkan menjadi mekanisme eksternal untuk mempercepat proses reformasi tersebut dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan akses ke pasar utama. Meskipun Indonesia tidak lama lagi akan menandatangani perpanjangan perjanjian kemitraan ekonomi dengan Jepang dan FTA dengan Australia dan dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), perjanjian-perjanjian penting lain masih dalam proses negosiasi, terutama perjanjian dengan Uni Eropa dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang sedang dibahas bersama 16 negara Asia. Kajian baru-baru ini berdasarkan model keseimbangan umum dinamis menunjukkan dampak positif dari kedua Perjanjian tersebut, khususnya perjanjian dengan Uni Eropa, karena perjanjian ini secara signifikan akan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif bilateral (Gambar B.26). Kajian itu memperlihatkan bahwa Indonesia juga dapat memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Lintas Pasifik (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP)), yang menggantikan perjanjian sebelumnya yaitu TPP. Pencantuman ketentuan mengenai investasi yang ambisius dalam perjanjian “generasi baru” ini juga dapat membantu Indonesia menarik investasi asing tanpa melakukan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT). Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjang BIT yang habis masa berlakunya. Proses re-negosiasi BIT dengan beberapa negara seperti Singapore sedang dalam proses. Sebenarnya, re-negosiasi BIT tampaknya bisa menjadi strategi yang lebih efektif daripada mengakhirinya karena perjanjian ini memberikan perlindungan yang penting kepada investor asing terhadap kemungkinan perubahan hak-hak yang disepakati pada saat melakukan investasi. Untuk itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan ketentuan pengamanan tambahan dalam BIT yang membatasi kemungkinan jalan lain untuk menyelesaikan sengketa antara negara dengan investor.

**Gambar B.26: FTA mungkin bisa menjadi keuntungan bagi perekonomian Indonesia**  
(perubahan persentase pada variabel ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan berbagai FTA, pada tahun 2030)



Sumber: Maliszewska et al. (akan terbit)

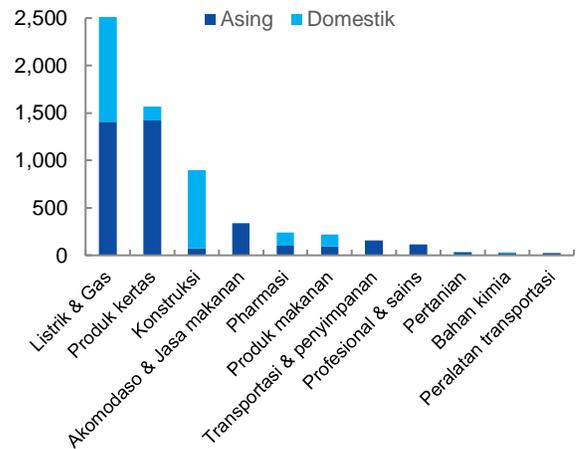
Revisi DNI adalah langkah penting untuk melonggarkan restriksi terhadap investasi, dan penghapusan batas ekuitas asing saja dapat menghasilkan investasi asing dan domestik tambahan senilai USD 6 miliar

Melonggarkan restriksi terhadap investasi adalah reformasi penting lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan FDI dan ekspor. Restriksi investasi di berbagai sektor dapat direvisi melalui penerbitan DNI baru, termasuk batas kepemilikan asing, peruntukkan dan kemitraan dengan UKM, dan persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).<sup>81</sup> Misalnya, Bank Dunia memperkirakan bahwa penghapusan batas kepemilikan asing di semua sektor yang tidak tertutup bagi investasi akan menghasilkan tambahan investasi asing dan domestik, masing-masing sebesar USD 4 miliar dan USD 2 miliar.<sup>82</sup> Beberapa sektor seperti listrik dan gas, produk kertas, konstruksi serta jasa pariwisata dan makanan akan menerima manfaat terbesar dari tambahan investasi tersebut (Gambar B.27). Restriksi lain yang tidak tercakup dalam DNI perlu ditangani melalui perubahan undang-undang (misalnya, Undang-Undang Hortikultura dan Undang-Undang Pendidikan) dan peraturan-peraturan sektoral (misalnya, TKDN untuk barang elektronik). Selain itu, sebagai bagian dari agenda jangka panjang, perlu dilakukan review pelaksanaan peraturan pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, yang seringkali menghambat investasi.

Dalam jangka pendek, Indonesia dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil yang sangat langka—sangat langka dengan mengizinkan masuknya lebih banyak tenaga profesional berketerampilan tinggi dari luar negeri dan memperkuat reformasi yang diinisiasi melalui peraturan presiden terbaru tentang izin pekerja

Dalam jangka pendek, Indonesia dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil yang sangat langka—salah satu kendala utama terhadap daya saing perusahaan-perusahaan—dengan mengizinkan masuknya lebih banyak tenaga profesional berketerampilan tinggi dari luar negeri. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat reformasi yang diinisiasi melalui Peraturan Presiden terbaru tentang izin pekerja (No. 28/2018), yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang lebih penting lagi, beberapa ketentuan yang bersifat membatasi (restriktif) mengenai mempekerjakan tenaga profesional asing masih tetap berlaku, termasuk perlunya rencana pekerja asing mendapatkan persetujuan dan ratio pekerja asing

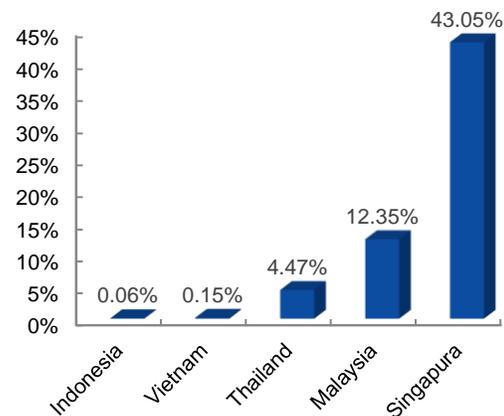
**Gambar B.27: Penghapusan batas ekuitas asing dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor**  
(investasi tambahan yang diharapkan dari penghapusan batas ekuitas asing, dalam juta USD)



Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan PerPres DNI dan data investasi BKPM

Restriksi lain yang tidak tercakup dalam DNI perlu ditangani melalui perubahan undang-undang (misalnya, Undang-Undang Hortikultura dan Undang-Undang Pendidikan) dan peraturan-peraturan sektoral (misalnya, TKDN untuk barang elektronik). Selain itu, sebagai bagian dari agenda jangka panjang, perlu dilakukan review pelaksanaan peraturan pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, yang seringkali menghambat investasi.

**Gambar B.28: Indonesia belum memanfaatkan tenaga terampil asing untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja domestik**  
(pangsa pekerja asing dalam angkatan kerja, 2016)



Sumber: Statistik imigrasi di setiap negara (untuk jumlah visa asing) dan Indikator Pembangunan Dunia (untuk angkatan kerja). Catatan: Data 2016 untuk semua negara kecuali Vietnam (2015).

<sup>81</sup> Ketika isu ini sampai ke pihak media, Pemerintah membahas kemungkinan untuk mengeluarkan revisi DNI, yang mungkin akan segera terbit.  
<sup>82</sup> Hasil perhitungan ini didasarkan pada estimasi tanggapan investasi terhadap batas ekuitas asing dari model empiris yang disebutkan di atas dan diuraikan dalam laporan Bank Dunia (2017).

terhadap domestik yang ketat. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk melonggarkan ketentuan-ketentuan ini, yang bisa menjelaskan mengapa hanya 0,06 persen tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, yaitu hanya sebagian kecil dari pangsa negara-negara setara lain di kawasan regional (Gambar B.28).

**Menghapuskan subsidi BBM merupakan reformasi jangka pendek penting lain, yang dapat berpengaruh positif bagi daya saing industri manufaktur maupun stabilitas eksternal.**

Reformasi penting lain yang dapat dicapai dalam jangka pendek adalah penghapusan subsidi BBM, yang tidak hanya berdampak positif terhadap daya saing Indonesia tetapi juga memperkuat stabilitas eksternal. Di satu pihak, penghapusan subsidi BBM akan banyak membebaskan sumber daya fiskal untuk membiayai pengeluaran lain yang lebih efektif. Pada tahun 2018, pemerintah memperkirakan subsidi yang diberikan mencapai sekitar 5 persen dari belanja pemerintah pusat dalam APBN dan 0,7 persen dari PDB 2018. Di pihak lain, kenaikan harga BBM sebagai akibat dari penghapusan subsidi dapat mendorong sektor industri untuk melakukan penghematan sebagaimana ditunjukkan oleh bukti empiris di atas. Meskipun

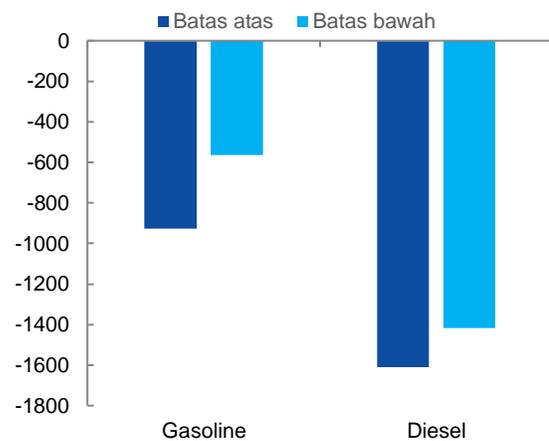
penghapusan subsidi bisa menyebabkan tekanan inflasi, kenaikan harga BBM domestik juga akan menurunkan permintaan, dan oleh karena itu impor, solar, bensin dan LPG sehingga memperbaiki keseimbangan eksternal Indonesia. Bank Dunia memperkirakan bahwa pencabutan subsidi BBM dapat menurunkan impor solar dan bensin senilai USD 2 sampai 2,5 miliar (Gambar B.29).

**Merevisi Undang-Undang Persaingan Usaha yang ada merupakan langkah penting untuk membuat kerangka persaingan usaha Indonesia lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menjatuhkan sanksi atas perilaku anti persaingan**

Merevisi Undang-Undang Persaingan Usaha yang ada (no. 5/1999) merupakan langkah penting untuk membuat kerangka persaingan usaha Indonesia lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menjatuhkan sanksi atas perilaku anti persaingan. DPR RI sedang membahas revisi Undang-Undang ini, yang menjadi kesempatan yang unik untuk memperkuat kemampuan sistem dalam mengidentifikasi dan mencegah perilaku anti persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan. Secara khusus, alat-alat untuk mendeteksi dan mencegah kartel perlu dikembangkan, termasuk memberikan wewenang kepada KPPU untuk mengadakan pemeriksaan mendadak guna mengumpulkan bukti-bukti praktek anti persaingan; meningkatkan batas maksimum denda; memperkuat kemampuan KPPU untuk melaksanakan ketentuan itu; dan memberikan kemungkinan keringanan hukuman atas perusahaan yang menyampaikan informasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan menjatuhkan sanksi atas kartel. Selain itu, revisi UU dapat memperjelas penerapan sanksi administratif dan pidana atas badan usaha dan perorangan; menetapkan definisi “pelaku usaha” agar mencakup semua badan hukum yang beroperasi sebagai unit ekonomi tunggal di pasar; dan mensosialisasikan konsep settlement yang bisa meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Yang terakhir, sistem yang ada perlu memperkuat kemampuan KPPU untuk mencegah merger anti persaingan dengan menggantikan sistem notifikasi pasca-merger saat ini menjadi sistem notifikasi wajib pra-merger, mempertegas standar teori kerugian dan definisi merger yaitu penggabungan dua atau lebih unit ekonomi yang sebelumnya berdiri sendiri (independen) melalui perubahan pengendalian perusahaan untuk jangka panjang.

**Gambar B.29: Menurunkan subsidi BMM dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan**

(*estimasi perubahan impor tahunan setelah penghapusan subsidi BBM, dalam juta USD*)



Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Citi Research (estimasi harga ekonomis), BPS (data impor), Agustina et al. (2008) (elastisitas permintaan) dan Pertamina (pemisahan konsumsi BBM)

*Jangka menengah*

**Dalam jangka menengah, Indonesia perlu memasukkan pertimbangan persaingan usaha dalam perumusan kebijakannya dan memperkuat kapasitas KPPU dalam menegakkan undang-undang persaingan usaha dan mendukung reformasi pro-persaingan usaha**

Dalam jangka menengah, Indonesia perlu memasukkan pertimbangan persaingan usaha dalam perumusan kebijakannya dan memperkuat kapasitas teknis KPPU untuk menegakkan undang-undang persaingan usaha dan mendukung reformasi pro-persaingan usaha. Penegakan undang-undang sangat penting karena peraturan-peraturan pemerintah seringkali mencegah masuknya industri dan membatasi persaingan impor sehingga membantu menciptakan posisi dominan dan memfasilitasi terbentuknya kartel-kartel. Hal ini memerlukan sistem tata kelola regulasi yang lebih efektif. Misalnya, ini mencakup pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7/2017, yang mengamanatkan kementerian-kementerian koordinator untuk meneliti peraturan-peraturan baru dan kementerian-kementerian penanggung jawab untuk melaksanakan analisis dampak dan mengadakan konsultasi publik yang luas dalam rangka melaksanakan reformasi yang diusulkan, dan revisi Undang-Undang tentang Penyusunan Undang-Undang (2011). Mengikutsertakan KPPU dalam proses konsultasi akan membantu memastikan adanya pertimbangan yang lebih sistematis mengenai dampak regulasi terhadap hambatan masuk, perluasan dan persaingan usaha. Selain itu, KPPU dan regulator sektoral dapat memperkuat penilaian mereka mengenai pasar Indonesia untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan yang ada sekarang dan intervensi-intervensi pemerintah yang menghambat persaingan, serta merekomendasikan tindakan alternatif yang meminimalkan distorsi pasar. Selain itu, penguatan kapasitas KPPU untuk melakukan analisis dan investigasi juga penting guna memastikan adanya penegakan aturan persaingan yang lebih baik, khususnya jika revisi undang-undang persaingan usaha memberinya wewenang penyelidikan dan pencegahan yang lebih efektif. Agar hal ini dapat terlaksana, prosedur penanganan kasus, pengambilan keputusan dan pemantauan oleh KPPU perlu disederhanakan.

**Untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga terampil Indonesia maka kualitas sistem pendidikan perlu diperkuat di semua jenjang pendidikan**

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga terampil Indonesia merupakan agenda jangka panjang yang kompleks dan hendaknya menjadi inti dari strategi pemerintah untuk meningkatkan ekspor dan investasi. Untuk itu, sistem pendidikan di semua jenjang pendidikan perlu ditingkatkan. Meskipun Indonesia telah berhasil memperkuat pencapaian pendidikan sekolah sejak awal tahun 2000an, hasil belajar siswa masih di bawah tingkat siswa di negara-negara setara lain. Bank Dunia (2018a) menyampaikan beberapa rekomendasi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Rekomendasi tersebut mencakup mendefinisikan dan menegakkan kriteria kualifikasi wajib bagi guru dengan lebih baik, melengkapi mekanisme pembiayaan pendidikan yang ada dengan memberikan bantuan yang tepat sasaran dan berbasis kinerja kepada sekolah dan kabupaten/kota tertinggal, dan meluncurkan kampanye peningkatan kualitas pendidikan nasional untuk menghasilkan tekanan publik agar melaksanakan aksi-aksi yang efektif untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Selain itu, pendidikan pasca sekolah menengah dapat memanfaatkan masuknya universitas asing seperti yang ditandai dengan niat Pemerintah yang dinyatakan awal tahun ini untuk membuka universitas bagi investasi asing.<sup>83</sup> Reformasi tersebut, yang disertai dengan pelonggaran restriksi untuk mempekerjakan dosen asing dapat meningkatkan sistem pendidikan tinggi dengan memperluas batas-batas pengetahuan dan meningkatkan persaingan dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi.

**Untuk meningkatkan infrastruktur energi dan transportasi, maka yang perlu dilakukan adalah**

Memperkuat infrastruktur energi dan transportasi merupakan unsur-unsur lain dari agenda kebijakan utama untuk meningkatkan kehandalan dan mengurangi biaya listrik dan transportasi. Untuk itu, pemerintah perlu terus memperluas investasi di bidang infrastruktur seperti pada tahun-tahun sebelumnya—mungkin bahkan bisa lebih cepat. Selain itu, memanfaatkan investasi sektor swasta dapat membantu Indonesia dalam memenuhi kebutuhan infrastrukturnya yang besar dengan lebih efektif. Sebagaimana diidentifikasi oleh Bank Dunia (2017b), mobilisasi

<sup>83</sup> See, for instance, The Strait Times (April 4, 2018).

**mengurangi dominasi pasar BUMN, menyederhanakan kerangka hukum untuk kemitraan publik-swasta (PPP), dan memperkuat pasar perbankan dan pasar modal lokal**

sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur membutuhkan perbaikan pada: (i) lingkungan peraturan perundang-undangan yang kompleks untuk kerjasama publik dan badan usaha (KPBU), (ii) proses perencanaan, penilaian dan pemilihan proyek, (iii) transparansi dan efisiensi BUMN yang mendominasi sektor infrastruktur, termasuk mengurangi subsidi kepada BUMN dan menggunakan tender kompetitif terbuka untuk proyek-proyek infrastruktur, dan (iv) luasnya pasar perbankan dan modal lokal.

**Reformasi juga akan meningkatkan efektivitas insentif pajak yang mahal, yang tampaknya semakin diminati untuk digunakan oleh pemerintah untuk menarik investasi, namun hanya ada sedikit bukti keberhasilannya**

Reformasi yang dilakukan juga akan meningkatkan efektivitas insentif pajak, salah satu instrumen yang tampaknya semakin diminati untuk digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menarik investasi. Pemerintah memperkirakan bahwa pada tahun 2017, insentif pajak melalui PPN, pajak penghasilan dan tarif impor sama besarnya dengan pendapatan fiskal sebelumnya senilai lebih dari USD 10 miliar (Pemerintah Indonesia, 2018). Meskipun dampak dari insentif tersebut dalam menarik investasi masih belum dinilai, bukti internasional memperlihatkan bahwa insentif pajak tidak begitu banyak berperan dibandingkan dengan faktor-faktor lain, seperti biaya bahan mentah dan produk antara, transparansi sistem hukum, kualitas infrastruktur dan ketersediaan tenaga terampil (UNIDO 2011; Bank Dunia 2018c). Malahan, data yang ada memperlihatkan bahwa insentif pajak kurang berguna dalam menarik investasi di negara-negara di mana faktor-faktor itu tidak dikembangkan (Van Parys dan James 2009). Dalam hal ini, insentif pajak hanya menjadi beban fiskal bagi negara bersangkutan, karena yang menikmatinya hanya investor yang membayar pajak lebih rendah. Hal itu juga terjadi pada program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Indonesia, yang memberikan keringanan pajak kepada perusahaan-perusahaan di kabupaten/kota tertentu di pulau-pulau terluar Indonesia. Ketika program ini dievaluasi, Rothenberg et al. (2017) mendapati bahwa perusahaan-perusahaan di kabupaten/kota KAPET membayar pajak lebih rendah tetapi insentif pajak yang diberikan tidak mendorong peningkatan masuknya perusahaan-perusahaan maupun memperbesar ukuran output atau kesejahteraan lokal.

## Referensi

### Bagian A

- APBN Kita. November 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/informasi-apbn-kita-2018/>
- Bank Indonesia. July 2018. <https://www.bi.go.id/id/moneter/koordinasi-pengendalian-inflasi/highlight-news/Pages/Analisis-Inflasi-TPIP-Juli-2018.aspx>
- Bank Indonesia. September 2018. Press releases. [https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_207318.aspx](https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_207318.aspx)
- Bank Indonesia. August 15, 2018. Press releases. [https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_206618.aspx](https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_206618.aspx)
- CNBC. November 07, 2018. <https://www.cnbc.com/2018/11/07/forex-markets-dollar-us-midterm-elections-in-focus.html>
- Detik.com. September 05, 2018. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4199347/pajak-impor-barang-konsumsi-naik-hingga-10-kapan-berlaku>
- DJPPR. November 2017. Struktur Jatuh Tempo Utang. <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/24>
- Metronews. November 05, 2018. <http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/gNQMYBvN-target-penerimaan-cukai-masih-sesuai-apbn-2019>
- Montel. November 05, 2018. <https://www.montelnews.com/de/story/indonesia-cuts-november-coal-price-by-3/950238>
- Pertamina. October 10, 2018. <https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-10-oktober-2018>.
- Reuters. October 31, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-singapore-siew-indonesia/indonesia-imposes-mandatory-use-of-b20-biodiesel-in-drive-to-cut-fuel-bill-deputy-minister-idUSKCN1N5160>
- The Business Times. November 01, 2018. <https://www.businesstimes.com.sg/energy-commodities/oil-prices-fall-on-signs-of-rising-global-supply>
- World Bank Commodities Price Forecast. October 2018. <http://pubdocs.worldbank.org/en/823461540394173663/CMO-October-2018-Forecasts.pdf>
- World Bank. 2019 (forthcoming). *Global Economic Prospects: Darkening Skies*. January. Washington, DC: World Bank.

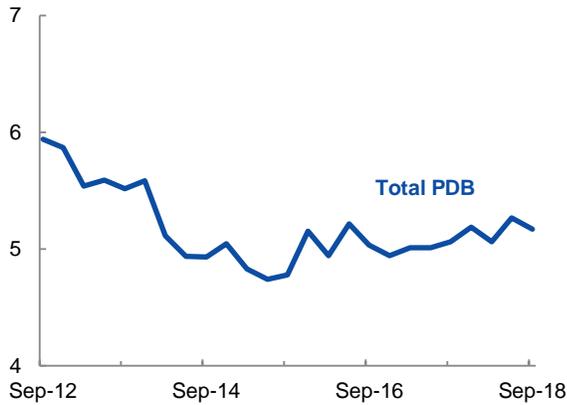
### Bagian B

- Aleman, E., C. Klein, I. Koske, C. Vitale, and I. Wanner. 2016. New Indicators of Competition Law and Policy in 2013 for OECD and non-OECD Countries. In Frédéric Jenny and Yannis Katsoulacos (eds.), *Competition Law Enforcement in the BRICS and in Developing Countries*. Springer, Cham, pp. 59–102
- American Chamber of Commerce in South China. 2018. *Special Report on the Impact of US and Chinese Tariffs*.
- Amiti, M. and A. K. Khandewal. 2013. Import Competition and Quality Upgrading. *Review of Economics and Statistics* 95 (2): 476–90.
- Amiti, M. and J. Konings. 2007. Trade liberalization, intermediate inputs, and productivity: Evidence from Indonesia, *American Economic Review* 97 (5): 1611–38.
- Arnold, J. M., B. Javorcik and A. Mattoo. 2011. Does services liberalization benefit manufacturing firms?: Evidence from the Czech Republic *Journal of International Economics* 85 (1): 136–46.
- Arnold, J. M., B. Javorcik, M. Lipscomb, and Mattoo, A. 2016. Services reform and manufacturing performance: Evidence from India. *Economic Journal* 126 (590): 1–39.
- Cali, M. 2017 *Have the economic policy packages reduced import costs in Indonesia? A quantitative assessment of two sets of measures*. mimeo. World Bank.
- \_\_\_\_\_. 2018. *The impact of the US-China trade war on East Asia*. VoxEu
- Cali, M., T. Hidayat, G. Presidente and N. Cantore. 2018. *Too Much Energy: The Perverse Effect of Low Fuel Prices*. Mimeo. World Bank.
- Cali, M. and L. Puzzello. 2018. The welfare impact of non tariff measures on Indonesia. mimeo. World Bank.
- Cirera, X., and W. F. Maloney. 2017. *The innovation paradox: Developing-country capabilities and the unrealized promise of technological catch-up*. World Bank.
- Diop, N. 2016. *Making Indonesian Manufacturing an Engine of Growth Again: Now or Never?* Mimeo. World Bank.

- Duggan, V., S. Rahardja, and G. Varela. 2013. "Service Sector Reform and Manufacturing Productivity: Evidence from Indonesia." Policy Research Working Paper 6349. Washington, DC: World Bank.
- Gomez-Mera, L. and C. Hollweg. 2018. *Firm performance and constraints in Indonesia*. Mimeo. World Bank.
- Government of Indonesia. 2018. *Tax expenditure report 2016-2017*. Jakarta: Indonesian Ministry of Finance.
- Government of Indonesia and World Bank. 2018. Indonesia Critical Occupations List 2018 Technical Report. Mimeo. World Bank.
- Hallward-Driemeier, M., & Nayyar, G. 2017. *Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-led Development*. World Bank.
- Ivaldi, M., F. Jenny and A. Khimich. 2016. Cartel damages to the economy: an assessment for developing countries. In Frédéric Jenny and Yannis Katsoulacos (eds.), *Competition Law Enforcement in the BRICS and in Developing Countries*. Cham: Springer. pp. 103-133.
- Maliszewska, M., Z. Olekseyuk, I. Osorio Rodarte and M. Cali. (forthcoming). Economic and distributional Impacts of Free Trade Agreements – the Indonesian case. World Bank.
- Marks, S. V. 2017. Non-tariff Trade Regulations in Indonesia: Nominal and Effective Rates of Protection. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 333–57.
- Narjoko, D., T. Anas, and R. Herdiyanto. 2018. The Elusive Pursuit of Import Substitution in 21st Century Indonesia. *Asian Economic Papers*, 17(1), 73–93.
- Nikkei Asian Review. 2018. Trade war drives Asian manufacturing out of China. October 24.
- Pavnick, N. 2002. Trade Liberalization, Exit, and Productivity Improvements: Evidence from Chilean Plants, *Review of Economic Studies*, 69 (1): 245–76.
- Poczter, S. 2017. You Can't Count on Me: The Impact of Electricity Unreliability on Productivity. *Agricultural and Resource Economics Review*, 46(3), 579–602.
- Rahardja, S., and G. Varela. 2014. Nothing to Fear but Fear Itself: Evidence on Imported Intermediates in Indonesia. *World Bank Economic Premise* no. 138.
- Rodrik, D. 2012. Unconditional Convergence in Manufacturing. *Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 165–204.
- \_\_\_\_\_. 2016. Premature Deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1–33.
- Rothenberg, A.D., S. Bazzi, S. Nataraj and A. Chari. 2017. When Regional Policies Fail: An Evaluation of Indonesia's Integrated Economic Development Zones. Mimeo.
- Temenggung, D. 2013. Policies to Promote Development and Integration of Lagging Regions: The Indonesian Experience, in *The Internal Geography of Trade: Lagging Regions and Global Markets*, ed. by T. Farole. Washington, D.C.: The World Bank, 209–27.
- Ting-Fan, C. and L. Li. 2018. Apple Supplier Seeks to Escape Trade War Fallout with Shift Out of China. *Nikkei Asian Review*. October 12.
- The Strait Times. April 4, 2018. "Indonesia to open university sector to 100 percent foreign ownership".
- UNIDO 2011. Africa Investor Report. Vienna: UNIDO.
- Van Parys, S., and James, S. 2009. Why Tax Incentives May be an Ineffective Tool to Encourage Investment? The Role of Investment Climate *SSRN Electronic Journal* December 2008.
- World Bank. 2015a. Improving Indonesia's freight logistics system: A plan of action, Report No: AUS5940.
- \_\_\_\_\_. 2016. *South Africa Economic Update: Promoting faster growth and poverty alleviation through competition*. Washington DC: World Bank.
- \_\_\_\_\_. 2017a. *Indonesia Economic Quarterly: Upgraded*. June. Jakarta: World Bank.
- \_\_\_\_\_. 2017b. *Indonesia Economic Quarterly: Closing the gap*. October. Jakarta: World Bank.
- \_\_\_\_\_. 2017c. *Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP)*. mimeo.
- \_\_\_\_\_. 2018a. *Indonesia Economic Quarterly: Learning more, growing faster*. June. Jakarta: World Bank.
- \_\_\_\_\_. 2018b. *Survey on the logistics costs of Indonesian manufacturers 2017*. mimeo.

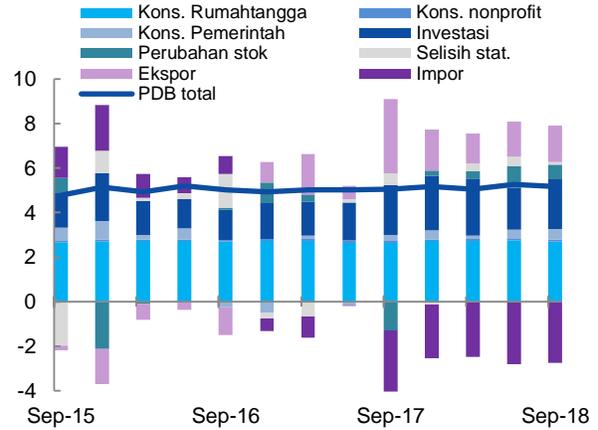
**LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA**

**Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil**  
(pertumbuhan triwulanan yoy, persen)



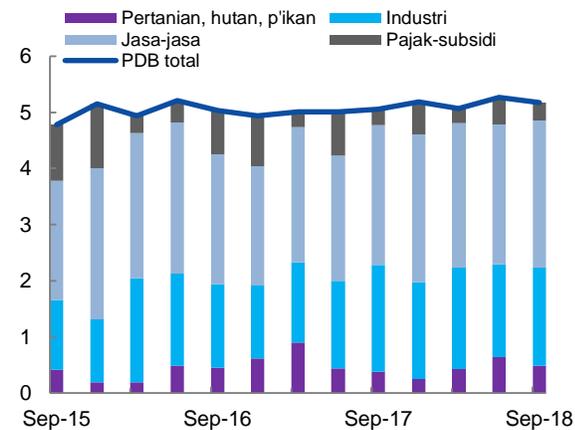
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB konsumsi**  
(kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase)



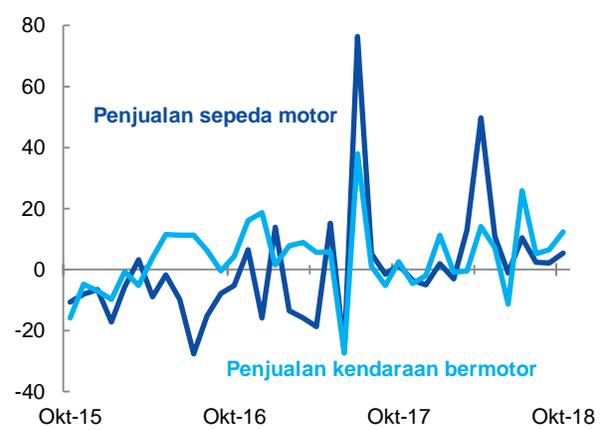
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi**  
(kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase)



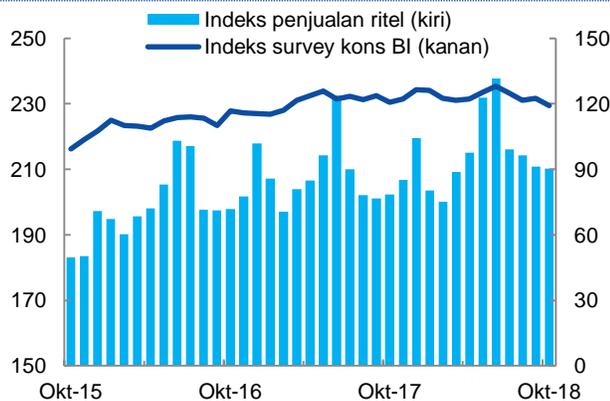
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor**  
(pertumbuhan yoy, persen)



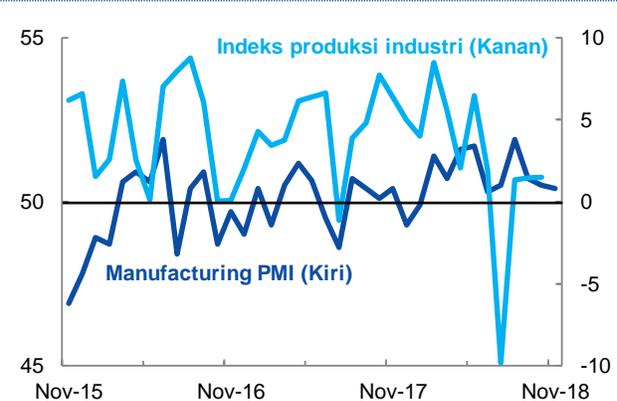
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen**  
(Tabun dasar penjualan eceran 2010=100)



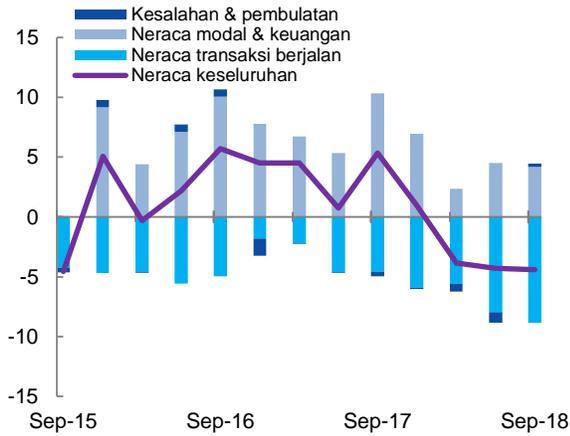
Sumber: BI

**Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI**  
(indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen)



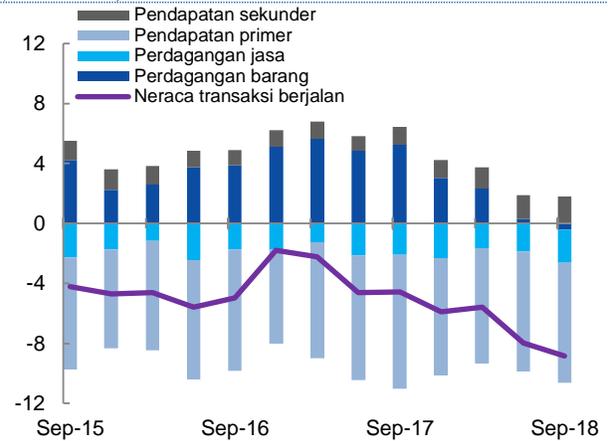
Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Manufacturing PMI diatas 50 mengindikasikan ekspansi

Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran  
(USD miliar)



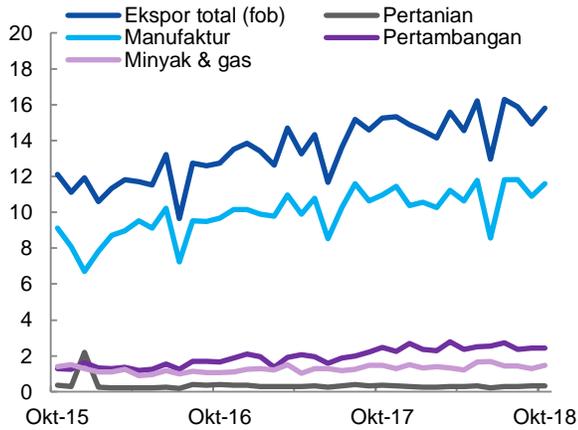
Sumber: BI

Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran: neraca berjalan  
(USD miliar)



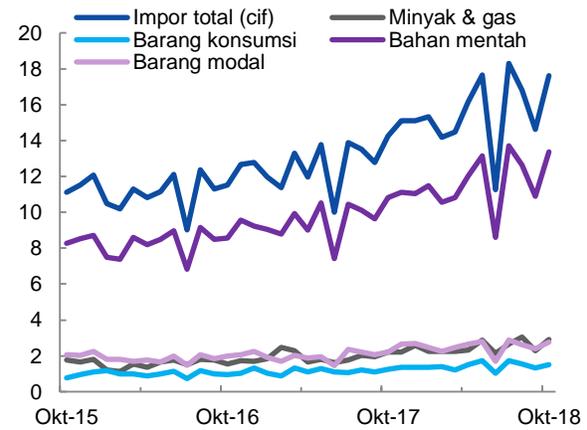
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang  
(USD miliar)



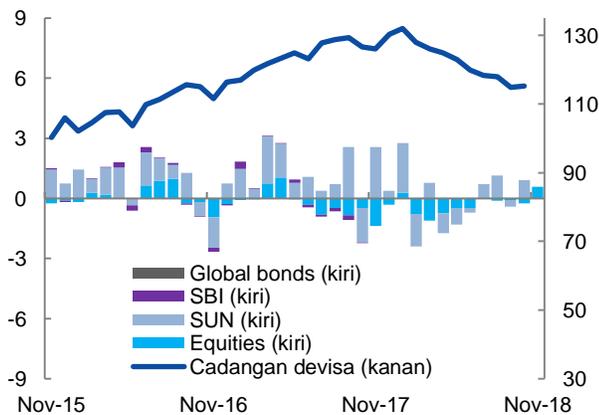
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang  
(USD miliar)



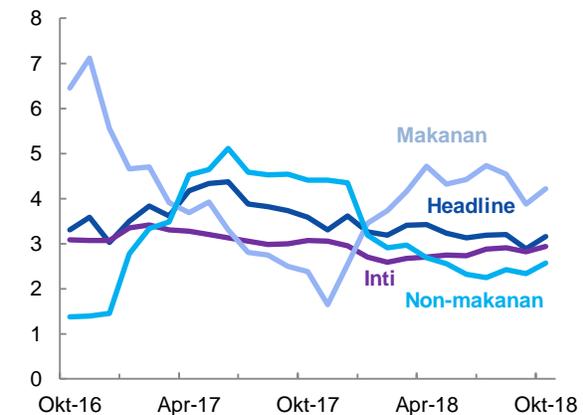
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus modal  
(USD miliar)



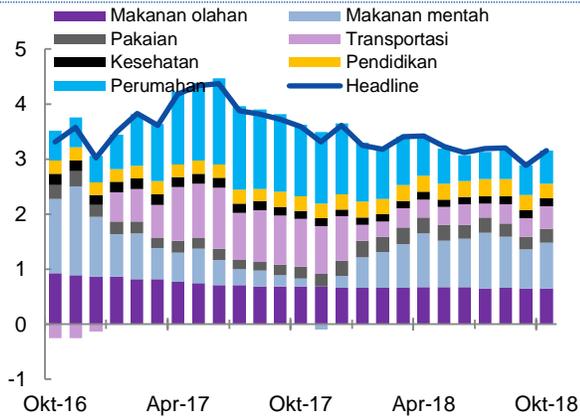
Sumber: BI; Kementerian Keuangan  
Catatan: SUN = Surat Utang Negara; SBI = Surat Berharga BI

Lampiran Gambar 12: Inflasi IHK  
(pertumbuhan yoy, persen)



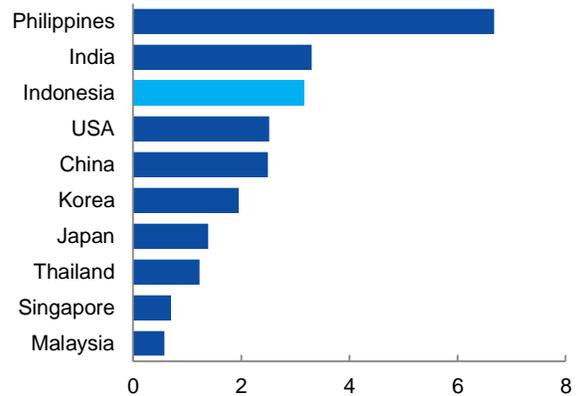
Sumber: BPS; BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian inflasi IHK bulanan  
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



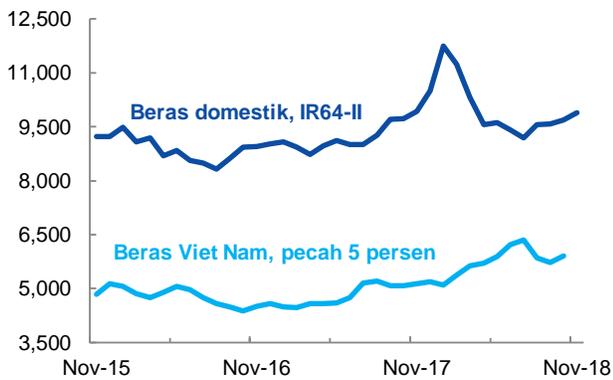
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi IHK beberapa negara  
(pertumbuhan yoy, persen)



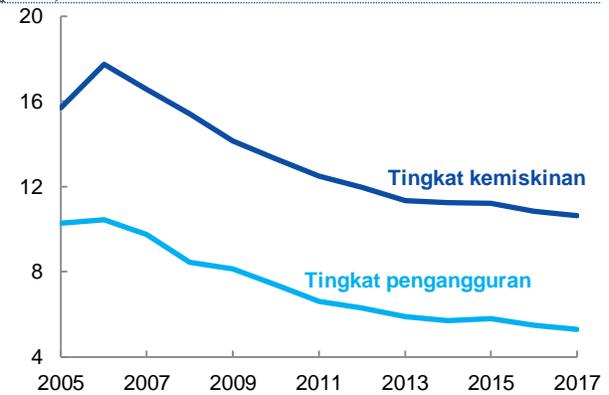
Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: data Oktober 2018

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional  
(barga grosir, IDR per kg)



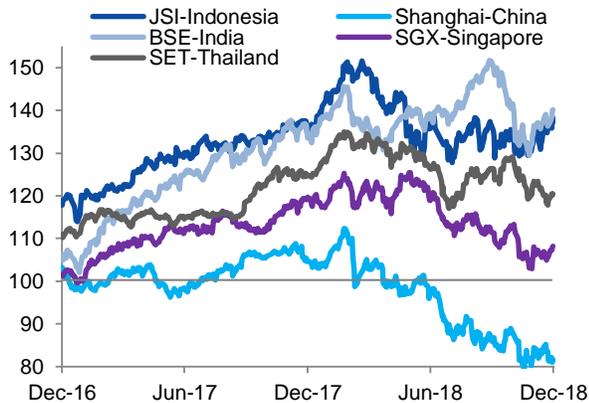
Sumber: Pusat perkulakan beras Cipinang; FAO  
Catatan: "pecah 5 persen" mengacu pada kualitas penggilingan beras. 5 persen merupakan proporsi biji pecah selama proses penggilingan.

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran  
(persen)



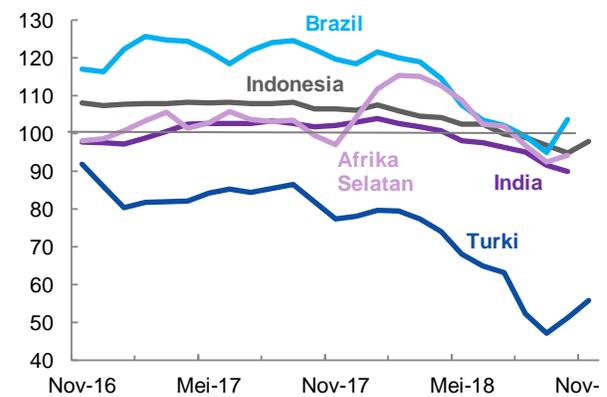
Sumber: BPS  
Catatan: Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional  
(indeks harian, September 1, 2015=100)



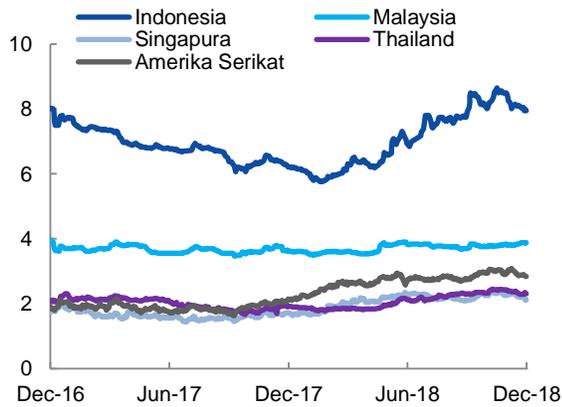
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS  
(indeks bulanan, Agustus 2015=100)



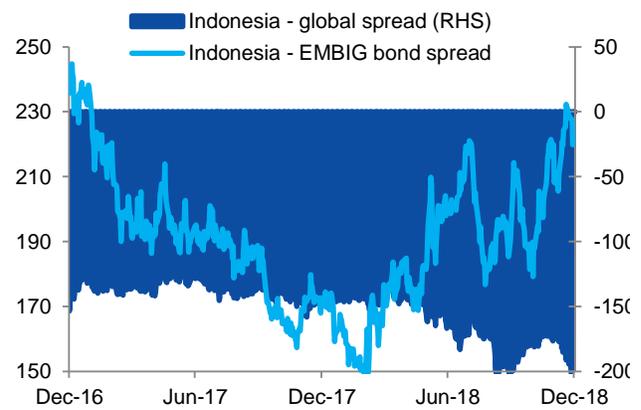
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal (persen)



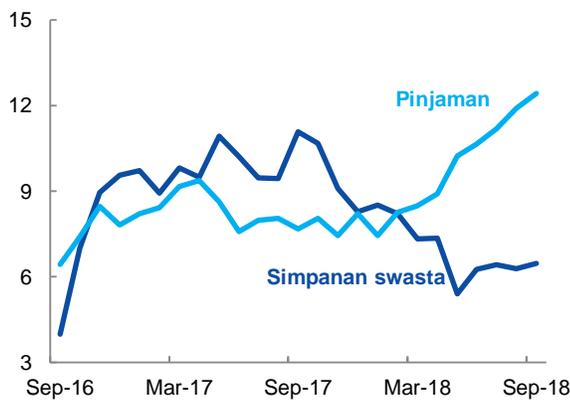
Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global (basis poin)



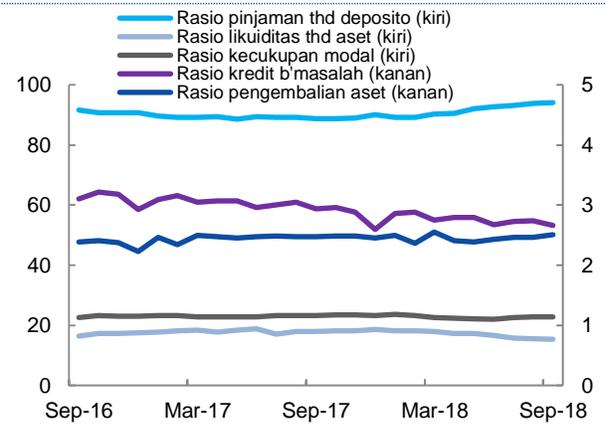
Sumber: JP Morgan

Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito (pertumbuhan yoy, persen)



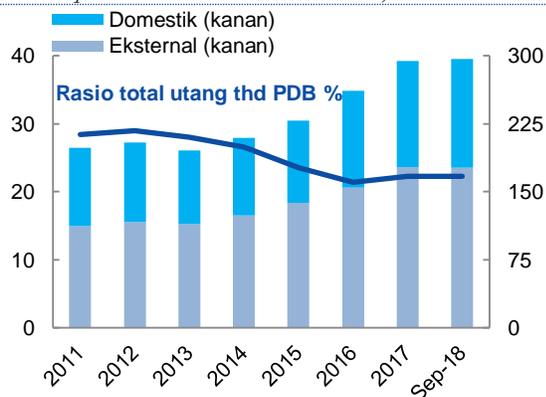
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan (bulanan, persen)



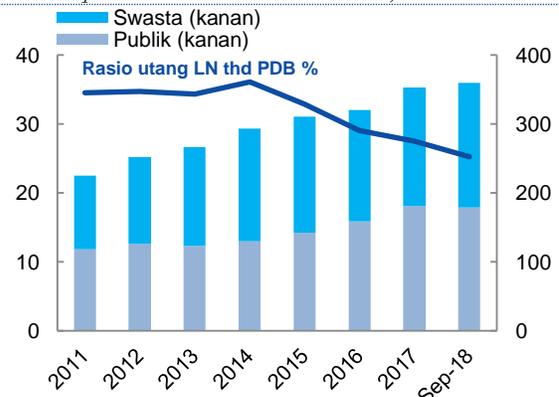
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah (rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan)



Sumber: BI; Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri (rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi anggaran belanja Pemerintah

(IDR triliun)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Realisasi						
<b>A. Penerimaan dan hibah</b>	<b>1,211</b>	<b>1,338</b>	<b>1,439</b>	<b>1,550</b>	<b>1,508</b>	<b>1,556</b>	<b>1,666</b>
1. Penerimaan pajak	874	981	1,077	1,147	1,240	1,285	1,344
2. Penerimaan non-pajak	331	352	355	399	256	262	311
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>1,295</b>	<b>1,491</b>	<b>1,651</b>	<b>1,777</b>	<b>1,807</b>	<b>1,864</b>	<b>2,007</b>
1. Pemerintah pusat	884	1,011	1,137	1,204	1,183	1,154	1,265
2. Transfer ke pemerinta daerah	411	481	513	574	623	710	742
<b>C. Neraca utama</b>	<b>9</b>	<b>-53</b>	<b>-99</b>	<b>-93</b>	<b>-142</b>	<b>-126</b>	<b>-124</b>
<b>D. Surplus / Defisit</b>	<b>-84</b>	<b>-153</b>	<b>-212</b>	<b>-227</b>	<b>-298</b>	<b>-308</b>	<b>-341</b>
(persen dari PDB)	-1.1	-1.9	-2.3	-2.2	-2.6	-2.5	-2.5

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Neraca keseluruhan sebagai terhadap PDB menggunakan PDB yang telah direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran

(USD miliar)

	2014	2015	2016	2017				2018		
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
<b>Neraca pembayaran</b>	<b>15.2</b>	<b>-1.1</b>	<b>12.1</b>	<b>4.5</b>	<b>0.7</b>	<b>5.4</b>	<b>1.0</b>	<b>-3.9</b>	<b>-4.3</b>	<b>-4.4</b>
<i>Persen dari PDB</i>	<i>1.7</i>	<i>-0.1</i>	<i>1.3</i>	<i>1.9</i>	<i>0.3</i>	<i>2.0</i>	<i>0.4</i>	<i>-1.5</i>	<i>-1.6</i>	<i>-1.7</i>
<b>Neraca berjalan</b>	<b>-27.5</b>	<b>-17.5</b>	<b>-17.0</b>	<b>-2.2</b>	<b>-4.6</b>	<b>-4.6</b>	<b>-5.9</b>	<b>-5.6</b>	<b>-8.0</b>	<b>-8.8</b>
<i>Persen dari PDB</i>	<i>-3.1</i>	<i>-2.0</i>	<i>-1.8</i>	<i>-0.9</i>	<i>-1.8</i>	<i>-1.7</i>	<i>-2.3</i>	<i>-2.2</i>	<i>-3.0</i>	<i>-3.4</i>
Neraca perdagangan	-3.0	5.4	8.2	4.4	2.7	3.2	0.7	0.7	-1.6	-2.6
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-24.5	-22.9	-25.2	-6.6	-7.3	-7.8	-6.6	-6.3	-6.4	-6.2
<b>Neraca modal dan keuangan</b>	<b>44.9</b>	<b>16.9</b>	<b>29.3</b>	<b>6.7</b>	<b>5.3</b>	<b>10.3</b>	<b>7.0</b>	<b>2.4</b>	<b>4.5</b>	<b>4.2</b>
<i>Persen dari PDB</i>	<i>5.0</i>	<i>2.0</i>	<i>3.1</i>	<i>2.8</i>	<i>2.1</i>	<i>3.9</i>	<i>2.7</i>	<i>0.9</i>	<i>1.7</i>	<i>1.6</i>
Investasi langsung	14.7	10.7	16.1	2.8	4.4	7.4	4.7	3.3	2.7	3.9
Investasi portfolio	26.1	16.2	19.0	6.5	8.1	4.0	2.2	-1.3	0.1	-0.1
Investasi lain	4.3	-10.1	-5.8	-2.5	-7.2	-1.1	0.1	0.3	1.7	0.2
<b>Kesalahan &amp; pembulatan</b>	<b>-2.2</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.1</b>	<b>-0.6</b>	<b>-0.9</b>	<b>0.3</b>
<b>Cadangan devisa*</b>	<b>111.9</b>	<b>105.9</b>	<b>116.4</b>	<b>121.8</b>	<b>123.1</b>	<b>129.4</b>	<b>130.2</b>	<b>126.0</b>	<b>119.8</b>	<b>114.8</b>

Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: \* Cadangan pada akhir periode.

Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Neraca nasional (% perubahan)<sup>1</sup></b>									
PDB riil	4.9	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1
Investasi riil	11.4	8.5	8.9	9.1	5.0	4.4	5.0	4.5	6.2
Konsumsi riil	4.6	4.1	5.1	5.4	5.7	4.7	4.9	4.3	4.6
Swasta	3.7	4.8	5.1	5.5	5.5	5.3	4.8	5.0	5.0
Pemerintah	14.2	0.3	5.5	4.5	6.7	1.2	5.3	-0.1	2.1
Ekspor riil, barang dan jasa	30.6	15.3	14.8	1.6	4.2	1.1	-2.1	-1.6	9.1
Impor riil, barang dan jasa	26.6	17.3	15.0	8.0	1.9	2.1	-6.2	-2.4	8.1
Investasi (% PDB)	20	31	32	33	32.5	32.4	32.4	32.2	32.6
PDB nominal (USD miliar)	165	755	893	918	915	891	861	933	1,015
PDB per kapita (USD miliar)	857	3,167	3,688	3,741	3,668	3,532	3,370	3,603	3,878
<b>Anggaran Pemerintah Pusat (% PDB)<sup>2</sup></b>									
Pendapatan dan hibah	20.8	14.5	15.5	15.5	15.1	14.7	13.1	12.5	12.3
Pendapatan non-pajak	9.0	3.9	4.2	4.1	3.7	3.8	2.2	2.1	2.3
Pendapatan pajak	11.7	10.5	11.2	11.4	11.3	10.9	10.8	10.4	9.9
Pengeluaran	22.4	15.2	16.5	17.3	17.3	16.8	15.7	15.0	14.8
Konsumsi	4.0	3.6	3.8	3.9	4.1	4.0	4.5	4.6	4.4
Modal	2.6	1.2	1.5	1.7	1.9	1.4	1.9	1.4	1.5
Bunga pinjaman	5.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
Subsidi	6.3	2.8	3.8	4.0	3.7	3.7	1.6	1.4	1.2
Surplus/defisit	-1.6	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	-2.5	-2.5
Utang Pemerintah	97.9	24.5	23.1	23.0	24.9	24.7	27.4	28.3	30.8
Utang luar negeri pemerintah	51.4	11.1	10.2	9.9	11.2	10.2	12.7	12.3	12.8
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	87.1	26.8	25.2	27.5	29.1	32.9	36.1	34.3	34.8
<b>Neraca pembayaran (% PDB)<sup>3</sup></b>									
Neraca pembayaran keseluruhan	..	4.0	1.3	0.0	-0.8	1.7	-0.1	1.3	1.1
Neraca transaksi berjalan	4.8	0.7	0.2	-2.7	-3.2	-3.1	-2.0	-1.8	-1.7
Ekspor, barang dan jasa	42.8	22.0	23.9	23.0	22.4	22.3	19.9	18.0	19.1
Impor, barang dan jasa	33.9	19.2	21.2	23.2	23.1	22.7	19.3	17.1	18.0
Transaksi berjalan	8.9	2.8	2.7	-0.2	-0.7	-0.3	0.6	0.9	1.1
Neraca transaksi keuangan	..	3.5	1.5	2.7	2.4	5.0	2.0	3.1	2.9
Penanaman modal langsung, neto	-2.8	1.5	1.3	1.5	1.3	1.7	1.2	1.7	2.0
Cadangan devisa bruto (USD miliar)	29.4	96	110	113	99	112	106	116	130
<b>Moneter (% perubahan)<sup>3</sup></b>									
Deflator PDB <sup>1</sup>	20.4	8.3	7.5	3.8	5.0	5.4	4.0	2.5	4.3
Suku bunga Bank Indonesia (%)	..	..	..	..	..	..	6.3	4.8	4.3
Kredit domestik (akhir periode)	..	23.3	24.7	23.1	21.4	11.6	10.1	7.8	8.2
Nilai tukar nominal (rerata, IDR/USD)	8,392	9,087	8,776	9,384	10,460	11,879	13,392	13,307	13,384
<b>Harga (% perubahan)<sup>1</sup></b>									
Indeks Harga Konsumen (akhir periode)	9.4	7.0	3.8	3.7	8.1	8.4	3.4	3.0	3.6
Indeks Harga Konsumen (rerata)	3.7	5.1	5.3	4.0	6.4	6.4	6.4	3.5	3.8
Harga minyak mentah Indonesia (USD per barel, akhir periode) <sup>4</sup>	28	79	112	113	107	60	36	51	61

Sumber: <sup>1</sup> BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dengan tahun dasar 2010. <sup>2</sup> Kementerian Keuangan dan Perhitungan staf Bank Dunia, <sup>3</sup> BI, <sup>4</sup> CEIC

Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kependudukan<sup>1</sup></b>									
Penduduk (juta orang)	212	243	246	249	252	255	258	261	264
Pertumbuhan penduduk (%)	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
Penduduk perkotaan (% dari total)	42	50	51	51	52	53	53	54	55
Rasio ketergantungan (% dari penduduk usia kerja)	55	51	51	50	50	50	49	49	49
<b>Ketenagakerjaan<sup>2</sup></b>									
Angkatan kerja, total (juta orang)	98	117	117	120	120	122	122	125	128
Laki-laki	60	72	73	75	75	76	77	77	79
Perempuan	38	45	44	46	45	46	46	48	49
Proporsi pekerja di sektor agrikultur (%)	45	38	36	35	35	34	33	32	30
Proporsi pekerja di sektor industri (%)	17	19	21	22	20	21	22	21	22
Proporsi pekerja di sektor jasa (%)	37	42	43	43	45	45	45	47	48
Pengangguran, total (% dari jumlah angkatan kerja)	8.1	7.1	7.4	6.1	6.2	5.9	6.2	5.6	5.5
<b>Kemiskinan dan distribusi pendapatan<sup>3</sup></b>									
Median konsumsi rumah tangga (000 IDR per bulan)	104	374	421	446	487	548	623	697	765
Garis kemiskinan nasional (000 IDR per bulan)	73	212	234	249	272	303	331	354	375
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional (million)	38	31	30	29	28	28	29	28	28
Tingkat kemiskinan (% populasi di bawah garis kemiskinan nasional)	19.1	13.3	12.5	12.0	11.4	11.3	11.2	10.9	10.6
Urban (% dari populasi di bawah garis kemiskinan urban)	14.6	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3	8.3	7.8	7.7
Rural (% dari populasi di bawah garis kemiskinan rural)	22.4	16.6	15.7	15.1	14.3	14.2	14.2	14.1	13.9
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	11.0	10.2	9.5	9.2	9.0	9.3	9.0	8.7
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	9.5	9.7	8.8	8.6	8.6	11.1	9.8	9.3
Indeks Gini	0.30	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.1	7.0
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	40.6	46.5	46.7	47.3	46.8	47.3	46.2	45.7
Belanja pemerintah utk jaminan dan kesejahteraan sosial (% PDB) <sup>4</sup>	..	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
<b>Kesehatan dan Gizi<sup>1</sup></b>									
Tenaga kesehatan (per 1.000 orang)	0.16	0.14	..	0.20	..	..	..	..	..
Angka kematian balita (per 1.000 anak usia dibawah 5 thn)	52	33	32	31	29	28	27	26	25
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	22	16	16	15	14	14	13	13	12
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	41	28	26	25	25	24	23	22	21
Angka kematian ibu (estimasi model, per 100.000 kelahiran hidup)	265	165	156	148	140	133	126	..	..
Imunisasi campak (% dari anak usia dibawah 2 tahun)	76	78	80	82	81	75	75	76	75
Total pengeluaran untuk kesehatan (% dari PDB)	2.0	3.5	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	..	..
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% dari PDB)	0.6	1.1	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	..	..
<b>Pendidikan<sup>3</sup></b>									
Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%),	..	92	92	93	92	93	97	97	97
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	48	49	49	50	48	49	49	49
Angka Partisipasi Murni pendidikan tingkat menengah (%),	..	61	60	60	61	65	66	66	79
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	50	50	49	50	50	51	51	49
Angka Partisipasi Murni universitas/pendidikan tinggi (%),	..	16	14	15	16	18	20	21	19
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	53	50	54	54	55	56	55	53
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	91	91	92	93	93	95	95	96
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari PDB) <sup>5</sup>	..	3.5	3.6	3.8	3.8	3.6	3.5	3.3	3.0
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari APBN) <sup>5</sup>	..	20.0	20.2	20.1	20.0	19.9	20.6	20.0	20.0
<b>Air bersih dan kesehatan lingkungan<sup>1</sup></b>									
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% dari total penduduk)	75	85	86	87	88	89	90	..	..
Urban (% dari penduduk urban)	89	94	94	95	96	96	97	..	..
Rural (% dari penduduk rural)	64	76	77	78	79	80	81	..	..
Penduduk dengan akses fasilitas sanitasi (% dari total penduduk)	44	60	62	64	65	66	68	..	..
Urban (% dari penduduk urban)	66	74	74	75	76	77	77	..	..
Rural (% dari penduduk rural)	28	47	49	51	53	55	57	..	..
<b>Lainnya<sup>1</sup></b>									
Skor perbaikan pengurangan risiko bencana (skala 1-5; 5=paling baik)	..	..	3.3	..	..	..	..	..	..
Proporsi perempuan di kursi parlemen (%) <sup>6</sup>	8	18	18	19	19	17	17	17	20

Sumber: <sup>1</sup> World Development Indicators; <sup>2</sup> BPS (Sakernas); <sup>3</sup> BPS (Susenas) dan World Bank; <sup>4</sup> Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Perhitungan staf Bank Dunia, hanya termasuk pendistribusian Raskin, asuransi kesehatan dan beasiswa pendidikan untuk warga miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta realisasi; <sup>5</sup> Kementerian Keuangan; <sup>6</sup> Inter-Parliamentary Union



**Australian Government**

**Department of Foreign Affairs and Trade**

Supported by funding from the Australian Government  
(Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the  
Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis  
(SEMEFPA) program.